

Milik Depdiknas  
Tidak diperdagangkan



**PERANAN ELIT AGAMA  
PADA MASA  
REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
JAKARTA  
2000**

Milik Depdiknas  
Tidak diperdagangkan

**PERANAN ELIT AGAMA  
PADA MASA  
REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
JAKARTA  
2000**

## **PERANAN ELIT AGAMA PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA**

**Tim Penulis** : **Mohammad Iskandar**  
**Shalfiyanti**  
**Wiwi Kuswiah**  
**Triana Wulandari**

**Penyunting** : **Mohammad Iskandar**

**Hak cipta dilindungi** oleh Undang-undang

**Diterbitkan oleh** : **Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional**

**Jakarta 2000**

**Edisi 2000**

**Dicetak oleh** : **CV. Putra Prima**

## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional (Proyek IDSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Disamping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek PKSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan : isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami menyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek PKSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya  
Proyek PKSN sebagaimana adanya ditangan pembaca, kami  
sampaikan terima kasih.

Jakarta, Juni 2000

**Direktur Jenderal Kebudayaan**



**IGN. Anom**

**NIP. 130353848**

## **PENGANTAR**

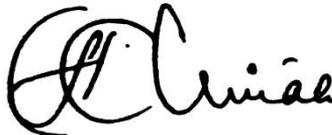
**Buku Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia ini merupakan salah satu hasil pelaksanaan kegiatan penelitian/penulisan yang diselenggarakan Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2000.**

**Buku ini menguraikan tentang Peranan Elit Agama pada masa Revolusi Kemerdekaan**

**Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk menambah Khasanah Sejarah Indonesia dan memberi informasi yang memadai bagi mereka yang berminat dan dapat menjadi bahan peningkatan kesadaran Sejarah Masyarakat terutama generasi penerus bangsa.**

**Jakarta, Juni 2000**

**Pemimpin Proyek Peningkatan  
Kesadaran Sejarah Nasional**



**Wiwi Kuswiah**  
**NIP. 131125902**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Penelitian .....	4
1.3 Ruang Lingkup .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II. ELIT AGAMA DAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	
2.1 Kyai dan Ulama .....	9
2.2 Ulama dan Penduduk Desa .....	18
<b>BAB III. DARI GERAKAN SOSIAL KE GERAKAN NASIONAL</b>	
3.1 Elit Agama dalam Pergerakan Sosial .....	37
3.2 Elit Agama dalam Pergerakan Nasional .....	43
<b>BAB IV. DALAM KANCAH REVOLUSI KEMERDEKAAN</b>	
4.1 Masa Transisi .....	67
4.2 Kasus Banten .....	69
4.3 Kasus di Daerah Aceh .....	84
<b>PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>115</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *1.1. Latar Belakang*

Dalam pengertian yang umum, kata elit agama yang sering diterjemahkan ke dalam kata “ulama, mempunyai arti sebagai orang-orang pintar, terkemuka, atau orang-orang terpandang dari kalangan agama. sebagai elit agama seringkali dikaitkan dengan Islam. Hal itu dapat dimengerti karena asal kata ulama itu sendiri memang berasal dari kata Arab yang sering pula diidentikan dengan Islam. Padahal dalam kenyataannya, sebutan ulama ini sudah dipakai pula untuk menyebut para elit agama non-Islam. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan salah pengertian atau interpretasi yang salah, maka perlu ditegaskan di sini, bahwa yang dimaksud ulama atau elit agama di sini, adalah elit Islam.

Ulama dalam komunitas Islam merupakan sebutan kepada seseorang atau kelompok yang dianggap mempunyai ilmu pengetahuan agama yang mumpuni, yang jauh melebihi guru-guru agama Islam lainnya. Sebutan sehari-hari kepada kaum ulama ini cukup beragam dari satu daerah ke daerah lainnya. Ada yang menyebutnya “tuan guru”, “sheik”, “kyai”, dan “ulama”. Dan barangkali dalam perkembangan sejarah masyarakat Indonesia, sebutan “kyai” dan “ulama” merupakan yang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk menyebut para elit agama tersebut. Satu hal yang menarik dari kedua sebutan itu

adalah tentang makna keilmuan yang disandang oleh kedua sebutan tersebut. Ternyata penilaian masyarakat terhadap kedua sebutan itu sangat beragam. Di satu pihak ada yang mengatakan bahwa ulama lebih tinggi ilmu pengetahuannya daripada seorang kyai. Di pihak lainnya justru berpendapat sebaliknya, yang lebih tinggi ilmu pengetahuan itu adalah kyai.<sup>1</sup>

Satu hal yang yang tidak kalah menariknya daripada pemaknaan keilmuan tadi adalah dalam hal pengkatagorian elit-elit agama itu tersebut. Ternyata setelah dikaji secara lebih seksama, seringkali indikator yang dipergunakan untuk menyebut kelompok elit agama yang termasuk katagori kyai atau ulama juga tidak seragam. Seringkali indikatornya terbalik-balik, sehingga cukup membingungkan. Apalagi dengan perkembangan penelitian antropologi serta perkembangan media massa, ciri-ciri yang melekat dalam sosok kyai seperti yang disebutkan oleh Zamakhsary Dhofier, telah banyak berubah, atau tertukar kedudukannya dengan ulama. Hiroko Horikoshi misalnya, menggambarkan sosok kyai sebagai elit agama Islam yang kharismatis di lingkungan masyarakatnya, namun tidak terikat dengan lembaga pesantren. Tokoh agama yang mempunyai ikatan erat dengan lembaga pesantren menurutnya adalah ulama, yang *nota bene* tingkat keilmuannya dan kharismatisnya berada di bawah seorang kyai.<sup>2</sup> Padahal menurut Dhofier, yang terikat erat dengan kepemilikan dan pengelolaan lembaga pesantren adalah kyai.

Pendapat Horikoshi ini pada dasarnya lebih cocok untuk diterapkan kepada kyai-kyai modern yang banyak bermunculan seja masa pemerintahan Orde Baru. Sejak era Orde Baru ada satu fenomena baru yaitu munculnya kyai-kyai terkenal yang tidak mempunyai kaitan dengan pengelolaan lembaga pesantren. Dalam kenyataannya pesantren memang tidak memberikan gelar kyai kepada para lulusannya. Gelar itu muncul dari kalangan masyarakat. Dengan perkembangan sains dan teknologi, kelompok masyarakat pemberi gelar kyai pun menjadi lebih beragam. Para akademisi dan terutama para wartawan merupakan kelompok yang mempunyai andil cukup

besar dalam pemberian gelar kyai tanpa pesantren dengan santri mukimnya. Dari media massa seringkali muncul gelar kyai yang spektakuler, seperti K.H. Zainuddin M.Z. yang mendapat sebutan "Kyai sejuta ummat". Sebutan-sebutan itu tentu saja tidak terlalu salah mengingat untuk menjadi seorang kyai, praktis tidak ada sekolahnya alias tidak ada lembaga resmi atau program pascasarjana yang memberi gelar kyai atau setingkat dengan kyai. Sebutan atau gelar itu diperoleh dari masyarakat sebagai pengakuan atas keahlian dan keilmuannya.

Walaupun demikian, menurut Zamakhsary Dhofier, sosok kyai itu selain berkaitan dengan masalah kharisma, juga berkaitan erat dengan lembaga pesantren. Kyai itu merupakan bagian penting dari satu pesantren. Biasanya, untuk mencapai tingkat kyai, seseorang harus melalui satu proses yang relatif panjang, termasuk di dalamnya adanya semacam rekomendasi dari guru-guru atau kyai yang ada, yang tercermin dalam *sanad-sanad*-nya.<sup>3</sup> Pendapat ini mendapat dukungan dari Mohammad Iskandar, bahwa gelar kyai itu ada kaitannya dengan lembaga pesantren, walaupun gelar itu sendiri berasal dari masyarakat.<sup>3</sup>

Mengingat sebutan-sebutan elit agama seperti kyai, ulama, atau ajengan, pada dasarnya mempunyai ciri dan makna tersendiri sesuai dengan konteksnya, sehingga untuk mendefinisikannya secara tepat tidaklah mudah; maka di sini tidak akan membuat definisi atau teori tersendiri mengenai elit-elit agama Islam itu. Dalam tulisan ini seorang elit agama akan disebut sesuai dengan gelar yang disandangnya waktu itu. Jika semasa hidupnya dan selama perjuangannya disebut kyai, maka dia akan tetap disebut kyai. Demikian pula jika selama hidupnya dan selama perjuangannya disebut "shaik" atau "mualim", maka ia akan tetap disebut sesuai dengan gelar itu. Jalan ini ditempuh bukan dengan maksud menyederhanakan permasalahan. Upaya ini ditempuh untuk mempermudah pengungkapan masalah, sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengungkapkan peranan para elit agama Islam dalam revolusi kemerdekaan Indonesia.

## ***1.2. Tujuan Penelitian***

Seperti telah disinggung di atas, tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan kembali, apa dan bagaimana sebenarnya peranan atau sepak terjang para elit agama Islam, khususnya pada masa perang kemerdekaan tahun 1945-1949. Selama ini pengungkapan peranan mereka relatif masih sedikit. Kadangkala mereka ditampilkan hanyalah sekedar pelengkap dari satu karya yang lebih luas. Padahal kedudukan serta status mereka di kalangan masyarakat umumnya cukup tinggi. Dalam bukunya, Zaini Muchtarom mengatakan bahwa fatwa para elit agama, terutama elit agama bebas yang tidak terikat oleh birokrasi; umumnya lebih didengar oleh masyarakat daripada fatwa para birokrasi pemerintah.<sup>5</sup>

Jadi pada dasarnya tidak terlalu berlebihan jika berasumsi bahwa peranan para elit agama Islam ini sangat besar, baik dalam hal-hal yang positif seperti menggalang persatuan, maupun dalam hal-hal yang negatif seperti membentuk kelompok separatis atau pemberontakan. Seperti diungkapkan oleh Alex Kawilarang, bahwa tanpa adanya dukungan Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi dan saudaranya Kyai Haji Damanhuri, TNI mungkin akan mengalami kesulitan di daerah Priangan setelah Kartosuwirjo memproklamkan berdirinya Darul Islam.<sup>6</sup>

## ***1.3. Ruang Lingkup***

Sejalan dengan tujuan di atas, maka ruang lingkup penelitian dan penulisan ini akan difokuskan kepada masalah keterlibatan langsung para elit agama Islam dalam tindakan nyata yang berkaitan erat dengan proses perang kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian tidak berarti apa yang akan diuraikan di sini semuanya terpaku pada kurun waktu 1945-1949 saja. Sebab, sejarah pada intinya merupakan sebuah proses perubahan struktural. Oleh karena itu, untuk mengerti mengapa perubahan itu terjadi, tentunya harus tahu pula latar belakang yang menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan tersebut. Dengan sendirinya periode sebelum perang kemerdekaan terjadi, sedikit banyak akan diungkap pula di sini.

#### **1.4. Metode Penelitian**

Penelitian dan penulisan ini dilakukan berdasarkan metode penelitian sejarah. Tahap-tahap penelitian dilakukan berdasarkan taha-tahap yang sudah baku, yang terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama, *heuristik* yaitu proses pengumpulan data, baik dari sumber tertulis seperti dokumen-dokumen atau arsip-arsip, maupun dari sumber lisan seperti wawancara. Dan dalam kesempatan penelitian ini, karena terbatasnya waktu, maka wawancara tidak dilakukan, walaupun masih ada saksi yang masih hidup dan sehat walafiat. Setelah data terkumpul, lalu masuk ke tahap kedua, yaitu proses kritik sumber untuk mengetahui validitas dan relevansi data-data tersebut dengan permasalahan yang hendak ditulis. Selesai melakukan kritik, kemudian melangkah ke tahap ketiga, yaitu proses pemberian makna terhadap data-data yang telah teruji validitas serta relevansinya itu. Proses ini sering pula disebut sebagai proses interpretasi atau eksplanasi. Dan tahap terakhir adalah merangkaikan data-data yang telah teruji itu menjadi suatu kisah atau cerita yang dapat dipertanggung jawabkan. Proses ini sering disebut sebagai *historiografi*.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini diberi judul: "Peranan Elit Agama Dalam Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949. Adapun susunannya adalah sebagai berikut :

Bab I, yaitu "pendahuluan" yang isinya antara lain mengenai alasan dan tujuan dari penelitian ini. Setelah itu disusul oleh bab II yang merupakan uraian singkat mengenai arti dan dunia alim ulama atau elit agama Islam. Bagaimana hubungan mereka dengan birokrasi pemerintahan dan hubungannya dengan masyarakat di pedesaan, tempat mereka mengajar. Lalu bab III, berisi mengenai uraian tentang peranan alim ulama dalam pergerakan sosial yang banyak bermunculan hampir sepanjang abad ke-19 sampai permulaan abad ke-20. Di samping itu juga diuraikan tentang peranan mereka dalam pergerakan nasional yang muncul sejak awal abad ke-20. Kemudian bab berikutnya,

yaitu bab IV yang merupakan fokus utama dari uraian ini, yaitu peranan para alim ulama dalam kancah perang kemerdekaan. Sedangkan bab V merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari semua uraian ini, sekaligus berfungsi sebagai kesimpulan dari penelitian ini.

**Catatan :**

- 1 **Zamakhsary Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Awal Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982; Hiroko Horikoshi. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Jakarta: P3M, 1987.**
- 2 **Horikoshi. *I b i d.* "pendahuluan" dan "kesimpulan".**
- 3 **Dhofier, *op.cit.***
- 4 **Mohammad Iskandar, "Para Pembawa Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Priangan, 1900 - 1945" (Tesis S2 pada Program Studi Pascasarjana UI, 1991).**
- 5 **Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta : INIS, 1988.**
- 6 **Ramadhan Kartahadimadja, A.E, *Kawilarang untuk sang merah putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 114.**

## Bab II

### ELIT AGAMA DAN MASYARAKAT PEDESAAN

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa sebutan untuk para elit agama Islam di Indonesia ternyata cukup beragam dan bervariasi. Dari sekian banyak sebutan, “kyai”, dan “ulama” adalah yang paling banyak dipergunakan. Meskipun dalam pendahuluan telah disinggung bahwa dalam tulisan ini akan menyebut para elit agama itu sesuai dengan sebutan yang dipergunakan atau yang disandangnya. Akan tetapi untuk memberi gambaran yang agak lebih jelas mengenai arti elit agama itu sendiri, maka di bawah ini akan diungkapkan mengenai kedudukan para elit agama Islam itu lewat “Kyai dan ulama”. Di pilihnya sebutan ini karena berdasarkan suatu kenyataan bahwa sebutan ini yang paling populer di masyarakat, dan juga sudah ada kajian mengenai keduanya, seperti yang dilakukan Geertz dan Hirokoshi.

#### *2.1. Kyai dan Ulama*

Semenjak Geertz memperkenalkan istilah kyai ke dalam khasanah kepustakaan Barat di tahun 1960, banyak sudah penulis-penulis lainnya yang menulis tentang kyai dan ulama di Indonesia, baik berupa studi khusus maupun sebagai bagian dari studi yang lebih luas. Para penulis itu antara lain, Binder, Deliar Noer, Horoko Horikoshi, Zamakhsary Dhofier, Steenbrink, de Jonge, dan Bouwsma.<sup>1</sup>

Semua penulis ini pada umumnya berpendapat bahwa kyai dan ulama merupakan satu kelompok masyarakat yang ahli dalam hukum agama serta mempunyai kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran masyarakat sekitarnya. Di samping itu, karena berbagai kelebihan yang dimilikinya, mereka juga berfungsi sangat dominan dan efektif dalam mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat. Atas dasar kemampuannya itu mereka mampu menempatkan dirinya sebagai pemimpin lokal yang kharismatis, yang diturut serta dipatuhi oleh masyarakat lingkungannya. Akan tetapi, seperti telah disinggung oleh Geertz, penggunaan istilah kyai dan ulama ini seringkali membingungkan.<sup>2</sup> Beberapa penulis lainnya juga mengalami hal sama seperti Geertz, Deliar Noer misalnya. Di satu sisi Deliar Noer menggambarkan sosok kyai (di pulau Jawa) sebagai orang yang sangat ahli dalam agama Islam, dan di sisi lainnya ia pun menyebutkan bahwa kyai itu ahli *ilmu klenik* alias ilmu pedukunan (dalam kacamata orang Islam yang alim, *ilmu klenik* dianggap ilmu yang negatif). Apalagi di pulau Jawa, sebutan kyai itu bukan monopoli orang-orang yang mumpuni dalam ilmu agama Islam. Senjata pusaka, dukun santet, atau harimau yang dianggap keramat pun disebut kyai. Akibatnya sulit dibedakan mana yang benar-benar kyai ahli agama Islam dan mana kyai yang benar-benar dukun.<sup>3</sup> Sebab, seorang kyai yang *nota bene* mengajar agama, kadangkala juga berpraktek mengobati orang lain karena dia pun telah mempelajari ilmu ketabiban.

Kebingunan terhadap satu sebutan memang bisa terjadi, terutama jika definisi yang dipergunakan berdasarkan acuan-acuan teori yang ada ternyata tidak cocok dengan yang ada di lapangan. Hal seperti ini sebenarnya juga lumrah dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan, karena definisi yang dibuat pun pada dasarnya berasal dari hasil penelitian pula. Artinya definisi itu cocok untuk di daerah tertentu, namun belum tentu sesuai jika dipakai di tempat lain walaupun sebutannya sama. Sebutan kyai yang telah disebutkan di atas adalah salah satu contoh yang baik. Di daerah Priangan dapat dikatakan bahwa sebutan kyai hanya diberikan kepada orang yang tinggi ilmu pengetahuan agamanya. Sedangkan di Jawa Tengah atau Jawa Timur, sebutan kyai ini dipergunakan sangat

bervariasi. Orang tua yang dianggap sakti, dukun, benda-benda yang dikeramatkan seperti keris, tombak, bahkan harimau pun disebut kyai.<sup>4</sup> Bagi orang di kedua daerah ini tentunya tidak terlalu sulit untuk membedakan mana kyai yang pintar mengajarkan agama Islam, dan mana kyai yang keahliannya menyantet atau membuat ilmu *pelet*, sesuai dengan konteks pembicaraannya. Lain halnya bagi orang-rang dari luar Jawa, termasuk yang datang dari luar Indonesia, tentu akan bingung jika tidak terlebih dahulu diberikan batasan yang jelas, apa yang dimaksud dengan kyai dalam pembicaraan itu.

Di negara-negara Islam di Timur Tengah yang juga digunakan Geertz sebagai perbandingan, sebutan ulama jauh lebih jelas. Sebutan ulama hanya dipergunakan untuk menyebut seseorang atau kelompok orang yang mempunyai keahlian tinggi dalam hukum agama dan keagamaan. Istilah ulama tidak dipergunakan untuk menyebut yang lainnya.

Di daerah Jawa Barat seperti di daerah Banten, Bogor, dan Priangan sebenarnya terdapat sebutan lain untuk para elit agama Islam ini, yaitu: *ajengan*. Sebutan ini di beberapa daerah Jawa barat justru dinilai lebih tinggi daripada kyai. Dan umumnya yang mendapat gelar ajengan adalah para kyai pemimpin pesantren yang cukup kharismatis di wilayahnya. Bahkan bagi seorang ajengan yang terkenal, biasanya sebutan itu dirangkaikan dengan nama daerahnya. Misalnya Haji Ahmad Sanusi, seorang ajengan yang semasa hidupnya sangat menonjol dan kharismatis di daerah Priangan dan Bogor, terkenal dengan nama "Ajengan Gunung Puyuh" (Gunung Puyuh adalah kampung tempat di mana pesantrennya berada).<sup>5</sup>

Seperti halnya di Jawa Barat, di daerah Aceh terdapat pula sebutan yang khas untuk para elit agama Islam/ulama, yang sekaligus juga merupakan gelar bagi para ulama. Gelar untuk para ulama di daerah ini ialah : *Teungku*. Kadangkala gelar ini ditambah di belakangnya sesuai dengan jabatan atau pekerjaan yang dipangku oleh ulama tersebut, seperti *teungku chik* (semacam guru besar) dan *teungku meunasah*, yaitu ulama yang membantu kepala kampung atau yang memimpin segala kegiatan di *meunasah* (tempat beribadat dan bermufakat,

semacam surau yang sering pula dipergunakan sebagai tempat pendidikan agama tingkat dasar).<sup>6</sup> Sebagian dari para teungku ini juga menjadi pemimpin sekaligus guru di *dayah-dayah* (semacam pesantren yang ada di pulau Jawa).

Di Indonesia, seorang kyai atau teungku kadangkala disebut ulama dan demikian pula sebaliknya. Meskipun demikian, jika lebih dicermati, terlihat bahwa sebagian besar yang disebut ulama oleh masyarakat adalah orang yang berpredikat kyai atau teungku. Selain adanya persamaan antara kyai atau tengku dan ulama, tentu ada pula perbedaannya yang mendorong tidak semua kyai disebut ulama oleh masyarakat. Dalam studi yang dilakukan oleh Mohammad Iskandar di daerah Priangan dan Bogor, ditemukan suatu bukti yang menunjukkan mengapa seseorang disebut kyai dan mengapa seorang kyai disebut pula ulama oleh masyarakat setempat. Meskipun ciri-ciri ini mungkin hanya terdapat di Jawa Barat, namun indikatornya dapat dijadikan titik tolak untuk menilai kasus yang sama di daerah lain. Menurut studi itu disebutkan bahwa seseorang disebut kyai berdasarkan beberapa faktor, yaitu : dia seorang guru agama yang dianggap tinggi ilmu pengetahuannya, telah naik haji dan mempunyai atau memimpin sebuah pesantren.<sup>7</sup>

Ciri-ciri ini tidak jauh berbeda dengan kriteria yang dikemukakan oleh Zamakhsary Dhofier. Dalam perjalanan waktu, terutama sejak masa Orde Baru, ciri-ciri yang disebutkan di atas mulai kabur. Banyak ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan agama Islam yang tinggi dan mempunyai pengaruh yang cukup besar pula di kalangan masyarakat disebut kyai walaupun dia tidak mempunyai pesantren. Sebagai contoh adalah Kyai Haji A.R. Fakhrudin yang pernah menjabat ketua umum Muhammadiyah sejak tahun 1969. Kecenderungan semacam itu terutama banyak terjadi di daerah perkotaan di mana media massa ikut berperan mengangkat nama seseorang menjadi tokoh atau kyai. Mungkin karena masyarakat yang memberi gelar kyai dan ulama itu, maka tolok ukurnya pun menjadi tidak begitu jelas atau baku. Karena keterbukaannya itu pula maka tidak aneh jika pada era globalisasi muncul kyai-kyai atau ulama yang aneh-aneh, baik dalam mengeluarkan

fatwa-fatwanya, penampolannya, maupun kehidupan keluarganya. Tidak jarang pula ada fatwa atau tindakan serta praktek-praktek keagamaan seorang kyai justru meresahkan masyarakat. Melalui media televisi masyarakat terkejut mendengar berita tentang seorang kyai di Madura yang mempunyai sepuluh orang isteri, yang kemudian juga dimuat dalam majalah *Gatra* yang terbit pada bulan Maret 1996.<sup>8</sup>

Telepas dari adanya keanehan-keanehan itu, dalam penelitiannya, Mohammad Iskandar menemukan satu bukti mengapa seorang kyai disebut pula sebagai ulama oleh masyarakat di lingkungannya. Seorang kyai disebut pula sebagai ulama, karena mempunyai keunggulan dibandingkan dengan kyai atau ahli agama lainnya. Hal ini antara lain dapat dilihat dari kemampuan dan kecepatannya menanggapi permasalahan keagamaan yang muncul di kalangan masyarakat. Ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan cepat beserta penjelasan yang baik disertai dalil-dalilnya (baik berdasarkan Quran, Sunnah Rasulullah, maupun pendapat para sahabat atau para ulama terdahulu). Ia dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam Quran dan Sunnah ke dalam realita sosial-politik yang berkembang di kalangan masyarakat. umumnya kyai seperti ini, rumahnya tidak pernah sepi oleh kunjungan para tamu, baik yang datang dengan tujuan untuk bertanya mengenai permasalahan agama, atau pun yang datang dengan tujuan hanya sekedar untuk menunjukkan sikap hormat dan terimakasihnya kepada kyai tersebut. Biasanya orang-orang yang disebutkan terakhir ini datang dengan membawa hasil bumi atau barang-barang lainnya untuk keluarga pak kyai.<sup>9</sup>

Pada masa kolonial Belanda, terutama sebelum tahun 1920-an, tinggi rendahnya pengetahuan seorang alim-ulama sangat sulit diukur, terlepas apakah dia sebut kyai, tengku, syeikh atau mualim. Waktu itu belum ada tolok ukur yang baku untuk keperluan itu seperti halnya sekarang. Walaupun ada lembaga pesantren tempat para santri belajar agama, tapi lembaga semacam ini pada waktu itu tidak mempunyai kurikulum dan sistem tingkat yang jelas. Lamanya belajar atau lamanya

mukim di pesantren tidak dapat dijadikan ukuran untuk mengukur tingkat pengetahuan para santri. Demikian pula tingkat pengetahuan para lulusannya. Pesantren tidak menyelenggarakan ujian akhir ataupun memberikan gelar dan ijazah bagi para santrinya. Yang memberikan penilaian sekaligus gelar kepada para lulusan pesantren itu akhirnya adalah masyarakat.<sup>10</sup> Seperti dikatakan oleh Zamakhsary Dhofier, bagi ulama yang mempunyai pesantren, pengakuan terhadap dirinya antara lain tercermin dari jumlah santri yang ada di bawah asuhannya, terutama jumlah santri mukimnya, yang datang dari luar desanya, bahkan kalau ada berasal dari luar provinsinya. Di samping itu juga dapat diukur dari jumlah tamu yang datang bertanya kepadanya.

Barangkali menarik untuk disimak laporan dari seorang Polisi Rahasia masa kolonial (PID). Ia melaporkan tentang kehidupan keseharian Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi di pesantrennya di kampung Gunungpuyuh, Sukabumi. Menurut laporannya, Ajengan Ahmad Sanusi yang lebih populer dengan sebutan Ajengan Gunungpuyuh merupakan kyai paling populer dan berpengaruh di Priangan Barat dan Bogor. Jumlah santri dan para simpatisannya ribuan. Selain itu rumahnya tidak pernah sepi oleh tamu yang datang, baik tamu yang datang dari sekitar pesantren itu, maupun yang datang dari luar kabupaten Sukabumi. Mereka datang untuk bertanya berbagai masalah kehidupan, terutama yang berkaitan dengan agama atau keagamaan. Di samping itu ada juga yang datang sekedar bersilaturahmi dan mengucapkan terimakasih atas bimbingan ajengan itu.<sup>11</sup>

Gobee, *adviseur voor inlandse zaken* waktu itu memuji Ajengan Ahmad Sanusi sebagai kyai yang berintelegensia tinggi, jauh di atas para kyai lainnya, sehingga membuat iri para ahli tafsir sejawatnya.<sup>12</sup> Sedangkan Pijper yang menggantikan Gobee menggambarkan ulama yang baik seperti Ajengan Ahmad Sanusi ini, tidak akan berkurang pengaruhnya di kalangan masyarakat, hanya karena dirinya dikurung atau disingkirkan oleh pemerintah. Dia bagaikan sumber cahaya yang akan terus memancarkan sinarnya dengan baik di manapun dia berada.<sup>13</sup>

Jika dikaji kembali pada dasarnya penguasa Kolonialis Belanda, sejak masa Kompeni sudah merasa curiga dan tidak suka kepada para alim ulama Islam. Mereka menganggap kelompok ini sebagai tokoh-tokoh yang membahayakan dan selalu merongrong kewibawaan pemerintahannya. Mereka sering menuduh para ulama, baik yang bergelar haji, kyai, ajengan atau teungku, sebagai pihak yang suka menghasut masyarakat agar memberontak melawan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah kolonial Belanda selalu berusaha memojokkan para alim ulama dan berusaha memecah kelompok ini dari masyarakatnya. Salah satu cara yang ditempuh antara lain dengan mendekati para bangsawan atau pemegang adat, seperti para *priyayi*, *sentana dalem*, *menak* atau *uleebalang*, yang kemudian dijadikan sebagai bagian dari roda pemerintahan kolonialnya (*binnenland Bestuur*).

Di daerah Aceh, kedudukan para ulama yang sering disebut *teungku* dianggap sederajat dengan para Teuku (gelar untuk kaum bangsawan atau *uleebalang*). Seperti halnya di Priangan, di daerah ini pun, seorang teungku yang terkenal dan kharismatis, sering juga dikenal dengan nama daerah atau desa tempat ia mengajar. Misalnya Teungku Haji Ahmad Hasballah dari desa Indrapuri, dikenal dengan sebutan Teungku Indrapuri.<sup>14</sup> Kemudian Teungku Muhammad Daud dari kampung Beureueh disapa oleh masyarakat dengan sebutan Teungku Beureueh.<sup>15</sup> Kemudian Teungku Syekh Muhammad Saman disapa oleh masyarakat daerah itu dengan sebutan Teungku Cik Di Tiro atau Teungku Tiro yang berarti Teungku dari Tiro. Begitu besarnya pengaruh mereka di kalangan masyarakat, maka kepada merekalah masyarakat Aceh sering datang bertanya, khususnya dalam permasalahan yang dianggap ada kaitannya dengan agama atau keagamaan.

Kadangkala perintah seorang ulama di Aceh juga mengikat para pemimpin desa. misalnya Gampong Sim dan Krungkale (Kreueng Kalee) yang berada di bawah pengaruh Teungku Haji Muhammad Hasan Krungkale yang sering disapa dengan sebutan Teungku Krungkale (Teungku dari Krungkale). Dalam pelaksanaan pemerintahannya kedua *keuchik* dari masing-masing gampong itu mengikuti apa yang nasehat dari para ulama dari Krungkale, seperti Teungku Ismail.<sup>16</sup>

Barangkali contoh yang paling baik mengenai peranan ulama yang ada kaitannya dengan dunia internasional berasal dari daerah Aceh., yaitu dalam “Perang Aceh” (*De Atjeh Oorlog*) di akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Sewaktu perang ini berlangsung, banyak pertanyaan diajukan oleh masyarakat Aceh kepada para ulamanya atau para Tenggunya. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mereka terutama berkaitan dengan kenyataan yang terlihat atau terdengar oleh mereka, yaitu seputar orang-orang Aceh yang *nota bene* beragama Islam, namun menyerah kepada pihak Belanda (kaum kafir atau *kafee*) dan mau menandatangani surat perjanjian perdamaian dengan pihak Belanda. Tindakan apa yang harus diambil terhadap orang-orang semacam itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini dapat dikatakan suatu pertanyaan berat dan cukup gawat. Di dalamnya pertanyaan itu tersangkut puluhan, bahkan ribuan orang yang bisa terancam keselamatan jiwa serta harta bendanya, jika para Tengku salah menjawabnya. Memang ada ulama yang dapat langsung menjawab permasalahan yang diajukan kepadanya seperti yang dilakukan oleh Teungku Tiro (Teungku Cik Ditiro). Dia mengatakan bahwa orang-orang yang menyerah dan berdamai dengan orang-orang kafir, dan tidak berbuat apa-apa ketika tentara kafir merampok harta bendanya, bahkan juga membunuhnya, sama saja artinya bahwa mereka adalah orang kafir itu sendiri.<sup>17</sup>

Di samping itu ada pula Teungku yang menjawab pertanyaan itu secara hati-hati, antara lain dengan melakukan tukar pikiran terlebih dahulu dengan sesama ulama lainnya, atau dengan para mufti Syafi’i di kota Mekkah. Kedudukan para Teungku selama Perang Aceh memang semakin meningkat di kalangan rakyat Aceh.<sup>18</sup> Mereka mengobarkan semangat perang melawan Belanda dengan motivasi keagamaan dan hikayat-hikayat sehingga menjadi sumber kekuatan rakyat Aceh dan perang dapat bertahan lama.<sup>19</sup>

Para ulama atau Teungku mengubah hikayat-hikayat Perang Sabil untuk mengumpulkan rakyat sebagai kekuatan perang. Hampir semua dayah atau pesantren di daerah Aceh

mengalihkan aktivitasnya ke arah perjuangan fisik melawan Belanda. Setelah perang berkecamuk cukup lama, banyak rakyat Aceh yang meninggal termasuk para alim ulamanya. Menurut sebuah “surakata” menyebutkan bahwa setelah Tuanku Mahmud Bangsa Kuucek mengamati keadaan di Pulau Pinang dan meninjau Pulau Jawa, persepinya mengenai perang di Aceh berubah. Ia melihat bahwa daerah lain di Nusantara telah ditundukkan oleh Belanda. Dan di daerah-daerah tersebut telah didirikan sekolah-sekolah yang menghasilkan orang-orang pandai. Selain itu juga banyak orang-orang Pribumi yang dilatih dan dijadikan serdadu untuk menaklukan Aceh.

Perubahan itu juga bertolak dari kenyataan yang terjadi di Aceh sendiri yang menurutnya semakin sulit bagi orang-orang Aceh untuk memenangkan perang. Sebab, telah terjadi perpecahan antara para pemimpin birokrasi kerajaan (para *uleebalang*) dan alim ulama akibat upaya politik *divide et impera* Belanda. Sarana ekonomi dan budaya pun banyak yang hancur. Kebun-kebun, sawah-sawah banyak terbengkalai; dayah-dayah sebagai pusat pendidikan Islam banyak yang hancur karena alim ulamanya telah syahid sehingga banyak putra-putri Aceh yang tidak mendapat pendidikan lagi. Hal ini dikhawatirkan akan menjadikan mereka menjadi lemah iman dan menjadi kafir.

Atas dasar itulah maka Tuanku Mahmud Bangta Keucek berpendapat sudah waktunya dipertimbangkan suatu siasat baru dalam melanjutkan jihad terhadap Belanda. Ia menganjurkan agar sebagian mengadakan perdamaian dengan pihak Belanda, sementara sebagian lagi tetap melanjutkan peperangan.<sup>20</sup> Menurut sumber ini, pandangan Tuanku Mahmud Bangta Keucek ini disampaikan lewat Tuanku Maharaja Abdul Hamid (Maharaja Cek) di Lhokseumawe, kepada Sultan, Tuanku Raja Keumala, Teuku Panglima Polem Muhammad Daud dan para pemimpin/ulama lainnya. Tentu saja banyak yang tidak setuju, termasuk Panglima Polem. Namun setelah melalui diskusi dan pembicaraan yang cukup alot, maka banyak para pemimpin Aceh menyetujui usul tersebut, di samping yang tetap bersikukuh untuk terus berperang melawan Belanda.<sup>21</sup>

Peristiwa menyerahnya Kesultanan Aceh kepada Belanda ini sekaligus menjadi awal dari konflik antara pihak Teungku (yang seringkali dianggap mewakili kepentingan agama) dan pihak Teuku (yang seringkali dianggap mewakili kepentingan adat) di masa-masa berikutnya. Pihak Teungku memandang pihak Teuku bukan saja sebagai “kaki tangan penjajah” melainkan juga sebagai pihak yang mempersulit penerapan kehidupan keagamaan dalam berbagai segi bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup>

Meskipun tidak semua para *uleebalang* setuju dengan kemauan Belanda, namun hubungan antara kelompok *uleebalang* atau Teuku dengan kelompok alim-ulama atau Teungku menjadi tidak sebaik pada masa kesultanan Aceh. Apalagi ketika terbetik berita sekitar tahun 1930-an bahwa Belanda akan membangun kembali Kesultanan Aceh dengan para *uleebalang* sebagai pendukungnya, maka kecurigaan kaum ulama terhadap *uleebalang* semakin kuat.

## ***2.2. Ulama dan Penduduk Desa.***

Membicarakan masalah alim ulama terasa kurang lengkap jika tidak membicarakan lembaga pendidikan tempat mereka belajar, sekaligus juga tempat mereka mengembangkan dirinya. Sudah barang tentu banyak ragam dan variasi dari lembaga pendidikan itu sesuai dengan daerah di mana pesantren itu berada. Dari sekian banyak nama dan bentuk lembaga pendidikan agama itu, yang paling terkenal adalah pesantren. Pada masa Kolonial sampai dengan masa awal Republik Indonesia, umumnya letak pesantren berada di luar kota, bahkan banyak yang berada di luar kampung, seperti di daerah pebukitan atau lembah. Oleh karena itu, umumnya para ulama ini, di samping menjadi kepala/guru lembaga pendidikan agama, juga dianggap sebagai sesepuh atau pemimpin penduduk non-formal. Dalam istilah sekarang sering disebut sebagai “tokoh masyarakat”.

Ada beberapa faktor yang membuat para alim-ulama pemimpin pesantren itu demikian berpengaruh dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Salah satu faktor itu terletak

pada lembaga pesantren (atau dayah) itu sendiri. Seperti telah disinggung di atas, di pesantren bermukim puluhan, bahkan sampai ribuan santri, baik yang berasal dari kampung sekitar pesantren itu, maupun yang datang dari luar daerah yang jaraknya ratusan atau ribuan kilometer. Para santri ini dalam prakteknya bukan saja sekedar murid para kyai atau teungku dari pesantren itu, melainkan juga berpraktek sebagai juru kampanye yang “mengharumkan” nama kyai atau teungku dan pesantren atau dayah di mana dia menuntut ilmu. Sedangkan bagi penduduk desa yang agak malu-malu, para santri juga sering berperan sebagai mediator yang menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat kepada para kyai, teungku, atau ulama pemimpin pesantren tersebut.

Di samping mengajar para santrinya, umumnya kyai atau pihak pesantren juga menyelenggarakan pengajian “temporal” dengan tema-tema tertentu, yang ditujukan terutama bagi masyarakat umum. Pengajian seperti ini ada yang diselenggarakan di lingkungan pesantren itu sendiri dan ada juga yang diselenggarakan di luar pesantren. Jika dikaji lebih dalam, pengajian atau tablig semacam ini mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai media untuk menyampaikan seruan dan penerangan agama. Kedua, sebagai sarana pemeliharaan hubungan baik antara kyai dan masyarakat di lingkungannya, khususnya lingkungan pesantrennya. Apalagi tablig atau pengajian yang diselenggarakan di luar pesantren, seringkali dihadiri oleh pejabat setempat, mulai dari pamong desa sampai dengan camat atau pangreh praja.

Salah satu hal yang perlu dikemukakan di sini ialah, sejak akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan beberapa peraturan mengenai pengajaran keagamaan di tanah Hindia Belanda, yang disebut sebagai “ordonansi guru”. Sejak terbitnya, “ordonansi guru” sudah memperlihatkan beberapa kelemahannya sehingga beberapa kali mengalami perubahan. Akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi belum mampu menutupi kelemahan itu. Akibatnya oleh kaum Mulimin, ordonansi ini dinilai bukannya rambu-rambu yang mengarahkan ke jalan yang baik melainkan alat

pemerintah untuk mengawasi dan membatasi ruang gerak proses pembelajaran agama Islam. Sebagai contoh, seorang guru atau kyai diwajibkan untuk memperoleh surat izin mengajar (*besluit* pengajar). Selain itu juga harus menjelaskan mata pelajaran yang hendak diajarkannya itu.<sup>23</sup> Sejalan dengan itu, sejak awal abad ke-20, pengajian-pengajian atau tablig-tablig sering diawasi oleh pihak pemerintah dengan cara menempatkan para resersnya atau polisi rahasianya (PID) di tempat-tempat pengajian tersebut.<sup>24</sup>

Kecurigaan pemerintah kolonial terhadap lembaga-lembaga pesantren disebabkan karena adanya semacam sinyalemen yang sampai kepada pemerintah, yang menyatakan bahwa di pesantren-pesantren sering diajarkan ajaran-ajaran yang membangkitkan perasaan anti penguasa Belanda. Achmad Djajdiningrat, bupati Serang Banten mengatakan bahwa di pesantren tempatnya ia berguru ngaji sewaktu kecil, sering dibangkitkan perasaan anti Belanda oleh kyainya, sehingga para santri pada umumnya membenci orang-orang Belanda dan orang-orang yang bekerja untuk kepentingan Belanda.<sup>25</sup>

Apa yang dikatakan oleh Achmad Djajdiningrat itu sebenarnya agak mengherankan. Sebab menurut keterangannya sendiri, kyai atau guru pesantrennya itu adalah kenalan baik ayahnya yang *nota bene* adalah abdi pemerintah Belanda pula, yaitu bupati. Di samping itu, kyai tersebut juga bekerja sebagai *Hoofd Panghulu* di kantor urusan agama Kabupaten Serang. Dan seperti telah banyak dingkapkan dalam beberapa kajian sejarah Indonesia, *Hoofd Panghulu* merupakan jabatan keagamaan yang mendampingi jabatan sekuler dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Artinya *hoofd Panghulu* dapat dikategorikan pula sebagai abdi Belanda.

Walaupun ada semacam pengawasan seperti di atas, para kyai atau alim-ulama, tetap dapat menyampaikan ajaran Islam kepada para santrinya, termasuk ajaran-ajaran yang dinilai oleh pihak pemerintah sebagai ajaran "provokator", yang membuat para santri atau pendengarnya menjadi kelompok yang suka membangkang terhadap pemerintah. Melalui para jamaah atau santri yang mengikuti tablig-tablig itu, baik secara rutin maupun

temporal, pengaruh guru atau kyai itu menyebar di kalangan masyarakat. Dari sudut ini, kedudukan alim ulama masih lebih bebas jika dibandingkan dengan para priyayi maupun uleebalang. Karena kebebasannya itu maka kedudukan para alim-ulama di kalangan masyarakat menjadi lebih kuat dan lebih disegani. Penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya menjadi lebih ikhlas jika dibandingkan dengan yang diberikan kepada para bangsawan atau pun kaum birokrat (seperti pangreh praja).

Meskipun tablig-tablig itu merupakan acara “temporal”, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali berubah menjadi acara rutin yang diadakan setiap minggu sekali. Apalagi jika tablig itu diadakan di pesantren itu sendiri. Dalam pemilihan hari untuk penyelenggaraan tablig itu ada yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu pada masa Rasulullah, ada pula yang memilih hari begitu saja dalam arti asal praktis. Misalnya ada yang menyelenggarakan pengajian atau tablig itu tiap hari Senin, karena hari itu merupakan hari lahirnya Nabi Muhammad s.a.w.<sup>26</sup>

Sebagai satu sifat duniawi, selalu tidak ada yang sempurna. Demikian pula halnya dengan potret dunia pesantren tidak selalu baik, ada juga sisi kelabunya. Dalam buku kenang-kenangannya, Achmad Djajadiningrat menceritakan pengalamannya selama ia berguru di sebuah pesantren di Kabupaten Serang, Banten. Menurutnya, kehidupan di pesantren demikian keras dan sederhana. Di antara sesama santri tidak diadakan pembedaan berdasarkan status dan jabatan orang tuanya, sehingga hubungan antar sesama santri seperti dengan saudaranya, tanpa tingkatan dan sederajat.<sup>27</sup> Akan tetapi, selain yang telah disebutkannya itu, selebihnya kehidupan di pesantren cukup kotor, buram dan cemar.

Mungkin rasa persaudaraan yang disebutkannya itulah yang membuat Achmad Djajadiningrat enggan meninggalkan dunia pesantren. Kontradiksi inilah yang kemudian disindir Zamakhsary Dhofier. Menurutnya, Achmad Djajadiningrat sebenarnya belum mengenal dan meresapi arti dan makna dari tradisi pesantren. Mungkin karena dia tinggal di pesantren

dalam usia yang relatif muda dan dalam waktu yang relatif singkat pula. Oleh karena itu yang dituliskan dalam kenang-kenangannya itu hanyalah mengenai susahnyanya hidup di pesantren.

Dalam kehidupan pesantren, memang benar terdapat unsur ketaatan terhadap kyai dan guru bantunya secara mutlak, yang ditujukan dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, maupun pribadi.<sup>28</sup> Di beberapa pesantren, seorang santri harus selalu berusaha menyenangkan gurunya; ia tidak boleh berjalan di depan gurunya, tidak boleh duduk di kursi yang biasa diduduki gurunya, tidak boleh membuka percakapan dengan gurunya sebelum gurunya itu mengajaknya bercakap-cakap. Namun dalam percakapan itu, sang santri tidak boleh terlalu banyak berbicara atau mendominasi percakapan, serta tidak boleh menanyakan masalah yang diduga tidak berkenan di hati sang guru.<sup>29</sup>

Deliar Noer menduga kedudukan kyai yang demikian kuat dan dihormati adalah kelanjutan dari kedudukan guru pada masa Indonesia Hindu.<sup>30</sup> Akan tetapi menurut Dhofie, faktor utama yang menyebabkan kyai demikian dihormati adalah karena kyai adalah guru. Dan melupakan ikatan dengan guru dianggap merupakan aib besar. Di samping itu akan menghilangkan *barakah* dan *karamah* guru.

Selanjutnya, dengan melupakan ikatan dengan guru, maka pengetahuan si santri tidak akan banyak bermanfaat. Umpamanya, apabila kelak ia memimpin sebuah lembaga pesantren, maka ia tidak akan dapat menarik santri dalam jumlah banyak. Ia akan kalah sukses dibandingkan dengan teman-teman angkatannya.<sup>31</sup> Anggapan seperti ini seringkali dipergunakan secara salah, baik oleh pihak kyai maupun santrinya sehingga muncul sikap hormat dan taklid secara membuta.

Sikap taklid ini pada dekade 1920-an dan 1930-an sempat mendapat kritikan tajam dari para reformis Islam (*mujaddid*). Demikian pula lembaga pesantrennya tidak luput dari kritikan pedas. Pesantren yang tidak mempunyai kurikulum yang jelas

itu dituduhnya bukan sebagai lembaga yang mencerdaskan kaum Islam, melainkan sebaliknya sebagai lembaga yang memperbodoh umat Islam.

Satu gambaran lain mengenai pesantren diceritakan oleh Rakhmatullah Ading Affandi (RAF), yang pernah menjadi santri di salah satu pesantren di Priangan Timur.<sup>32</sup> Ia menjadi santri sampai pada masa penjajahan Jepang. Setelah keluar dari pesantren, ia sempat masuk menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Dan sekarang dia lebih dikenal sebagai budayawan Sunda. Dalam bukunya itu ia menggambarkan suasana kehidupan pesantren yang berlainan dengan yang digambarkan oleh Achmad Djajadiningrat. Hubungan antara kyai dan santri digambarkan tidak sekaku atau sekeras pesantren "Banten". Menurutnya, seorang kyai pun berasal dari santri sehingga banyak memahami perilaku para santrinya. Ia menyadari bahwa para santrinya itu kadang-kadang melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, seperti mencuri ikan dari kolamnya, atau memetik buah-buahan tanpa izin dari kebunnya. Meskipun kyai itu mengetahui para pelaku pencurian itu, namun menurut RAF, kyai selalu bertindak bijaksana, karena tindakan-tindakan seperti itu lebih banyak dilakukan atas dasar iseng dan kebutuhan saja, bukan untuk "memperkaya" diri. Dan kyai biasanya cepat tanggap bila dalam acara bersilaturahmi dengan para santrinya, ada seorang santri yang meminta maaf habis-habisan kepadanya. Di samping itu kyai pun digambarkan sebagai sosok yang berjiwa sosial. Ia akan membebaskan hutang-hutang para santrinya, jika para santrinya itu sedang berada dalam kesulitan. Bahkan tanpa segan-segan kyai tersebut tampil atas nama santrinya, meminta kepada segala pihak untuk membebaskan utang santrinya yang sedang dalam kesulitan itu secara ikhlas.<sup>33</sup>

Sebaliknya para santri pun akan memaklumi apabila sang kyai atau mualim yang menjadi badalnya, melakukan tindakan yang agak menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma agama yang sering diucapkannya. Misalnya dalam satu pengajian, seorang mualim menganjurkan kepada para santri agar tidak makan berlebihan seperti yang

dicontohkan Rasulullah. Akan tetapi dalam prakteknya ternyata sang mualim itu sendiri makan secara berlebihan. Tak lama setelah memberikan pelajarannya ia jatuh sakit. Setelah diperiksa oleh *mantri* (para medis) yang sengaja dipanggil oleh para santri, ternyata sang mualim sakit perut karena *kamerekaan* alias kebanyakan makan.

Banyak keuntungan yang diperoleh dari pergaulan sehari-hari dalam pesantren. Mengingat asal para santri dari berbagai kampung dan desa, malahan ada pula yang dari lain provinsi, maka mereka berusaha untuk saling tukar pengalaman dan informasi, yang sekaligus dapat memperluas cakrawala pemikirannya. Hubungan antar sesama santri umumnya terjadi dalam tingkatan yang sama. Meskipun demikian terdapat juga semacam tingkatan berdasarkan pembagian tugas dalam rangka menjaga keutuhan kehidupan pesantren. Di sana ada semacam lurah, yaitu santri yang ditunjuk oleh para santri dan dijadikan kepercayaan sang kyai dalam mengawasi dinamika kehidupan pesantren. Pelanggaran-pelanggaran kecil terhadap peraturan atau tata tertib pesantren ditangani oleh lurah ini. Kalau masalahnya tak dapat diselesaikan oleh lurah, barulah masalah tersebut dibawa kepada sang kyai.

Untuk membiayai kehidupan pesantren, seperti telah disinggung di atas, banyak para kyai yang menanganinya secara langsung dengan cara melakukan berbagai kegiatan usaha atau niaga. Selain bekerja sebagai guru agama, banyak yang bekerja pada lembaga tertentu baik pemerintah maupun swasta, misalnya bekerja sebagai penghulu, *hoofdpanghulu*, atau menjadi *adviseur* dari satu perusahaan wiraswasta. Akan tetapi karena umumnya letak pesantren ada di daerah pedesaan yang jauh dari kota, maka sebagian besar yang menjadi sumber biaya kehidupan (ekonomi) pesantren adalah dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Pada masa kolonial keluarga kyai seperti di daerah Priangan dan Banten merupakan keluarga yang cukup kaya.<sup>34</sup>

Asal-usul kekayaan keluarga para kyai atau elit agama Islam ini cukup bervariasi. Ada yang merupakan hasil bisnis keluarga kyai yang bersangkutan, warisan, atau wakaf dari masyarakat.

Dalam kasus-kasus tertentu ada pula yang memperoleh kekayaan itu dari seseorang atau kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bimbingan atau pengajaran kyai tersebut, sehingga sang kyai dibuatkan pesantren lengkap dengan segala kebutuhannya. Harus diakui pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu, kadangkala ada pula seorang yang berpredikat kyai, menggunakan pengaruhnya untuk kepentingan pribadinya.

Dalam rangka mengelola tanah pertaniannya, tidak jarang kyai yang melibatkan para santrinya. Sepintas lalu tindakan ini kelihatannya seperti memanfaatkan kepatuhan para santri untuk keuntungan pribadinya sang kyai sendiri. Akan tetapi jika diamati lebih cermat dan lebih mendalam, ternyata tindakan itu mempunyai tujuan yang baik bagi para santri. Banyak para santri yang diajak serta mengelola sawah atau kolam ikan. lama kelamaan santri tersebut menjadi seorang yang trampil dalam bertani atau berternak ikan. Kemudian sewaktu dia selesai mengikuti pendidikan di pesantren itu dan terjun ke dalam kehidupan masyarakat umum, maka selain memahami agama, dia juga mempunyai ketrampilan lain yang dapat digunakan dalam bermasyarakat dan bernegara.<sup>35</sup>

Pengelolaan tanah pertanian ataupun tanah perikanan darat, bukan saja berguna bagi para santri dalam mempelajari ketrampilan tambahan, tetapi juga membuka pintu pesantren bagi masyarakat di sekitar pesantren itu. Banyak penduduk yang dengan sukarela membantu keluarga pemilik pesantren, baik demi kepuasan batinnya maupun dengan tujuan-tujuan tertentu. Namun yang pasti dengan cara seperti ini, interaksi berlangsung antara penduduk non-santri dengan para santri serta kyainya. Hal-hal seperti ini juga secara tidak langsung semakin mempererat hubungan para elit agama ini dengan masyarakat di lingkungannya, sehingga kedudukan mereka semakin mengakar.

Selain melalui tablig atau pengajian umum dan pengolahan tanah pertanian seperti di atas, banyak pula kyai yang ikut berpartisipasi dalam memelihara ketenangan serta kelancaran kehidupan desa. Mereka ikut terlibat dalam membicarakan masalah-masalah yang berguna untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk desa. Seringkali para kyai mengajak santrinya bersama-sama warga desa untuk bekerja bakti membuat jalan atau memperbaiki jembatan yang sudah lapuk. Ada pula kyai yang menulis buku pelajaran tentang hidup bermasyarakat yang baik berdasarkan agama Islam tanpa harus membuat keresahan bagi ummat non-Islam.<sup>36</sup>

Ada pula kyai atau elit agama yang ikut memecahkan permasalahan yang muncul akibat adanya satu kebijakan pemerintah yang dinilai kurang Islami. Misalnya dalam masalah pengumpulan zakat dan fitrah. Sebagai contoh, dalam awal tahun 1920-an, masyarakat di daerah Priangan Barat merasa resah karena pemerintah mengeluarkan satu peraturan bahwa zakat dan fitrah harus dikumpulkan melalui lembaga dengan amil-amil yang telah ditunjuknya (semacam BASIS di masa Orde Baru).

Dalam pelaksanaannya, penduduk sering melihat lembaga itu terlalu banyak mengambil porsinya, sehingga bagi para mustahik zakat lainnya sangat sedikit. Mereka tidak berani menggugat karena tidak tahu dasar hukumnya, apalagi para amil yang dibentuk pemerintah pun di-*backup* oleh para penghulu dan *hoofdpanghulu* yang mempunyai ilmu pengetahuan agama yang relatif baik pula. Dalam kondisi seperti ini Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi dari pesantren Genteng, Cibadak, Sukabumi, tampil dengan karyanya yang menjelaskan kedudukan zakat dan fitrah, termasuk lembaga pengumpulnya.

Dalam tulisannya itu dijelaskan bahwa keikutsertaan pemerintah dalam mengelola zakat dan fitrah pada dasarnya tidak saja menyalahi peraturan agama tetapi juga menyalahi peraturan yang dibuat pemerintah sendiri. Dalam surat edaran pemerintah tahun 1893 dijelaskan bahwa zakat dan fitrah tidak boleh diberikan kepada yang tidak berhak (sama seperti yang ditetapkan oleh agama). Kemudian dalam *Strafwetboek* juga dijelaskan bahwa Bupati (*Regent*) hanya sekedar mengawasi agar pelaksanaan pembagian zakat dan fitrah tidak keluar dari peraturan yang berlaku. Oleh sebab itu menurut Ahmad Sanusi seharusnya zakat dan fitrah tidak wajib disetorkan kepada naib

dan seterusnya disetorkan ke atas sampai kepada *Hoofdpanghulu* dan Bupati. Seharusnya zakat dan fitrah itu dikumpulkan oleh para amil yang ditunjuk masyarakat setempat untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, sesuai dengan aturan agama.<sup>37</sup> Sambutan masyarakat terhadap tulisan ini begitu besar. Sebaliknya pihak penguasa setempat menganggap tulisan kyai itu sebagai salah satu bentuk upaya kyai itu dalam merongrong kewibawaan pemerintah.<sup>38</sup>

Pada masa Kolonial Belanda tidak sedikit dari elit agama Islam yang mempunyai keahlian dalam bertani dan berdagang. Keahliannya itu, selain dipergunakan untuk mencari penghidupan bagi keluarga serta perguruannya, seringkali dimanfaatkan juga untuk kepentingan penduduk desa. Di daerah Sukabumi, Jawa Barat misalnya terdapat beberapa kyai yang bertindak sebagai penasihat bagi pertanian dan perdagangan bagi para petani di daerah tersebut. Mereka memberi tahu harga-harga hasil bumi di pasaran, dan jenis-jenis tanaman apa saja yang merupakan monopoli pemerintah dan yang bebas. Karena keahliannya itu ada kyai yang diangkat menjadi ketua organisasi pertanian seperti Kyai Haji Ajengan Muhammad Basyuni dari pesantren Cipoho, Sukabumi. Dia diangkat menjadi ketua Perkumpulan Pertanian Bumiputera (PPB), satu organisasi yang dikenal banyak memperjuangkan nasib para petani teh di Priangan Barat. Menurut laporan PID, perkumpulan ini sering menjalin kerjasama dengan organisasi Pasundan.<sup>39</sup>

Sebagai ungkapan rasa terimakasihnya atas bimbingan dan bantuan para kyai itu, seperti telah disinggung di atas, penduduk desa memperlihatkan dalam bentuk kunjungan ke rumah kyai. Ada yang datang dengan membawa berbagai hasil bumi atau perikanannya, ada pula yang membawa hasil perdagangannya. PID melaporkan bahwa perhatian masyarakat kepada para kyai yang sudah mendapat tempat di hatinya, seperti tidak mengenal jarak. Di manapun kyai itu berada, baik karena pindah tempat ataupun karena diasingkan, mereka tetap berusaha mengunjunginya, sejauh hal itu mungkin dilakukan.

Salah satu tokoh alim ulama atau kyai yang mendapat perhatian semacam itu antara lain Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi. Meskipun sejak tahun 1927 dia diasingkan dari ke Batavia Centrum, para santri serta pengikutnya tetap setia menjalin hubungan dengannya. Menurut catatan PID, selama di sana tidak kurang dari sepuluh ribu pengunjung menemuinya. Mereka yang datang berkunjung bukan hanya berasal dari wilayah Kabupaten Sukabumi saja tetapi juga dari beberapa kabupaten lainnya.<sup>40</sup>

Ketika organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan bermunculan, para elit agama Islam pun tidak ketinggalan memberikan dukungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada yang duduk sebagai *adviseur*, ada pula yang duduk sebagai ketua cabang. Di Banten misalnya, Kyai Haji Ajengan Ahmad Khatib duduk sebagai Ketua SI Lokal Serang, di Sukabumi Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi duduk sebagai *Adviseur* SI Lokal setempat. Demikian juga di Aceh, beberapa Teungku ikut aktif dalam organisasi SI, misalnya: Teungku Haji Abdulwahab Seulimeum, Teungku Haji Muhammad Amin Alue, dan Teungku Syekh Haji Abdulhamid Samalanga. Ulama yang disebutkan terakhir ini terkenal juga sebagai tokoh gerakan pembaruan atau reformasi Islam Aceh. Ia banyak bekerjasama dengan beberapa ulama terkenal Aceh lainnya seperti Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba dan Teungku Muhammad Daud Beureueh<sup>41</sup>

Selain para ulama, sebenarnya banyak pula kaum bangsawan Aceh atau uleebalang yang ikut aktif dalam partai-partai kebangsaan seperti SI. Teuku Raja Bujang dan Teuku Nyak Arief. Bahkan ada pula yang aktif dalam organisasi pendidikan Islam seperti Teuku Main dan Teuku Johan yang bersama-sama dengan Teungku Syekh Ibrahim mendirikan *Jam'iyah Diniyah Al Montasiyah* (JADAM). Akan tetapi karena secara *de facto* para *uleebalang* adalah pemangku adat atau penguasa wilayah, dan banyak di antaranya secara terang-terangan memihak Belanda, maka kecurigaan rakyat, khususnya dari kalangan ulama terhadap para *uleebalang* cukup tinggi.

Kecurigaan semakin kuat terutama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak Sekutu yang disusul dengan tersebarnya berita bahwa Belanda akan datang kembali ke Aceh. Para ulama dan *uleebalang* yang pernah terlibat pemberontakan melawan Belanda merasa terancam keselamatannya. Sebaliknya banyak para *uleebalang* yang pernah bekerjasama dengan Belanda menyambut gembira isu-isu tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian mendorong terjadinya peristiwa Cumbok. Dalam peristiwa itu, tidak sedikit keluarga *uleebalang* yang mati terbunuh.

### **Catatan**

- 1 Leonard Binder, "The Islamic Tradision and Politics: The Kijaji and The Alim", *Comparative Studies in Society and History*. Vol.2, 1960, h. 250-255; Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.; Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta: P3M, 1987; Zamakhsary Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.; Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1986.; Huub de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi dan Islam*. Jakarta: Gramedia, 1989.; Elly Touwen Bouwsma, *Staat Islam en Lokale Leiders in West Madura, Indonesia*. Kampen: 1988.
- 2 Geertz, *The Religion of Java*. New York: The Free Press Glencoe, 1960. h. 134.
- 3 Deliar Noer, *op.cit.* h. 19.
- 4 Lihat *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, 1988.; Deliar Noer sendiri menyebutkan bahwa nama kyai diperuntuk bagi dua macam golongan. Pertama, yang pengetahuannya tentang Islamnya melebihi pengetahuan orang biasa, dan umumnya pekerjaannya adalah mengajar. Kedua, lebih merupakan seorang dukun yang mengajar berbagai kepandaian yang bersifat magis. Lihat Deliar Noer, *op.cit.* catatan kaki no.10.; Menurut catatan yang ada di Kraton Surakarta Hadiningrat, "kyai" adalah akronim dari

kata “kiana” (bahasa Kawi) yang artinya “yang mulia” dan kata “aji” (bahasa Jawa Kuno) yang artinya “ratu”, “harga diri”, dan “nilai”. Jadi kiana-aji atau kyai berarti yang mulia, yang dipundi-pundi. Lihat G.P.H. Djatikusumo, “kyai”, *Tempo*. No.26, Th. XX, tanggal 25 Agustus 1990.

- 5 Lihat kembali Mohammad Iskandar, *op.cit.* bab 2 dan 3.
- 6 Ismuha, *Ulama Aceh Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta, 1976, h. 15.
- 7 Ismuha, *Op.cit.*
- 8 *Gatra*, Maret 1996.
- 9 Mohammad Iskandar, *op.cit.* bab.1.
- 10 Pengertian ulma ini sendiri akhir-akhir ini muncul menjadi topik pembicaraan menyusul adanya isu tentang pendangkalan agama dan krisis ulama. Prof. Dr. Harun Nasution dari IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta mengatakan bahwa pengertian ulama akhir-akhir ini bergeser terbatas hanya kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu fiqih. Padahal dulu yang disebut ulama mencakup *ilmu naqli* (ilmu yang berhubungan dengan wahyu) dan *ilmu aqli* ilmu hasil usaha akal manusia, di antaranya ilmu fisika, ilmu alam, dll). Walaupun begitu menurutnya, orang yang ilmunya hanya tingkat S1 (sarjana S1) tidak dapat disebut ulama. Apalagi orang yang ilmu pengetahuannya agamanya lebih rendah dari itu. Lihat “Pengertian ulama yang Bergeser”, *Panji Masyarakat*. No.666, 21-30 Nopember 1990, h.34.; Sementara itu K.H. Zainuddin M.Z. berpendapat bahwa ulama itu adalah orang yang betul-betul memahami agama Islam. Ilmunya diakui ummat, akhlaqnya jadi panutan dan perjuangannya menjadi contoh. Legitimasi ulama itu berada di tangan ummatnya. Meskipun ada pengkaderan ulama, tapi apabila ummat tidak mengakuinya, tetap saja tidak dapat dikatakan dia seorang ulama. lihat, “Ligitimasi Ulama di Tangan Umat”, *Panji Masyaakat*. No.666, 21-30 Nopember 1990.

- 11 Lihat kembali Mohammad Iskandar, "Para Pembawa Amanah: Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Priangan 1900-1945" (Tesis S2 pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok, 1991).
- 12 Surat Adviseur voor Inlandse Zaken tanggal 5 Pebruari 1934 No.209/K-VIII, dikutip oleh Mohammad Iskandar, *I b I d.*
- 13 *I b i d.*
- 14 Mengenai Teungku Indrapuri ini lihat A. Hasjmy. *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa.* Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h.45 - 59.
- 15 Drs. Baihaqi A.K. "Ulama dan Madrasah Aceh", *Agama dan Perubahan Sosial.* Taufik Abdullah (ed.) Jakarta: 1983, h. 139.; Lihat pula A. Hasjmy, *I b I d.* h. 103-128.
- 16 M. Masyhur Amin, "Kedudukan Kelompok Elit Aceh Dalam Perspektif Sejarah", *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan.* Jakarta: P.T. Pustaka Grafika Kita, 1988. h.21.
- 17 P. Sj. von Konisngsveld, "Beberapa aspek keagamaan Perang Aceh sebagai pencerminan dalam Tiga Naskah Berbahasa Arab yang Tidak Diterbitkan", *Beberapa Kajian Indonesia dan Islam.* W.A. L. Stikhof dan N.J.G. Kaptein (redaktur), jakarta: INIS, 1990, h.80.
- 18 Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah, Perang Aceh 1873-1912.* Jakarta: Pustaka Sianr Harapan, 1987, h. 22.; Mr. S.M. *Kenang-kenangan dari Masa Lampau.* Prandya Paramitha, 1978, h. 131.
- 19 T. Ibrahim Alfian. *I b I d.*
- 20 A. Hasjmy. *Ulama Aceh: Mujahi Perang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa.* Jakarta: Bulan Bintang, 1987. h.33-34.
- 21 *I b i d.* h. 35.

- 22 Isa Sulaiman, "Kekerasan Revolusi dan Pemberontakan: Rekonstruksi ulang Sejarah Aceh 1942-1962" (Makalah Seminar Indonesia-Perancis, Jakarta, 17-20 Nopember 1993), h.6.
- 23 Mohammad Iskandar, *Op.cit.*
- 24 Surat Haji Ahmad Sanusi tanggal 4 Juli 1928, salinan dalam Mailr. Geheim No.872X/28, ARA.
- 25 Achmad Djajadiningrat, Pangeran Aria, *Kenang-kenangan. Kolff-Buning - Balai Poestaka, 1936.*
- 26 Kyai Haji Ajengan Musaddad dari pesantren Musaddaiyah, Garut, mengadakan acara tablig/pengajian mingguan setiap hari Senin berdasarkan pada satu keterangan yang menyebutkan bahwa Abu Jahal, di neraka, pada setiap hari Senin mendapat nikmat Allah karena sewaktu di dunia, ia merasa gembira mendengar kabar kelahiran nabi, yang direfleksikan dengan cara membebaskan satu budaknya, yaitu budak yang membawa kabar tentang kelahiran itu. Wawancara dengan Kyai Haji Ajengan Anwar Musaddad pada bulan Juli 1990 di perguruan Musaddaiyah.
- 27 Achmad Djajadiningrat, *Op.cit.* h. 26-30.
- 28 Dhofier, *op.cit.* h. 82.
- 29 Dhofier mengutip Zamuji, *Ta'lim al-muta'allim.* 1963, h. 64-65.
- 30 Deliar Noer, *op.cit.* h. 19.
- 31 *I b i d.* h. 79. Dhofir juga menyebutkan bahwa dalam tradisi pesantren, seorang kyai tidak akan memiliki status dan kemasyhuran hanya karena kepribadian yang dimilikinya. Status dan kemasyhurannya itu hanya akan dicapai bila ada semacam pengesahan atas keilmuannya itu melalui satu rangkaian keilmuan (semacam jaringan keilmuan) yang dibuktikan melalui *sanad*. *Sanad* itu sendiri biasanya ditulis dengan rapi dan dibenarkan oleh kyai-kyai masyhur seangkatannya. *Sanad* itu sekaligus merupakan pengakuan adanya ikatan guru dan murid, sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Kyai yang tidak mempunyai mata rantai

keilmuan semacam itu tidak akan laku yang berarti tidak akan masyhur. Argumentasi Dhofier ini mungkin tepat di daerah tempatnya meneliti, atau di daerah pesantren yang mengembangkan ilmu tarekat. Sebab di daerah lain, khususnya yang tidak mengembangkan ilmu tarekat, apa yang disebutkan oleh Dhofier itu tidak kelihatan. Sebagai contoh adalah Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi. Dia tidak mempunyai *sanad* seperti itu. Selain itu ia juga dikenal sebagai santri yang berani “bertanya” dan “mendebat” gurunya Kyai Haji Ajengan Satibi dari pesantren Gentur, Cianjur. Ternyata pada zamannya, sekitar tahun 1930-1950, boleh dikatakan ia merupakan kyai termasyhur di Jawa Barat. Lihat Mohammad Iskandar, *Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi*. Pejuang dan Pemikir .

- 32 RAF, *Dongeng Enteng ti Pasantren*. Bandung: Tarate, 1982, cet. ke-3.
- 33 *I b i d.*
- 34 lihat Horikoshi, *op.cit.* h.105.
- 35 RAF, *op.cit.*
- 36 Lihat surat Haji Ahmad Sanusi tanggal 4 Juli 1928, *Op.cit.*
- 37 Lihat Ahmad Sanusi, *Qowaninud diniyyah Wa Dunyawiyah Fi Bayaani Umuri Zakati Wal Fitrah*. Tanpa Tahun (tt), h.16..
- 38 Untuk lebih jelas mengenai Haji Ahmad Sanusi ini, lihat Mohammad Iskandar, *Op.cit.*
- 39 Surat Mantri Polisi (PID) Sukabumi tanggal 21 Januari 1937, No.22/Rahasia, salinan dalam Mailr. Geheim No.953 geh/37, ARA. Lihat pula *Attabigoel Islami* No.3, Maret 1940, h.1, dan No.2, Februari 1942, h. 5-6.
- 40 Surat Mantri Polisi tanggal 21 Januari 1937 No.22/Rahasia, *Op.cit.*
- 41 Masyhur Amin. *Loc.cit* h. 30.

### **Bab III**

#### **DARI GERAKAN SOSIAL KE GERAKAN NASIONAL**

Jika kita berbicara mengenai keterlibatan para elit agama Islam yang sering disebut kaum alim-ulama, dalam kegiatan sosial, barangkali dapat ditelusuri jauh ke belakang, sejak Islam masuk dan berkembang di wilayah Nusantara. Kegiatan sosial ke-Islam-an pertama ditandai dengan kegiatan dakwah (syiar) Islam yang dilakukan oleh para da'i, guna menyampaikan ajaran Islam dengan hikmah dan bijaksana kepada seluruh umat manusia. Ajaran Islam yang disampaikan tanpa adanya satu paksaan, serta penuh toleransi terhadap budaya setempat, dapat diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Penyebaran itu juga dipermudah karena ajaran Islam mengajarkan mengenai persamaan hak dan kewajiban antar sesama ummat Islam tidak membedakan status dan jabatan seseorang, semuanya dianggap sama dan sederajat. Oleh karena itulah, Islam tumbuh dan berkembang menjadi agama semua lapisan masyarakat mulai dari kalangan wong cilik sampai kalangan bangsawan, keturunan raja-raja setempat.

Demikian pula mengenai keterlibatan para alim-ulama dalam masalah politik, sebenarnya hampir sama tuanya dengan sejarah perkembangan Islam. Hal ini tiada lain karena pada dasarnya ajaran Islam tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah yang baik untuk bekal kehidupan di akhirat saja, melainkan juga untuk kehidupan di dunia. Dalam ajaran Islam banyak terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan

dengan masalah bermasyarakat dan bernegara. Dalam sejarah lokal sampai dengan sejarah Internasional yang mengkaji tentang Islam, sudah banyak yang mengungkapkan keterlibatan para alim-ulama dengan masalah politik. Untuk sejarah Indonesia barangkali dapat diambil contoh dari mitos *walisono*. Dalam cerita-cerita tentang para wali itu dengan jelas menunjukkan keterlibatan mereka dalam masalah pemilihan raja sampai dengan kebijakan pemerintahannya. Bahkan para wali itu juga terlibat dalam peperangan, baik melawan kerajaan non-Muslim, maupun dengan sesama kerajaan Islam. Sebagai contoh dalam kasus Arya Penangsang dari Jipang metawan Joko Tingkir dari Pajang.

Akan tetapi jika yang kita maksudkan dengan keterlibatan alim ulama dalam politik itu "terbatas" pada peranannya dalam mengorganisir rakyat atau petani pedesaan guna melawan kekuasaan Kolonialis Barat, maka dengan sendirinya ruang lingkupnya ditarik mulai dari masa berkuasanya Portugis atau VOC. Keterlibatan para alim-ulama dalam perlawanan atau pemberontakan rakyat melawan kekuatan Barat nampak sejak VOC atau Kompeni mengembangkan kekuasaannya di kepulauan Indonesia. Dalam arsip-arsip Kompeni, para alim-ulama itu sering disebut sebagai pendeta-pendeta Moor, atau para haji. Mungkin karena banyaknya para haji yang terlibat dalam pemberontakan melawan Kompeni, maka Kompeni seringkali menahan perjalanan para jemaah haji yang baru pulang dari Mekkah menuju ke kampung halamannya. Tanpa alasan yang kuat, pihak Kompeni memeriksa atau menginterogasi para jemaah haji yang dicurigainya. Bahkan secara sepihak, tidak jarang penguasa Kompeni membuang seorang haji atau alim-ulama ke daerah yang jauh dari kampung halaman si haji atau alim ulama tersebut. Misalnya Syeikh Yusuf dari Makasar yang dibuang ke Afrika Selatan.

Keterlibatan elit-elit agama Islam ini semakin kelihatan terutama dalam gerakan-gerakan rakyat yang muncul secara sporadis dalam hampir sepanjang abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20. Perlawanan-perlawanan rakyat seperti ini kemudian sering disebut sesuai dengan isu-isu yang

dikumandangkannya sebelum, selama, dan sesudah perlawanan itu terjadi. Ada yang disebut gerakan millenarisme, messianisme, gerakan Ratu Adil, atau gerakan Imam Mahdi, dan lain sebagainya.

### ***3.1. Elit Agama dalam Gerakan Sosial***

Sejak berdirinya Hindia Belanda, dominasi Barat terhadap kaum Pribumi terus berkembang, tidak saja dalam bidang politik dan ekonomi, melainkan juga dalam bidang-bidang lainnya. Tidak dapat disangkal lagi bahwa dominasi Barat itu telah membawa suatu perubahan yang cukup besar terhadap struktur masyarakat setempat yang pada akhirnya telah mendorong terciptanya kondisi yang meresahkan dan memungkinkan terjadinya gerakan sosial. Seperti dikatakan oleh Sartono Kartodirdjo, dominasi Barat dalam bidang ekonomi, politik, dan kultural atas orang-orang Pribumi, akhirnya mengakibatkan timbulnya disintegrasi di kalangan masyarakat tradisional beserta lembaga-lembaganya.<sup>1</sup> Hal ini semakin jelas setelah dimasukkannya sistem ekonomi uang. Beban rakyat menjadi semakin bertambah berat.

Kemudian penetrasi sistem administrasi yang bersifat legal rasional yang dibawa oleh pemerintah kolonial, telah menjadikan para penguasa tradisional sebagai alat birokratis yang ditempatkan di bawah pengawasan kekuasaan kolonial. Dengan kedudukannya itu, penguasa Pribumi tidak lagi sebagai kepala penduduk (*Inlandse hoofden*) yang mempunyai basis ekonomi-politiknya dari masyarakat setempat. Mereka telah menjadi abdi negara kolonial yang kehidupan ekonomi dan politiknya berasal dari belas kasihan pemerintah Hindia Belanda. Dalam situasi seperti ini, timbulah suatu kecenderungan dalam masyarakat untuk kembali mencari pegangan-pegangan lama, antara lain dengan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional. Akan tetapi karena para *priyayi*, *orang kaya*, bahkan kemudian para ulebalang telah menjadi abdi negara kolonial Hindia Belanda, maka banyak para petani di pedesaan yang mencari tempat-tempat atau tokoh-tokoh tertentu yang dianggap mampu memberikan perlindungan, semangat atau harapan bagi

penghidupan yang lebih baik di masa akan datang. Umumnya orang-orang yang didatangi itu adalah orang-orang yang dipercayainya mempunyai kekuatan gaib dan dapat memberi kekuatan, semangat serta harapan hidup yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tokoh-tokoh semacam itu antara lain para elit agama, seperti kyai, di samping para dukun atau tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan semacam *magic religious*.

Dengan adanya kekuatan-kekuatan serta harapan yang diperolehnya itu, keberanian para petani menjadi bertambah, bahkan berani melontarkan perasaan tidak puasanya kepada pihak-pihak yang dianggap telah membuat kehidupan mereka menjadi tidak baik. Ungkapan-ungkapan perasaan itu umumnya muncul dalam bentuk gerakan-gerakan sosial, mulai dari aksi huru-hara, protes, sampai dengan bentuk pemberontakan berdarah. Pemberontakan petani merupakan di wilayah pedesaan merupakan bentuk gerakan sosial yang paling banyak muncul sepanjang abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20.

Harry J. Benda menyebutkan bahwa pemberontakan-pemberontakan petani yang muncul sepanjang abad ka-19, sebagian besar bercirikan Islam.<sup>2</sup> Adanya pernyataan ini tidak harus diartikan bahwa pemberontakan itu adalah pemberontakan Islam. Karena, seperti telah dikemukakan oleh Sartono Kartodirdjo, gerakan-gerakan sosial di Indonesia pada umumnya berwujud sebagai pemberontakan Ratu Adil atau gerakan mesianistis. Adanya corak keislaman dapat diartikan bahwa perasaan keagamaan (Islam) justru telah memperkuat suatu gerakan protes sosial, baik dari segi persatuan, semangat, maupun dalam hal pencapaian tujuan.

Alasan ini tidaklah berlebihan. Sebab, masyarakat yang sedang frustrasi dan putus asa, secara naluriah, pertama-tama akan mencari kekuatan ke dalam dirinya, pada kepercayaan yang telah mengakar dalam kehidupannya. Hal ini dapat pula diartikan bahwa masyarakat akan mencari kekuatan-kekuatan keagamaan yang telah mengakar pada tradisi-tradisi setempat. Dalam agama Islam jelas disebutkan apa ganjarannya (*reward*) bagi orang yang memperjuangkan hak (yang sesuai dengan kepercayaan agama Islam) dan melawan kaum bathil, dan apa

artinya mati dalam memperjuangkan hak itu, yaitu *sahid*. Mati *sahid* adalah mati yang termulia dengan sorga sebagai imbalannya, sehingga *sahid* menjadi dambaan seluruh kaum Muslimin di mana pun dia berada.

Dengan demikian Islam tidak saja menjanjikan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia, melainkan juga di akhirat nanti. Apalagi dalam agama Islam jelas disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang (kelompok) jika dia tidak mengubahnya sendiri. Oleh karena itu tidaklah aneh jika gerakan-gerakan sosial yang muncul di Indonesia banyak menunjukkan ciri keislaman. Karena, bagaimanapun mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga untuk memperkuat 'perjuangannya' itu mereka kembali ke Islam (sudah barang tentu dengan pengertian dan batasannya masing-masing sesuai dengan kedalaman pemahaman mereka dalam menghayati Islam).

Walaupun dalam Islam tidak ada kelas atau kelompok khusus sebagai guru atau pendakwah, seperti pastor, pendeta, biksu atau rahib, tapi ada juga orang-orang atau kelompok orang yang pekerjaannya mirip dengan pastor atau pendeta, yaitu para kyai, *mualimin*, syekh, atau ustadz yang sering disebut sebagai alim-ulama. Orang-orang inilah yang mampu memberikan pengharapan dan penjelasan mengenai berbagai kehidupan beragama dan bermasyarakat, serta kehidupan manusia setelah kematiannya nanti. Dari merekalah para petani mendengar makna  *Jihad fisabilillah* dan juga mengenai berita kedatangan *messias*, yang dalam tradisi Islam lebih sering disebut sebagai Imam Mahdi. Mereka pulalah yang dapat menghidupkan kembali mitos-mitos lama menjadi satu pandangan hidup para petani.

Jika dalam perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa dikenal tokoh Kyai Tapa, atau dalam Perang Diponegoro dikenal tokoh Kyai Maja, maka dalam gerakan-gerakan sosial boleh dikatakan tidak ada tokoh kyai atau alim-ulama yang demikian menonjol namanya. Namun dari kasus-kasus pemberontakan itu banyak

mengungkapkan keterlibatan elit-elit agama setempat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya dalam pemberontakan petani di Ciomas, Jawa Barat yang terjadi dua kali dalam tahun 1886. Pemberontakan pertama dipimpin oleh Apan Ba Sa'amah dan yang kedua dipimpin oleh Mohammad Idris. Kedua tokoh ini dikenal oleh masyarakat setempat sebagai orang-orang sakti dan guru ngaji. Artinya kedua tokoh itu mempunyai ilmu pengetahuan agama yang relatif lebih tinggi daripada kebanyakan para pengikutnya<sup>3</sup> Demikian pula dalam pemberontakan petani di desa Patik, Jawa Timur, disebut-sebut nama seorang kyai, yaitu Kyai Hasan Basari. Walaupun dalam kasus pemberontakan itu Kyai Hasan Basari tidak disebutkan secara jelas keterlibatannya, namun pengaruh dari nama kyai ini jelas terlihat di dalamnya.<sup>4</sup> Kemudian dalam huru-hara di kota Bandung yang melibatkan Patih Kabupaten Bandung dan Wedana Kota Bandung ternyata juga melibatkan seorang kyai yang cukup berpengaruh di kota Bandung.<sup>5</sup>

Sementara itu Clifford Geertz dalam bukunya "Islam Observed : Religious Development in Marocco and Indonesia" mencatat empat kali pemberontakan yang dipimpin para alim-ulama. Dia menyebutnya sebagai Pemberontakan Santri (*Santri insurrection*) melawan Imperialis Belanda pada abad lae-19, yakni pemberontakan di Sumatera Barat (1821-1828), Jawa Tengah (1826-1830), Barat Laut Jawa (1840-1880), dan Aceh (1873-1903).<sup>6</sup>

Pemberontakan santri di Sumatera Barat yang dimaksudkannya, tidak lain adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Kaum Paderi di daerah Bonjol, Sumatera Barat yang dipimpin Ulama Besar Malim Basa yang lebih dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Kaum Paderi yang dijiwai oleh semangat *jihād fi sabilillah* dimotori oleh para alim-ulama, dengan semangat keislaman dan cinta tanah air mengadakan perlawanan terhadap kolonialis Belanda. Karena tidak seimbangnnya kekuatan dan juga karena berhasilnya Belanda memperdaya Golongan Adat yang tidak senang dengan gerakan pembaruan Kaum Paderi, maka perlawanan Kaum Paderi dapat dipadamkan.<sup>7</sup> Walaupun akhirnya gerakan itu dapat dipatahkan,

namun gerakan pembaruan dan semangat perjuangannya menjalar dalam darah daging rakyat Indonesia, dan menjelma dalam berbagai bentuk perjuangan. Semangat pembaruan inilah yang kemudian menjiwei dan memotivasi penyelenggaraan pendidikan dan da'wah pada permulaan abad ke-20, seperti dakwah Thawalib di Sumatera Barat, AI-Irsyad di Sumatera dan Jawa, Persatuan Islam di Jawa Barat serta Muhammadiyah di Kota Gede, Yogyakarta yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok Nusantara.

Ada pun perlawanan Santri di Jawa Tengah, tidak lain adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dibantu antara lain oleh Kyai Maja, seorang ulama terkenal waktu itu. Perang Diponegoro yang dikenal dengan sebutan *Java Oorlog* merupakan perlawanan rakyat setempat terhadap kekuasaan kolonialis Belanda yang menerapkan sistem tanam paksa, kerja paksa, dan penyerobotan atas tanah-tanah masyarakat, yang semuanya itu telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang berkepanjangan.<sup>8</sup>

Sedangkan pemberontakan santri di Barat Laut Jawa yang dimaksudkan oleh C. Geertz, adalah pemberontakan yang dilakukan oleh para Ulama dan Umat Islam Banten yang berupaya melepaskan diri dari sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh Pemerintah Kolonial. Pemberontakan Ulama dan Umat Islam di Banten terjadi pada tahun 1834, 1838, 1842, 1849, 1880, dan 1888.<sup>9</sup>

Selanjutnya pemberontakan santri di Aceh yang disebutkan oleh C. Geertz berlangsung pada tahun 1873-1903, adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Cut Nya' Dhien, yang lebih dikenal sebagai Perang Aceh (*De Groot Aceh Oorlog*). Pemberontakan di Aceh pada mulanya dipimpin oleh Teuku Umar suami Cut Nya' Dhien sendiri. Setelah Teuku Umar mati syahid di Meulaboh, pimpinan perang kemudian diambil alih oleh Cut Nya' Dhien. Gendang yang didengungkan oleh Cut Nya' Dhien sangat menakutkan Belanda. Khiarisma dan keteguhan Cut Nya' Dhien mampu mengobarkan semangat perang jihad para pengikutnya. Dalam kondisi kesehatannya yang kian melemah dan mata yang kian meredup, Cut Nya' Dhien tetap

memotivasi .dan mengomandokan perang suci, sampai akhirnya dia tertangkap dan kemudian diasingkan ke Jawa. Sampai akhir hayatnya dia tidak sempat lagi melihat tanah kelahirannya, tanah perjuangannya. Cut Nya' Dhien meninggal di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 8 Nopember 1908.

Dari keempat contoh yang dikemukakan oleh Geertz di atas, kecuali pemberontakan di Banten, hampir semuanya sulit untuk dikategorikan sebagai satu gerakan sosial. Walaupun di dalam ketiga pemberontakan santri di atas disebutkan ada unsur eksploitasi pajak (produksi dan tenaga), tetapi dari segi tujuan, organisasi dan kepemimpinannya; serta dari jangka waktu berlangsungnya pemberontakan itu, sangat berbeda dengan umumnya gerakan-gerakan sosial, Sebab, usia gerakan-gerakan sosial seperti gerakan yang menggunakan isu Imam Mahdi, Ratu Adil atau gerakan messianistis, umumnya berusia pendek-pendek. Hampir tidak ada satu pun dari jenis gerakan sosial yang melebihi jangka waktu sebulan, apalagi tahunan. Pemberontakan petani di desa Patik dan Ciomas misalnya, berhasil diselesaikan oleh penguasa kolonial yang bekerjasama dengan tuan tanah, dalam Jangka waktu tidak lebih dari tiga hari, sejak pemberontakan itu maletus. Begitu pula huru-hara di kota Bandung, tidak lebih dari dua hari seluruh pelaku utamanya dapat ditangkap. Oleh karena itu pada umumnya sejarawan sosial, tidak memasukkan keempat 'pemberontakan' itu sebagai satu gerakan sosial.<sup>10</sup>

Pendek kata usia gerakan protes atau pemberontakan-pemberontakan petani itu tidak jauh dari sifat -sifat pemberontakan itu sendiri. Seperti telah disinggung di atas, gerakan-gerakan protes sosial umumnya yang bersifat sporadis. Artinya gerakan ini tidak terorganisir secara baik, dan juga tidak mempunyai kordinasi dengan gerakan-gerakan serupa yang muncul di daerah lainnya. Gerakan sosial betul-betul merupakan satu gerakan lokal, di mana program dan strateginya sangat sederhana, apabila jika dibandingkan dengan gerakan yang dilancarkan oleh kaum sosialis. komunis, atau fasis. Oleh karena gerakan sosial atau pemberontakan-pemberontakan yang dilakukannya mudah sekali dilindas oleh penguasa kolonial, yang

berarti umurnya pun pendek. Pada umumnya gerakan-gerakan semacam itu merupakan pergolakan lokal atau regional yang tidak ada koordinasi satu sama lain. Dalam peristilahan kolonial, gerakan-gerakan sosial itu sering digolongkan sebagai, "gangguan ketenteraman", "huru-hara", "kerusuhan", atau "gerakan rohani". Sifat yang tradisional arkais itu juga tercermin antara lain dari sifatnya yang seringkali tidak dapat dipisahkan dari segi-segi religio magis. Dalam lingkungan sosio kultural pada masa itu loyalitas dan sentimen pokok tidak ada lain, kecuali sentimen keagamaan. Oleh karena itu agitasi-agitasi atau reaksi-reaksi yang dilancarkan terhadap tantangan Barat pada hakekatnya adalah bersifat keagamaan.

Dua orang sejarawan, yaitu: Onghokham dan Sartono Kartodirdjo berpendapat bahwa ada dua kategori gerakan maupun konflik sosial, yaitu gerakan/perlawanan yang bersifat kolegal dan personal. Gerakan kolegal yaitu gerakan yang dilakukan Pribumi melawan kolonial Belanda sebagai akibat diterapkannya sistem-sistem perpajakan, tanam paksa, dan aturan lainnya oleh pemerintah Kolonial terhadap orang-orang Pribumi. Sedangkan gerakan personal timbul sebagai akibat terjadinya konflik pribadi pejabat-pejabat Pribumi dengan pejabat kolonial. Pemberontakan petani di tanah partikelir Ciomas merupakan salah satu contoh gerakan kolegal. Sedangkan huru hara di kota Bandung dapat dijadikan salah satu contoh gerakan personal.

### ***3.2. Elit Agama Dalam Pergerakan Nasional***

Pijper, salah seorang mantan *Adviseur voor Inlandse Zaken* di akhir kekuasaan Hindia Belanda, mengatakan dalam salah satu bukunya bahwa dunia kaum Muslimin Indonesia sebelum abad ke-19 bagaikan sungai yang mengalir dengan tenang. Kemudian dengan munculnya gelombang pembaruan dari Timur Tengah, ditambah pula dengan diperkenalkannya sistem pendidikan Barat sejak akhir abad ke-19, maka air yang tenang itu mulai beriak dan terus bergelombang dan akhirnya meluap bagaikan air bah. Apa yang dikatakan Pijper memang ada benarnya. Di atas telah disinggung bahwa dampak gerakan

pembaruan yang dibawakan kaum Paderi di Sumatera Barat, ternyata tidak padam karena tokoh-tokohnya ditangkap. Gerakan pembaruan dalam masalah keagamaan terus bergema dan dilanjutkan oleh para pembaru-pembaru (*mujaddid*) berikutnya. Pusat Pendidikan Islam di Bonjol, oleh ulama-ulama muda penerusnya di kembangkan menjadi Sumatera Thawalib. Di Padang, Syaikh Abdullah Ahmad mendirikan "Ambija School". Nama ini kemudian diubah menjadi HIS Adabiyah. Pendirian sekolah dasar itu kemudian dilanjutkan dengan didirikannya Sekolah Menengah Pertama dan Atas, serta Perguruan Tinggi.<sup>11</sup> Sedangkan seorang ulama besar wanita Rangkayo Rahmah Al-Junusiyah pada tahun 1923 mendirikan Madrasah Puteri.<sup>12</sup>

Di Jakarta, pada tahun 1905, ulama pembaru Sayyid Barsandidi, Muhammad Al-Fakhir Al-Mansur, dan Idrus Ibn Shahab mendirikan Jami'at Khair, yang kemudian mengembangkan kegiatannya dengan mendirikan Surat Kabar Harian "Oetoesan Hindia" di bawah pimpinan Umar Said Tjokroaminoto. Tokoh ini kemudian lebih dikenal sebagai pemimpin Sarekat Islam. Di Yogyakarta, pada tahun 1912, Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah. Setelah itu berturut-turut di beberapa tempat berdiri organisasi bernapaskan Islam, seperti *Al-Islam Wal-Irsyad* di Jakara (1923), Persatuan Islam di Bandung (1923). Seorang keturunan *Hoofdpenghulu* di Majalengka, yaitu Haji Abdulhalim mendirikan Persatuan Umat Islam di Majalengka, KH. M. Yasin mendirikan *Madrasah Al-Khairiyah* dan Matalaul Anwar di Banten (1925), K.H. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama di Surabaya (1928), H. Abdur.Rahman mendirikan Normal Islam di Amuntai (1928), H.M. N Basyuni Imran mendirikan Perguruan Islam *As Sulthaniyah* di Sambar Kalimantan, Syeh Subiman Ar-Rasul dkk mendirikan Perguruan *Tarbiyah Islamiyah* di Minangkabau (1928), Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi mendirikan *Al Ithadiyahatul Islmiyyah* di Sukabumi (1931), dan Syeh H.M. As'ad Ibn Rasyid mendirikan *Madrasah Amiriyah Islamiyah* di Bone (1933).

Kecuali Sarekat Islam, umumnya organisasi-organisasi Islam di atas, hanya bergerak dalam bidang sosial budaya,

terutama dalam bidang pendidikan Islam. Walaupun demikian tidak berarti para tokohnya atau para anggotanya terlepas dari masalah politik. Seperti telah disinggung di atas, beberapa dari tokoh dari organisasi-organisasi Islam itu ada juga yang terjun ke dalam masalah politik, yaitu dengan cara ikut sebagai anggota SI atau organisasi politik lainnya.

Ulama dengan gerakan pembaharuannya telah mendobrak paham dikotomi yang diciptakan Pemerintah Kolonial yang memisahkan agama dari sistem pemerintahan. Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah *ubudiyah* (peribadatan), tetapi juga berkaitan dengan masalah politik pemerintahan, ekonomi bangsa, sosial budaya, dan masalah-masalah lainnya. Para elit agama, disamping bergerak dalam bidang pendidikan juga aktif mendukung pergerakan nasional.

Meskipun gerakan reformasi Islam membawa pengaruh yang cukup besar dalam dunia Islam Indonesia, namun yang menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda bukanlah aspek sosial budaya serta pendidikan yang dikembangkannya. Yang menjadi perhatian utamanya adalah sejauh mana gerakan-gerakan pembaruan itu berpengaruh kepada cara pandang politik umat Islam Indonesia. Oleh karena itu pemerintah kolonial lebih banyak mengawasi perkembangan Sarekat Islam ketimbang Muhammadiyah atau Sumatera Thawalib.

Sejak awal pendiriannya tahun 1911,<sup>13</sup> Sarekat Islam sudah menimbulkan kecurigaan kalangan pemerintah Kolonial Belanda dan juga orang-orang Cina. Hal ini dapat dimengerti, ketakutan yang dirasakan orang-orang Belanda dan Cina itu bukan saja karena organisasi ini berlandaskan Islam, melainkan juga karena tujuannya ingin menyatukan semua pedagang Islam guna menghadapi persaingan perdagangan. Meskipun dalam anggaran dasar SDI tidak disebutkan sedikitpun mengenai pedagang Cina dan Belanda, namun orang-orang Cina pada khususnya melihat keberadaan organisasi itu sebagai ancaman langsung terhadap eksistensinya di dunia perdagangan mereka di Hindia Belanda. Prasangka seperti itu tidak terlalu berlebihan mengingat dalam abad-abad sebelumnya para pedagang Islam pernah menguasai perdagangan mulai dari

Timur Tengah sampai ke wilayah Asia Tenggara. Selain itu, alasan yang mendorong Haji Samanhoedi mendirikan SDI di Solo, juga banyak berkaitan dengan Cina. Pertama, dominasi dan arogansi para pedagang (batik) Cina terhadap para pedagang Pribumi. Kedua, perlakuan diskriminatif yang dikenakan pemerintah Hindia Belanda terhadap para pedagang Pribumi. Pemerintah lebih banyak memberikan keleluasaan kepada orang-orang Cina daripada orang-orang Pribumi.

Secara lengkap tujuan SDI tertulis dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

- (1) Tujuan perkumpulan semata-mata hendak mencapai kesatuan pendapat, agar supaya mereka bergaul dalam persaudaraan dengan saudara-saudara sebangsa yang beragama Islam sehingga tak terdapat jurang, saling membantu serta menjadikan negeri mereka besar. Hal ini harus dilakukan dengan mencari sarana, yang tidak bertentangan dengan larangan pemerintah
- (2) Perkumpulan bertujuan membantu semua orang Islam, agar supaya mereka menjadi kuat menghadapi rakyat di kampung-kampung.<sup>14</sup>

Sewaktu SDI melakukan semacam reorganisasi dan diubah namanya menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, anggaran dasarnya sedikit mengalami perubahan. Tujuan partai, terutama berkaitan dengan "status" kaum bumiputera menjadi lebih jelas. Selengkapnya tujuan dari SI tertulis dalam pasal 2 sebagai berikut:

- One. memajukan semangat dagang di kalangan bumiputera;
- Two. memberikan bantuan kepada para anggota perkumpulan, yang bukan karena kesalahannya dan tiada dengan kesengajaan berada dalam macam-macam kesulitan;
- Three. memajukan pendidikan rohani dan kepentingan materiil bumiputera dengan demikian juga membantu meningkatkan kedudukan bumiputera;

**Four.** menghilangkan salah pengertian mengenai agama Islam dan memajukan kehidupan keagamaan di kalangan bumiputera sesuai dengan hukum tata cara dan agama tersebut; menempuh segala cara dan menggunakan semua jalan yang diperkenankan dan tidak bertentangan dengan ketenteraman umum dan adat istiadat yang baik.<sup>15</sup>

Meskipun dalam anggaran dasar SI tidak disinggung-singgung pedagang lainnya selain pedagang Islam, namun Islam phobi yang terpatери pada jiwa sebagian orang-orang pemerintah Hindia Belanda dan juga Cina, telah mendorong pemerintah Hindia Belanda bertindak sangat hati-hati dan cenderung 'diskriminatif'. Karena itulah SI mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan status hukum dari pemerintah Hindia Belanda.

Para pemimpin SI akhirnya terpaksa harus menerima kenyataan bahwa SI waktu itu tidak dapat berdiri sebagai satu organisasi yang bersifat nasional, namun sebagai organisasi lokal. Dengan demikian para pemimpin SI terpaksa harus puas dengan adanya SI lokal-SI lokal. Ternyata bentuk status hukum seperti itu tidak menjadi penghambat para pemimpin SI lokal untuk menarik simpati masyarakat. Tjokroaminoto misalnya, dengan gaya kepemimpinannya berhasil menarik simpati masyarakat, tidak saja kalangan pedagang dan pelajar, tetapi juga kalangan birokrasi. Dalam waktu yang relatif singkat, anggota SI mencapai puluhan ribu orang, bahkan ada yang menyebutkan sampal dua juta orang.

Residen Surakarta yang khawatir melihat perkembangan SDI sempat membekukan kegiatan SDI. Alasannya adalah, para anggota SDI sering membuat huru-hara dan perkelahian melawan orang-orang Cina. Pembekuan itu kemudian dicabut kembali dengan syarat agar orang-orang pimpinan SDI mau mengubah Anggaran Dasar organisasinya, khususnya menyangkut "operasional" organisasi. Dalam anggaran dasar itu diminta hendaknya mencantumkan bahwa SDI Surakarta itu sifatnya lokal, hanya untuk daerah Surakarta saja.<sup>16</sup>

Namun harus diakui bahwa keberhasilan SI menarik massa; terutama dari kalangan santri dan petani di pedesaan, bukanlah semata-mata karena kharismanya Tjokmominoto, melainkan karena bantuan para kyai dan alim ulama Islam tradisional. Oleh karena itulah, meskipun secara organisasi, gerakan SI merupakan salah satu wujud dari gerakan modern Islam Indonesia, namun pada hakekatnya hanyalah gerakan politisasi masyarakat Islam di pedesaan. Seperti dikatakan oleh Harry J. Benda, gerakan SI sebenarnya hanya memindahkan gerakan-gerakan sosial di wilayah pedesaan yang bersumber pada kharisma para kyai dan elit agama tradisional lainnya, ke kota di bawah pimpinan SI. Karena itu tidaklah aneh jika ada yang mengatakan bahwa salah satu sukses SI adalah karena Tjokroaminoto berhasil meyakinkan masyarakat bahwa dia adalah Ratu Adil, sehingga gerakan SI pun dianggap sebagai gerakan Ratu Adil. Namun berdasarkan hasil studi yang lebih mutakhir seperti yang dikalukan oleh Korver, terbukti bahwa keberhasilan SI meraih simpati masyarakat bukanlah karena dia dianggap Ratu Adil. Artinya SI bukanlah gerakan Ratu Adil, melainkan gerakan Islam modern, atau lebih tepatnya merupakan gerakan nasional.<sup>17</sup> Kenasionalan SI yang membawa para alim ulama di dalamnya semakin kelihatan, bukan saja dari program-program yang diutarakannya, melainkan juga dari perubahan-perubahan nama organisasi tersebut.

Sarekat Islam sebenarnya dapat juga disebut sebagai organisasi pembaruan Islam. Namun gerakan politisasi Islamnya ternyata jauh lebih menonjol ketimbang gerakan pembaruan Islamnya. Dapat dikatakan partai ini menjadi salah satu pelopor lahirnya pergerakan nasional, serta mempunyai andil besar dalam proses lahirnya *Volksraad* bersama-sama dengan Budi Utomo. Dalam Kongresnya yang pertama pada tanggal 17-24 Juni 1916 yang bernama "*National Indische Congres*" (NIC), untuk pertama kali dikemukakan perasaan kebangsaan *Indische* yang mengikat seluruh suku bangsa yang ada di kepulauan Hindia (Indonesia). Kongres pertama yang dihadiri tidak kurang dari 80 SI Lokal yang mewakili 380.000 anggotanya, memutuskan, mamilih HOS. Tjokroaminoto sebagai Ketua, dan Abdul Muis sebagai Wakil Ketua.

Masalah hangat yang menjadi pembahasan dalam kongres pertama itu adalah masalah peran SI dan Umat Islam pada umumnya dalam kegiatan kenegaraan. Masalah lainnya adalah upaya memajukan bidang Ilmu (pendidikan), sarta masalah demokrasi dan sosialisme dalam hubungannya dengan Islam.

Pemakaian kata “nasional” dalam kongres itu mencerminkan adanya suatu upaya dari pemimpin-pemimpin SI untuk menyebarkan dan menegakkan cita-cita sebagai satu bangsa. Hal ini sekaligus untuk menunjukkan bahwa Islam sebagai ajaran yang sangat cocok sebagai dasar perjuangan organisasinya. SI mengharapkan agar orang-orang Indonesia diberikan hak untuk mengemukakan suaranya dalam masalah-masalah politik.<sup>18</sup> Dalam kongres itu Abdul Muis mengatakan : “hanyalah dengan dasar nasionalisme dapat kemerdekaan suatu bangsa dan suatu negeri dicapai dengan cepat.”<sup>19</sup> Dalam kaitannya dengan pemerintah Kolonial, ia berkata;

Tidaklah wajar untuk melihat Indonesia sebagai sapi perahan yang diberikan makan hanya disebabkan oleh susunya. tidaklah pada tempatnya untuk menganggap negeri ini sebagai suatu tempat dimana orang-orang datang dengan maksud mengambil hasilnya dan pada saat ini tidaklah lagi dapat dipertanggung jawabkan bahwa penduduknya terutama penduduk Pribumi, tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi di dalam masalah-masalah politik, yang menyangkut nasibnya sendiri . . . Tidak bisa lagi terjadi bahwa seseorang mengeluarkan undang-undang dan peraturan untuk kita tanpa partisipasi kita, mengatur hidup kita tanpa partisipasi kita.<sup>20</sup>

HOS Tjokroaminoto merupakan tokoh (ulama) kharismatik dalam tubuh Sarekat Islam. Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang sangat luas dan berpandangan ke depan. Sikapnya tegas dan berani membela kepentingan rakyat dan bangsanya. Tjokroaminoto terkenal dengan sikapnya yang radikal dengan menentang kebiasaan-kebiasaan yang memalukan bagi rakyat banyak sehingga ia disebut sebagai seorang Gatotkoco Sarekat Islam.<sup>21</sup> HOS. Tjokroaminoto, melalui dua orang utusannya yang dikirim ke Bandung pada tahun 1912 berhasil membujuk beberapa tokoh Indonesia di kota tersebut seperti

Wignjadisastra, Abdul Muis, dan Soewardi Suwardi Suryaningrat untuk memperkuat barisan Sarekat Islam. Kemudian ketiga tokoh tersebut masing-masing menjadi Ketua, Wakil ketua, dan Sekretaris SI Lokal Bandung.

Seorang tokoh (ulama) lainnya yang penting, yang bergabung dengan Sarekat Islam pada tahun 1915 adalah Haji Agus Salim. Pada awalnya ia tidak begitu populer. Tetapi pada periode selanjutnya ia menjadi tokoh penting, terutama dalam membentuk dan memberi makna pada Sarekat Islam dengan warna keislamannya.

Dalam NIC kedua di Jakarta tanggal 20-27 Oktober 1917, para tokoh alim ulama yang tergabung dalam SI membahas tentang “upaya pembelaan terhadap rakyat” yang berkaitan dengan masalah tanah partikelir, agama, penyewaan tanah, keadaan pabrik gula, urusan pengadilan, perbaikan perumahan, keadaan tanah kerajaan, nasionalisme; memperjuangkan hak politik anak negeri. Hal inilah antara lain yang menjadi faktor mendekatkan SI dengan Budi Utomo. Seperti telah disinggung di atas, SI sependapat dengan Budi Utomo untuk mendesak pemerintah Kolonial Belanda untuk membentuk *Volkraad* atau Dewan Rakyat.

Namun seperti telah banyak diungkapkan dalam beberapa kajian sejarah maupun politik, Dewan Rakyat yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda itu tidak lebih sekedar lembaga penasihat Gubernur Jenderal, yang nasihatnya itu tidak mengikat atau ada sangsi hukumnya. Reaksi dari kalangan SI terhadap Dewan Rakyat bentukan Belanda itu pun bermunculan. Ada yang menolak dan ada pula yang menerimanya. Kelompok yang disebutkan terakhir ini berpendapat, meskipun lembaga tersebut tidak seperti yang diharapkan, tapi paling tidak bangsa Pribumi dapat memanfaatkannya sebagai salah satu media perjuangan, sekaligus melatih diri dalam “berparlemen”. Karena itulah SI setuju untuk menempatkan wakilnya dalam lembaga tersebut. Pimpinan SI yang duduk dalam *Volksraad* adalah Abdul Muis yang dipilih oleh anggota SI, dan HOS. Tjokroaminoto yang duduk dalam Dewan itu sebagai anggota yang ditunjuk oleh pemerintah.

Meskipun beberapa anggotanya duduk dalam *Volksraad*, garis perjuangan Sarekat Islam tidak begitu bergeser menjadi partai yang kompromistis dengan pihak pemerintah. Wakil-wakil mereka, seperti Tjokroaminoto dan Abdul Muis, betul-betul memanfaatkan lembaga ini sebagai forum untuk menyalurkan tuntutan-tuntutan SI, seperti yang telah diputuskan oleh kongres-kongresnya. Keduanya juga bekerjasama dengan wakil-wakil lain yang mempunyai garis perjuangan yang sama. Kelompok ini akhirnya membentuk semacam fraksi yang dinamakan "Radicale Concentratie". Fraksi itu sendiri pada dasarnya didirikan atas inisiatif Ch. G. Cramer dari partai *Sociaal Democratische Arbeider Partij* (SDAP), yaitu partai sosialis di negeri Belanda.

Sebagai catatan, munculnya fraksi itu diawali dengan adanya peristiwa politik yang dikenal sebagai *November befoft*, atau "krisis November". Pada bulan November 1918 terjadi krisis politik akibat munculnya usul dari wakil-wakil SDAP yang menuntut agar sistem ketatanegaraan negeri Belanda diubah menjadi republik seperti halnya Jerman.<sup>22</sup> Usulan SDAP ini ternyata mendapat dukungan pula dari beberapa wakil partai lainnya sehingga antara kelompok yang pro dan kontra praktis seimbang. Hal inilah yang membuat munculnya "krisis Nopember". Dalam kondisi inilah beberapa anggota SDAP, di antaranya Cramer, membawa masalah ini ke Hindia Belanda, dan melalui para mitranya di *Volksraad*, yaitu *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV), mereka mengajukan usulan agar sistem ketatanegaraan di Hindia dirubah.<sup>23</sup> Dengan maksud agar usulnya lebih berbobot, maka SDAP dan ISDV, bekerjasama dengan wakil-wakil kaum Bumiputera, mereka membentuk fraksi *Radical Concentratie*.

Selain bekerjasama di badan *Volksraad*, mereka mengadakan kerjasama dengan beberapa partai kebangsaan seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, Pasundan, Insulinde dan ISDV sendiri. Badan ini dapat dikatakan didominasi oleh Sarekat Islam. HOS.Tjokroaminoto, Abdul Muis, dan H. Agus Salim masing-masing duduk sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris. Tiga orang anggota lainnya berasal dari Budi Utomo, Pasundan, dan SI.

NIC ketiga yang berlangsung pada tanggal 29 September sampai tanggal 6 Oktober 1918, yang dikunjungi oleh 87 SI lokal dengan jumlah anggota sekitar 450.000 orang. Kongres menuntut dihilangkannya kerja rodi dan jenis kerja paksa lainnya, menuntut turunnya pajak, memperluas pengajaran rakyat, menghapuskan tanah partikelir untuk kepentingan rakyat jelata.

Hampir bersamaan dengan proses terbentuknya *Volksraad*, kegiatan politis lainnya yang melibatkan Sarekat Islam adalah masalah Ketahanan Hindia (*Indië Weerbaar*) yang dikenal pula dengan kasus Milisi Bumiputera. Inisiatif tentang pembentukan milisi Bumiputera ini sebenarnya berasal dari para pengusaha Belanda yang merasa khawatir dengan kemungkinan meluasnya Perang Dunia di Eropa sampai ke wilayah kepulauan Indonesia. Jika hal itu sampai terjadi berarti kekayaan mereka, baik yang berupa uang tunai maupun yang berupa perkebunan dan barang niaga lainnya akan hancur atau musnah. Ide ini kemudian disampaikan kepada orang-orang Budi Utomo yang kemudian disampaikan pula kepada orang-orang Sarekat Islam. Pimpinan Sarekat Islam waktu itu melihat aspek positifnya jika diadakan milisi Bumiputera, yaitu melatih orang-orang Bumiputera dalam bidang angkatan perang yang mungkin akan berguna kelak.

Meskipun demikian, menurut pihak SI, karena ini menyangkut hak rakyat, maka mereka perlu juga didengar pendapatnya. Untuk mendengar pendapat itu perlu dibentuk sebuah "parlemen" atau "Dewan Rakyat". Hal ini tercermin dari beberapa mosi Sarekat Islam yang disampaikan pada tanggal 8 September 1916 sebagai berikut:

"...ketahanan Indonesia hanya dapat direalisasikan dengan "menghilangkan kasakitan hati" rakyat yang disebabkan oleh itu : Rupa-rupa perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan atas mereka itu baik oleh beberapa ambtenaar (pejabat), maupun oleh beberapa orang particulier (swasta) bangsa Eropa ... lantaran begitu sering sekali orang-orang bangsa Eropa anggap rendah dan hina kepada orang-orang Bumiputera...lantaran dari begitu amat kurangnya keyakinan hukum (*rechtszekerheid*), sehingga rakyat Bumiputera pada umumnya merasa kurang dilindungi oleh wet.

Mosi itu juga mengemukakan pendapat bahwa lembaga perwakilan di Indonesia yang dipilih oleh orang-orang Indonesia sendiri hendaklah dipercayakan untuk menghadapi ketahanan Hindia.<sup>24</sup>

Oleh karena itulah, tuntutan Sarekat Islam dan Budi Utomo kemudian bukan hanya meminta agar pemerintah Belanda atau Hindia Belanda untuk membentuk “Milisi Bumiputera” saja, melainkan juga menuntut dibentuknya Dewan Rakyat. Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, yaitu Limburg Stirum, tidak bisa begitu saja menjawab tuntutan itu. Namun dia berjanji untuk menyampaikannya kepada Ratu Belanda. Kesediaan Gubernur Jenderal ini sering disebut sebagai “Janji Limburg Stirum”.

Di samping itu, Sarekat Islam juga mengirimkan wakilnya ke negeri Belanda yaitu Abdul Muis dan Dwijosewoyo yang disertai dengan instruksi khusus. Instruksi itu adalah meminta agar pemerintah Belanda :

Meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, pertanian, kerajinan, dan perdagangan dengan meluaskan pengajaran “vakonderwijs” (pendidikan kejuruan), memajukan peraturan “credietwezen” (perkreditan) dan perserikatan “cooperatie”...meluaskan peraturan “imigratie” ...menegakkan pekerjaan buruh yang dilakukan oleh beberapa Kepala Desa dan satu dua ambtenaar Bumiputera ... mengubah ketentuan-ketentuan “wet” ... terutama “grondhuur ordonantie” (peraturan sewa tanah).<sup>25</sup>

Selain itu Sarekat Islam mengusulkan agar “pengajaran Bumiputera diluaskan dan dimajukan dengan tegas”, dan “agar supaya orang-orang Bumiputera dengan orang-orang Eropa itu sama sejajar adanya bagi wet”.<sup>26</sup>

Seperti telah disinggung di atas, meskipun beberapa anggota SI duduk sebagai anggota *Volksraad*, tidak berarti organisasi ini menjadi partai yang kompromis dengan pemerintah Kolonialis Belanda. SI masih tetap aktif

memperjuangkan permasalahan yang muncul di kalangan rakyat Pribumi, misalnya masalah kaum buruh. Pada tanggal 15 Desember 1919 Sarekat Islam mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh Hindia (PPKB). Pimpinan organisasi ini adalah Sujopranoto yang juga duduk sebagai Wakil Ketua pada Central Sarekat Islam yang diputuskan dalam Kongres SI di Surabaya.

Memasuki dasawarsa 1920-an, di tubuh SI terjadi perpecahan antara kelompok yang ingin tetap mempertahankan garis keislamannya dalam perjuangan SI dan yang ingin memasukkan ideologi sosialis sebagai landasan perjuangan. Pertentangan ini akhirnya menyebabkan SI terpecah dua menjadi SI merah yang dipengaruhi Sosialis/Marxisme dan SI hijau/putih yang tetap mempertahankan garis keislaman. Pada NIC keenam pada bulan Maret 1921 di Yogyakarta, Sarekat Islam (SI) memutuskan untuk mengubah dirinya menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Kemudian pada tahun 1924, PSI memutuskan "Pokok Berhijrah", yaitu menempuh garis politik non-kooperatif dengan Pemerintah Belanda. Sebagai konsekuensinya, PSI tidak lagi mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga *Volksraad*.

Dalam upaya menggalang dukungan masyarakat internasional bagi perjuangan bangsa Indonesia, PSI giat melakukan hubungan dengan organisasi atau negara Islam di luar Hindia Belanda. Dalam Al-Islam Kongres Gabungan yang dilangsungkan di Yogyakarta tahun 1925, PSI memutuskan mengirim Tjokroaminoto dan Haji Mas Mansyur dari Muhammadiyah untuk menghadiri Muktamar "Alamil Islami" di Mekah yang membentuk cabangnya di Indonesia dengan nama MAIHIS. Pada perkembangan selanjutnya berdiri Majelis Kerjasama Alim Ulama yang menjalin hubungan dengan "Liga Melawan Imperialisme dan Kapitalisme" di Luar Negeri, dan memutuskan terus berjuang menuju Indonesia merdeka.

Dalam Kongresnya yang diadakan tahun 1931, PSI berubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Para pemimpin yang aktif dalam PSII adalah H. Samanhudi, HOS Tjokroaminoto, DR. Sukiman Wirjosandjojo, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Aruji Kartawinata, Syeh Marhaban, CH. Ibrahim, Harsono Tjokroaminoto, dan lain-lain.<sup>27</sup>

Di Sumatera Barat, para alim ulama membentuk satu organisasi yang diberi nama Persatuan Muslimin Indonesia (PERMI). Organisasi ini merupakan hasil reorganisasi dari Sumatera Thawalib. Semula organisasi ini bergerak di bidang sosial. Sejak tahun 1932 berubah menjadi organisasi politik yang mengambil garis non-kooperatif seperti halnya PSI. Aktivitas organisasi ini tidak hanya bergerak di wilayah Sumatera Barat saja, melainkan juga di luar daerah tersebut, seperti di daerah Tapanuli, Bengkulu, dan Palembang. Oleh karena aktivitasnya itu yang dianggap membahayakan *rust en orde* di wilayah itu, pemerintah Hindia Belanda menangkan pimpinan PERMI, antara lain Mukhtar Lutfi. Karena sesuatu sebab, pada tanggal 18 Oktober 1937, secara resmi PERMI dibubarkan.

Telah disinggung dalam "Pendahuluan", peranan ulama di daerah Aceh demikian besar di kalangan masyarakat. Selain itu, ada satu kondisi politis yang cukup khas di daerah ini jika dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi ini sebenarnya merupakan dampak logis dari satu kebijaksanaan yang telah diterapkan pemerintah Hindia Belanda. Ketika Perang Aceh masih berlangsung, pemerintah Hindia Belanda sudah melihat adanya celah-celah yang menguntungkannya, yaitu kedudukan para *uleebalang* sebagai penguasa daerah yang cukup ditaati oleh masyarakat di daerah bersangkutan. Oleh karena itu mereka mulai didekati. Misalnya pada tahun 1874 mereka disodori satu perjanjian bahwa mereka akan tetap pada kedudukannya dan jabatannya, namun mengakui supremasi Belanda (Hindia Belanda). Kemudian pada tahun 1898 pemerintah Hindia Belanda memaksa para *uleebalang* yang telah dipengaruhinya itu untuk "menyetujui" bahwa wilayahnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hindia Belanda dan menganggap musuh Belanda sebagai musuh mereka pula<sup>28</sup>

Dalam bab sebelumnya telah disinggung bahwa Tuanku Mahmud Bangta Keucek telah mengajukan pandangannya tentang "Perang Aceh Baru". Kebijakan ini sedikit banyak membawa keuntungan pula kepada pihak Belanda yang sedang "membujuk" para pemangku adat seperti para *uleebalang*. Bagi para *uleebalang* yang pada dasarnya ingin bekerjasama dengan

Belanda, fatwa perjuangan seperti yang dikemukakan Tuanku Mahmud Bangta Keucek ini dapat dijadikan alasan mengapa mereka mau berdamai (menyerah) dengan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan bagi para ulama dan sebagian *uleebalang* fatwa seperti itu mendorong mereka memikirkan cara lain dalam meneruskan peperangan melawan Belanda, yaitu berjuang melalui partai politik. Oleh karena itu sewaktu Syarikat Islam (SI) sampai ke daerah Aceh, maka banyak para ulama Aceh masuk ke dalam organisasi ini. Dengan cepat SI berdiri di dayah-dayah. Bahkan pada tahun 1925/25 di daerah Bakongan terjadi pemberontakan yang melibatkan sejumlah tokoh SI. Beberapa tokohnya ditangkap Belanda, baik yang berasal dari kalangan ulama maupun *uleebalang*, seperti Teungku Haji Abdulmanaf, Teuku Raja Bujang, Teuku Cik Muhammad Said dibuang ke luar Aceh, antara lain ke Digul dan Manado. Akibatnya, sejak tahun 1926 kegiatan SI di Aceh dilarang oleh pemerintah Hindia Belanda.

Para ulama Aceh menyadari bahwa salah satu kelemahan yang cukup menonjol di kalangan ummat Islam Aceh pada khususnya adalah dalam hal ilmu pengetahuan. Apalagi setelah pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat di wilayah ini, yang dianggap mulai mengikis akidah masyarakat Islam setempat. Oleh karena itu sektor pendidikan harus mendapat perhatian. Mereka melihat bahwa orang-orang Aceh yang datang ke *meunasah*, khusus kaula mudanya, makin lama makin sedikit. Hal inilah yang mendorong para ulama Aceh melakukan gerakan reformasi Islam. Faktor-faktor semacam itu, termasuk larangan beroperasinya SI di Aceh, yang akhirnya mendorong para ulama mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Secara resmi oranganisasi ini didirikan pada tanggal 5 Mei 1939.<sup>29</sup> Pusat gerakan PUSA berada di kota Sigli di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai Ketua Umum dan Teuku Muhammad Amin sebagai Sekretaris Umum. Dari susunan kempemimpinan itu terlihat sebenarnya sudah ada usaha kerjasama antara para ulama Aceh dengan para bangsawan atau *uleebalang* yang berjiwa nasionalis. Selain

Teuku Muhammad Amin, tokoh lainnya dari kelompok uleebalang yang cukup terkenal di kalangan pemuda, termasuk pemuda PUSA adalah Teuku Nyak Arief.

Setelah pecah Perang Asia Timur Raya dengan serangan Jepang ke pelabuhan Pearl Harbour, Hawaii, para pemimpin PUSA berpendapat bahwa lambat laun Jepang pasti akan menyerang wilayah Nusantara termasuk Aceh. Atas dasar perhitungan itu maka menurut para pemimpin PUSA waktu itu, ada baiknya PUSA menjalin kerjasama dengan pihak Jepang. Namun merekapun yakin bahwa Jepang kemungkinan akan kalah sehingga harus diperhitungkan pula guna melawan Belanda kelak.<sup>30</sup> Untuk kepentingan itu maka dibentuklah gerakan bawah tanah yang diberi nama "Gerakan Fajar" (Gerakan F) yang dipimpin oleh A. Hasjmy dan Ahmad Abdullah. Kedua pemimpin ini merupakan guru pada Perguruan Islam Seulimeum. Gerakan F ini mendapat pengawasan langsung dari dua ulama besar waktu itu, yaitu Teungku Haji Abdulwahad Sulimeum dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indapuri.<sup>31</sup>

Di bawah kedua pimpinan A. Hasjmy dan Ahmad Abdullah itulah Gerakan F melakukan sabotase terhadap berbagai kepentingan Belanda di Aceh. Gerakan ini semakin kuat sewaktu PUSA mengadakan kontak dengan Mayor Fujiwara di Kedah, yang menghasilkan dibentuknya "Fujiwara Kikan" yang disingkat menjadi Gerakan F sama seperti Gerakan Fajar. Sejak awal 1942, kondisi di daerah Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Barat/Selatan menjadi tidak aman bagi Belanda. Beberapa penyerangan dilakukan Geraka F misalnya di Seulimeun pada tanggal 19 dan 20 Februari 1942 yang membawa korban matinya J.C. Tiggelman, kepala pemerintahan di daerah itu. Kemudian penyerangan terjadi di daerah Keumire yang membawa korban matinya Graaf U. Bernsorf, Kepala Eksploitasi Kereta Api Aceh.<sup>32</sup>

Ada satu catatan penting dalam perkembangan gerakan pembaruan Islam dan perkembangan organisasi Islam waktu itu, yaitu peran para alim ulama tradisional yang ternyata tidak begitu saja dapat "disingkirkan". jika dilihat secara sekilas,

seolah-olah para alim ulama tradisional itu tidak mempunyai peran apa-apa. Kedudukan mereka seakan-akan lenyap tertelan putaran zaman dengan munculnya berbagai organisasi Islam modern. Seperti telah disinggung di atas, ternyata suksesnya beberapa organisasi Islam modern itu tidak lepas dari peranan para alim ulama tradisional. Sarekat Islam atau PSI misalnya, berhasil menarik banyak pengikut untuk menjadi anggotanya, atau mendirikan cabang-cabangnya adalah karena bantuan para alim ulama tradisional yang cukup kharismatis di kalangan para santri dan masyarakat petani di pedesaan.

Selain ikut membantu organisasi Islam modern seperti SI, beberapa tokoh alim ulama tradisional seperti kyai-kyai di Jawa Barat juga mendirikan organisasi sejenis, khususnya yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Bahkan organisasi bentukan mereka ada yang dianggap cukup militan dan dianggap membahayakan kewibawaan pemerintah Belanda sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Organisasi itu adalah *Al-Ittihadiyahul Islamiyyah* (AII) yang didirikan pada tahun 1931 oleh Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi. Menurut Bupati Bandung waktu itu, yaitu Raden Adipati Wiranatakusuma, di wilayah Priangan, khususnya di wilayah Priangan Barat, tidak ada lagi organisasi Islam reformis (dia mengkatagorikan AII sebagai organisasi Islam reformis seperti Muhammadiyah dan Persis) yang demikian militan dan besar pengaruhnya selain AII.<sup>33</sup>

Demikian besarnya pengaruh AII sehingga dalam beberapa kongres terbukanya di akhir tahun 1930-an, banyak pihak luar yang mengusulkan agar AII dijadikan partai politik seperti PSII atau Gerindo. Namun usul itu ditolak oleh pimpinan AII. Menurut Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi selaku Ketua Pengurus Besar AII waktu itu mengatakan bahwa pada saat itu sudah cukup banyak partai politik. Jadi jika siapa saja, termasuk anggota dan simpatisan AII, dapat menyalurkan aspirasinya melalui partai-partai, baik yang Islam maupun yang nasional. Kemudian terbukti, banyak anggota AII yang menjadi anggota PSII, Gerindo maupun Partindo. Jadi jika AII diubah menjadi partai politik, maka akibatnya bukan memperkuat partai-partai Islam yang ada, melainkan akan memperburuk suasana, bahkan akan memecah belah para anggota AII sendiri, yang sudah

terlanjur menyalurkan hasrat politiknya pada partai-partai yang masih ada.<sup>34</sup>

Meskipun pada dekade 1920-an sampai pertengahan 1930-an AII terkenal sebagai organisasi tradisional yang paling sering berdebat melawan kaum reformis, terutama melawan orang-orang Persis, Bandung. Namun sewaktu kaum politisi Islam membutuhkan dukungan untuk bersatu, justru mereka cepat menyambut ajakan itu. Bahkan mereka tidak kepalang tanggung akan membubarkan organisasinya jika ada satu partai Muslimin yang dapat menyatukan ummat Islam Indonesia Sebagai bukti para tokoh AII ikut mendukung gagasan Kyai Haji Mas Mansur dan Kyai Haji Ahmad Dahlan untuk membentuk satu organisasi yang menyatukan seluruh ummat Islam, yaitu *Majlis Islam A'la Indonesia* (MIAI).

Pada masa pendudukan Jepang, hampir semua organisasi kebangsaan dibubarkan, termasuk AII pimpinan Kyai Haji Ajengan Ahmad Sanusi dan Persyarikatan Ulama pimpinan Kyai Haji Ajengan Abdulhalim dari Majalengka. Akan tetapi kedua kyai ini kemudian berhasil meyakinkan pemerintah Pendudukan Jepang, untuk mengizinkan berdirinya kembali kedua organisasi mereka. Menurut Benda keberhasilan kedua ajengan ini memaksa Jepang untuk mengizinkan kembali kedua organisasi itu berdiri, menunjukkan betapa pentingnya kedua tokoh itu di mata pemerintah pendudukan Jepang, sekaligus menunjukkan betapa cerdasnya kedua alim ulama tradisional itu.

Seperti telah banyak diungkapkan, pemerintah pendudukan militer Jepang di pulau Jawa tetap membiarkan beberapa organisasi Islam tetap berdiri, antara lain MIAI. Demikian pula di Aceh, untuk sementara waktu pemerintah pendudukan militer Jepang di daerah ini, juga tetap membiarkan PUSA tetap berdiri. Agar mendapat dukungan masyarakat Aceh, pemerintah pendudukan Jepang mengadakan kesepakatan dengan para ulama dengan membentuk Majelis Agama Islam Buat Kebaktian Asia Timur Raya (MAIBKATRA). Pengurus MAIBKATRA ini terdiri dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, PUSA dan ulama kaum tua atau tradisional. Namun dapat dikatakan lembaga ini didominasi oleh ulama berpengaruh dari PUSA.

Walaupun para ulama banyak bekerjasama dengan pemerintahan pendudukan Jepang, namun mereka dapat menarik hati rakyat dengan cara membantunya dalam perbaikan mesjid-mesjid dan *meunasah*, serta membantu pembiayaan orang-orang miskin dalam berbuka puasa di Mesjid Raya pada bulan Ramadhan, dll.<sup>35</sup>

Sewaktu pemerintah pendudukan Jepang memutuskan untuk mendirikan tentara Pembela Tanah Air (PETA), prioritas pertama yang dipertimbangkan untuk menduduki pimpinan atau komandannya adalah para tokoh alim ulama Islam, khususnya para kyai pemimpin pesantren, atau guru agama yang cukup dikenal namanya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kebanyakan jabatan *Daidancho* dipegang oleh alim ulama atau guru sekolah agama. Di wilayah Banten yang menjadi *Daidancho* adalah Kyai Haji Ajengan Syam'un dari pesantren Citangkil, Banten. Dari daerah Bogor dan Priangan yang menjadi *Daidanco* adalah Kyai Haji Ajengan Muhammad (Acun) Basyuni dari pesantren Cipoho, Sukabumi; dan Kyaji Haji Ajengan Dasuki, dan dari Banyumas adalah Sudirman, salah seorang guru dari perguruan Muhammadiyah yang kemudian terkenal dengan sebutan Panglima Besar Jenderal Sudirman.

Demikian pula sewaktu rencana pembentukan negara Indonesia mulai dibicarakan. Tidak sedikit tokoh alim ulama yang ikut berpartisipasi aktif di dalamnya. Salah satu sumbangan para alim ulama yang sekaligus juga pengorbanan ummat Islam Indonesia pada umumnya, yaitu dalam masalah sila kesatu yang tertera dalam Piagam Jakarta.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta ditandatangani oleh para pemimpin Indonesia, antara lain adalah Sukarno, Hatta, Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Mujakir, dan H. Agus Salim. Dalam Piagam itu ada kalimat yang menimbulkan kekhawatiran pihak kebangsaan maupun agama non-Islam. Kalimat itu adalah sila pertama dari Pancasila yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban bagi ummat Islam untuk menjalankan syariatnya" Dengan berbesar hati akhinya para pemimpin Islam menghapuskan kalimat "...dengan

kewajiban bagi ummat Islam untuk menjalankan syariatnya”, sehingga akhirnya jadilah bentuk Pancasila seperti yang sekarang ini.

Akhirnya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sesuai dengan isi teks proklamasi, pemerintah baru Indonesia berusaha untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun karena keterbatasan sarana dan prasarana, ditambah lagi dengan sikap Jepang yang harus tunduk kepada keputusan Sekutu, maka proses pemindahan kekuasaan itu tidak bisa berjalan secara seksama. Akibatnya, muncul penafsiran-penafsiran tersendiri atas pemindahan kekuasaan itu.

Di beberapa daerah muncul aksi-aksi daulat, yang banyak di antaranya memakan korban yang berasal dari kaum pergerakan nasional sendiri. Mulai dari wilayah Aceh, seperti di daerah Cumbok, kemudian di daerah Sumatera Timur yang salah satu korbannya adalah Amir Hamzah, sorang seniman, tokoh Pujangga Baru, di Banten dengan aksi Ce Mamat, di Tangerang di bawah pimpinan Achmad Chaerun sampai ke Jawa Tengah. Dalam peristiwa-peristiwa itulah antara lain pengaruh dan kharisma seorang kyai atau ulama ikut memainkan perannya baik sebagai pendamai ataupun sebagai pembuat kerusuhan itu sendiri, atau dalam tahun 2000 terkenal dengan istilah provokator.

### **Catatan**

- 1 Sartono Kartodirdjo. *Protest Movement in Rural Java*. Kualalumpur: Oxford University Press.
- 2 Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pusataka Jaya, 1980.
- 3 Mohammad Iskandar, *Ciomas 1886: Suatu Pemberontakan Petani di Tanah Partikelir*. (Skripsi Sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1982).
- 4 Onghokham, *ulung Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik Beberapa Aspek Politik Desa di Madiun pada Abad ke-19*", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia (MISI)*. No.1, Jilid VII, 1977.
- 5 Mohammad Iskandar, "Pemberontakan Kaum Priyayi Tahun 1893 di Kabupaten Bandung" (Makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV, Yogyakarta, Desember 1985).
- 6 Clifford Geertz, *Islam yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Terjemahan oleh: Hasan Basari. Jakarta: yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1982.
- 7 Kuntowijoyo, "Perang Paderi", *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (ed.). Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973, h. 87-120.

- 8 Beberapa catatan mengenai Pangeran Dipenogoro dalam kaitannya dengan Santri dapat dilihat dari artikel karya Peter Carey, "Satria and Santri, Some Notes on the Relationship Between Dipanagara's Kraton and Religious Supporters During The Java War (1825-1830)", *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. T. Ibrahim Alfian dkk (peny.) Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987, h. 271-318.
- 9 Studi kasus yang paling baik mengenai pemberontakan petani Banten adalah karya Sartono Kartodirdjo, *Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1966.
- 10 Lihat Marwati Djoened Poeponogoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1984, bab.IV.
- 11 Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- 12 Lihat Aswab Mahasin (ed.) *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- 13 Dari kalangan SI dan simpatisannya, banyak yang berpendapat bahwa tahun didirikannya organisasi ini adalah tahun 1905. Artinya organisasi ini lebih tua dari Boedi Oetomo. Oleh karena itu menurut kalangan ini, seharusnya Hari Kebangkitan Nasional dikaitkan dengan tanggal berdirinya Sarekat Islam bukan Boedi Oetomo. Lihat Deliar Noer, *Op.cit.*
- 14 A.P.E. Korver, *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?*. Lampiran I.
- 15 *I b i d.* Lampiran II.
- 16 Amelz, *HOS Tjokroaminoto, Hidup dan Perdjuangannya*. Djakarta: Bulan Bintang, 1962 h.95-96.; *Fadjar Asia*, 23 Djanuari 1929,

- 17 A.P. E. Korver, *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers, 1985.
- 18 *Sarekat Islam Congres (1e National Congres) 20 – 27 Oktober 1917*. Djakarta: Landsdrukkerij, 1919. h.2.
- 19 *Neratja*, 22 Oktober 1917.; *Sarekat Islam Congres (1e National Congres)*. h.4-5.
- 20 *I b i d.*
- 21 *Sarekat Islam Congres (2d National Congres)*. h. 3-4.
- 22 Menjelang berakhirnya Perang Dunia I, kaum Sosialis Jerman menuntut agar sistem pemerintahan Jerman diubah menjadi republik yang lebih demokratis. Tuntutan itu ternyata mendapat dukungan yang cukup luas di Parlemen Jerman, sehingga Kaisar Willem II terpaksa harus meletakkan jabatan dan melarikan diri ke negeri Belanda. Perginya kaisar Willem II ke negeri Belanda sekaligus pula mengakhiri Perang Dunia I yang telah berjalan hampir lima tahun. Kemenangan kaum Sosialis Jerman ini ternyata mengilhami para pimpinan SDAP untuk melakukan hal yang sama di negeri Belanda.
- 23 Djodi Gondhokusumo dan Amelz, *Parlemen Indonesia*. Djakarta: Bulan Bintang, 1951, h. 6-7.
- 24 *Neratja*. 17 September 1917.
- 25 *I b i d.*
- 26 *I b i d.*
- 27 Endang Saefuddin Ansari. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka Salman-ITB, 1983.
- 28 Nazaruddin Syamsuddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafitipers, 1990. H.17.
- 29 C. Van Dijk. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafitipers, 1983, h. 256.

- 30 A. Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987. h.55.
- 31 *I b i d.*
- 32 *I b i d.* h. 56-57.
- 33 Lihat Mohammad Iskandar. *op.cit.*
- 34 Mohammad Iskandar, *Op.cit.*
- 35 Masyhur Amin, *Op.cit.* h.35.

## BAB IV

### DALAM KANCAH REVOLUSI KEMERDEKAAN

#### *4.1 Masa Transisi*

Meskipun penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sering mendapat rintangan dari pihak Jepang yang mendapat tugas dari pihak Sekutu untuk menjaga *status quo*; namun berita itu dapat disiarkan bukan saja di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Siaran ke luar negeri antara lain justru disiarkan melalui pemancar radio yang *nota bene* berada di bawah pengawasan Jepang, yaitu *Jakarta Hosu Kyoku*.

Di dalam negeri, berita proklamasi kemerdekaan itu, selain disiarkan melalui pemancar radio, juga disebarluaskan melalui persuratkabaran, terutama dalam buletin berita *Domei*. Selain itu juga disebarluaskan secara lisan, dari mulut ke mulut, termasuk dari tokoh-tokoh Republik Indonesia (RI) yang sengaja diutus pemerintah Pusat untuk mengabarkan berita itu ke daerah-daerah. Akan tetapi, karena kurangnya sarana serta prasarana, ditambah pula dengan adanya sikap Jepang seperti yang telah disebutkan di atas, maka berita itu sampainya ke tiap daerah sangat bervariasi. Di daerah Serang, Banten misalnya, berita itu baru sampai sehari setelah dibacakan. Padahal di daerah Sumatera Barat, berita itu telah didengar oleh para pimpinan setempat sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 17 Agustus, malam harinya. Sedangkan ke daerah Sumatera

Utara, termasuk wilayah yang sekarang disebut Daerah Istimewa Aceh, berita itu datang lebih lambat lagi. Oleh karena itu, para bangsawan yang *nota bene* pernah menjadi aparatur pemerintahan di masa Kolonialis Belanda, serta mendapat banyak keuntungan darinya, masih sempat membentuk sebuah komite penyambutan kedatangan “bekas majikannya”. Selain itu, keterlambatan itu dihubungkan dengan munculnya isu-isu politik yang cukup terbuka untuk ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para pelaku politik.

Situasi yang tak menentu itu kemudian telah mendorong munculnya berbagai gerakan sosial dan politik yang tidak terkontrol oleh pemerintah Pusat. Bahkan beberapa di antaranya ada yang melakukan tindakan-tindakan yang justru tidak sejalan dengan garis perjuangan yang ditentukan pemerintah Pusat. Tidak sedikit bekas aktivis pergerakan kebangsaan di tingkat lokal, atau mantan aktivis tingkat nasional yang bergerak di tingkat lokal yang kemudian mengendalikan situasi di daerah-daerah kekuasaannya. Tanpa harus bertanya atau meminta pengarahannya dari pusat, tokoh-tokoh daerah ini langsung mengambil alih kekuasaan dari para pejabat lama (di beberapa daerah disebut sebagai “aksi daulat”) yang dinilainya sebagai bekas kaki tangan penjajah. Beberapa karya, baik yang ditulis oleh orang Indonesia maupun oleh orang asing, telah mengungkapkan adanya peristiwa seperti itu. George Mc T. kahin dalam karyanya tentang revolusi dan nasionalisme Indonesia, yaitu *Nationalism and Revolution in Indonesia*, menyinggung tentang beberapa gerakan sosial yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, tak lama setelah didengungkannya proklamasi kemerdekaan. Khususnya dia mengungkapkan tentang gerakan sosial yang terjadi di wilayah Sumatera Timur yang membawa korban yang tidak sedikit, termasuk di antara tokoh nasional Indonesia sendiri. Kemudian Benedict R.O.G. Anderson dalam karyanya *Java In A Time of Revolution*, menyinggung pula tentang “revolusi sosial” di beberapa daerah di pulau Jawa, seperti di Banten, Jakarta, dan di tiga daerah di Jawa Tengan. Revolusi sosial di tiga daerah ini kemudian menjadi bahan kajian khusus Anton Lucas dalam karyanya yang berjudul “Revolusi di Tiga Daerah. Barangkali

kita perlu juga menyebutkan karya A.H. Nasution, "Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia" yang ditulisnya dalam 12 jilid. Dalam jilid kedua, secara khusus dia membahas "revolusi sosial" di daerah-daerah yang telah disinggung di atas.

Tentu saja situasi yang tidak menentu itu bisa saja disebut sebagai masa transisi, yang kadarnya di setiap daerah cukup beragam, sangat menarik untuk dikaji. Akan tetapi karena tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk menyoroti peranan para elit agama, maka yang akan menjadi sorotan dalam penulisan itu adalah keterlibatan para elit agama tersebut. Dalam kesempatan ini, dua daerah yang menjadi tempat terjadinya "revolusi sosial" itu akan diambil sebagai bahan studi kasus, yaitu daerah Banten dan Aceh (khususnya Cumbok).

#### ***4.2. Daerah Keresidenan Banten***

Berita tentang proklamasi kemerdekaan sampai ke daerah Banten dibawa oleh para pemuda API yang berada di bawah pengaruh Khaerul Saleh, seperti Pandu Kartawiguna, Ibnu Parna, Abdul Muluk, dan Aziz. Tokoh-tokoh yang pertama kali mereka datangi adalah para kyai yang dinilai cukup kharismatis di kalangan masyarakat setempat. Tokoh-tokoh itu antara lain: Kyai Haji Ahmad Khatib, dan Kyai Haji Syam'un. Di samping itu mereka juga bertemu dengan tokoh-tokoh pemuda, antara lain Ali Amangku dan Ayip Dzukari.<sup>1</sup>

Berita itu pun kemudian disampaikan kepada masyarakat, yang disambut dengan suka cita. Tak lama setelah itu pekik kemerdekaan mulai berkumandang mulai dari daerah perkotaan sampai ke pedesaan. Kibaran sang merah putih pun mulai bermunculan, sekaligus menunjukkan respon dan dukungan masyarakat Banten adanya bangsa Indonesia yang merdeka cukup besar.

Para pemuda API dari Jakarta itu juga menyampaikan pesan kepada para tokoh pemuda setempat pada khususnya, agar segera menyusun rencana pengambil alihan kekuasaan dari

tangan pemerintah pendudukan Jepang. Sesuai dengan anjuran itu, pada tanggal 22 Agustus 1945, seorang pemuda bernama Sri Sahuli dengan dibantu beberapa pemuda datang ke Hotel Vos, Serang dan menurunkan bendera Jepang yang berkibar di hotel tersebut. Keesokan harinya di beberapa kantor pemerintahan terjadi aksi penurunan bendera Jepang dan diganti dengan pengibaran bendera merah putih.<sup>2</sup>

Aksi para pemuda tersebut tidak berhenti hanya sampai di situ. Mereka berani bergerak melucuti dan merebut senjata api dari tangan tentara Jepang, baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Di samping itu mereka juga mulai mengambil alih pemerintahan sipil. Melihat tindakan-tindakan seperti itu, banyak orang-orang sipil Jepang yang merasa khawatir atas keselamatannya, sehingga mereka memutuskan untuk secepatnya melarikan diri menuju Jakarta. Ikut dalam pelarian itu adalah *Syucokan* Banten Yuki Yashii. Sebelum pergi, ia masih sempat menyerahkan kekuasaannya itu kepada wakilnya *Fuku Syucokan* Raden Tirtasujatna.

Satu hal yang perlu dikemukakan di sini, di daerah Banten waktu itu telah muncul semacam isu-isu rasialis dalam arti sempit. Waktu mulai muncul sentimen terhadap orang-orang yang berasal dari daerah Priangan (Sunda). Bahkan ada yang menyebutkan bahwa orang-orang Priangan telah menjadikan daerah Banten sebagai koloninya. Anggapan ini bertolak oleh satu kenyataan bahwa umumnya jabatan-jabatan dalam pemerintahan, baik semasa Kolonial Belanda maupun masa pemerintahan Fasis Jepang, selalu didominasi oleh orang-orang yang berasal dari Priangan. Adanya sentimen semacam ini tentu saja membuat para pejabat lama yang berasal dari Priangan merasa tidak nyaman. Akibatnya, seperti halnya orang-orang Jepang, banyak dari mereka yang memilih meninggalkan Banten daripada mengambil alih kekuasaan dari Jepang. Contohnya Raden Tirtasujatna yang telah disinggung di atas. Ia yang mendapat pelimpahan kekuasaan dari Yuki Yashii, memilih pergi ke Bogor daripada duduk sebagai *Syucokan* atau Residen baru.<sup>3</sup> Padahal waktu itu pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta telah mengangkatnya sebagai residen baru untuk

Keresidenan Banten, hampir bersamaan dengan pengangkatan gubernur baru untuk Jawa Barat, yaitu Raden Sutardjo Kartohadikusumo. Dengan kepergian Raden Tirtasujatna, maka kedudukan Residen Banten untuk sementara waktu menjadi kosong.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah Pusat seperti mengangkat Raden Tirtasujatna sebagai Residen Banten dan Raden Sutardjo Kartohadikusumo sebagai Gubernur Jawa Barat pada dasarnya merupakan tindakan pemerintah dalam rangka melaksanakan proses pemindahan kekuasaan dalam tempo sesingkat-singkatnya seperti yang tertera dalam teks proklamasi kemerdekaan. Pemerintah Pusat berusaha melengkapi struktur pemerintahannya dengan lembaga-lembaga yang sesuai dengan kondisi zamannya, yang sekaligus dapat dianggap sebagai cerminan dari adanya demokrasi di Indonesia. penegasan ini memang perlu waktu itu mengingat pemenang perang adalah negara-negara yang secara teori sangat menjunjung tinggi asas demokrasi dalam arti mendapat dukungan rakyat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia yang baru berdiri pun harus mampu menyelaraskan diri dengan tuntutan jaman jika ingin mendapat pengakuan dari dunia internasional. Hal ini berarti pemerintah Indonesia harus mampu memberi kesan positif bahwa kemerdekaan yang baru diproklamlirkan itu adalah kemauan rakyat dan bangsa Indonesia, bukan kemerdekaan hadiah dari Jepang, dan juga bukan hanya kehendak segelintir orang saja.<sup>4</sup>

Atas dasar itulah maka pada tanggal 22 Agustus 1945, pemerintah Pusat mengumumkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dilanjutkan dengan instruksi untuk membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) di setiap daerah. Lima hari kemudian pemerintah Pusat juga mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan seperti halnya KNID maka pemerintah juga menginstruksikan agar setiap daerah segera membentuk BKR. Tugas yang dibebankan kepada kedua lembaga ini adalah untuk membantu pemerintah, terutama dalam menangani masalah ekonomi-politik dan militer.<sup>5</sup> Pembentukan KNID dan BKR itu tidak terbatas hanya sampai tingkat provinsi saja, melainkan sampai tingkat kabupaten.

Di Banten pembentukan KNID dan BKR tidak bisa terlaksana secara cepat. Sebab, seperti telah disinggung di atas, Residen Banten yang baru diangkat justru tidak ada di tempat alias telah melarikan diri ke Bogor. Satu-satunya pejabat pemerintah yang masih tinggal di Banten adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang pada waktu itu menjabat sebagai bupati Serang. Namun pejabat inipun tidak mempunyai keberanian untuk mengambil inisiatif mengingat dirinya juga berasal dari Priangan. Akibatnya, di daeran Keresidenan Banten waktu itu praktis tidak ada pimpinan formal yang mengatur pemerintahan. Hal ini terasa terutama pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 1945. Keamanan dapat dikatakan sangat sulit dikendalikan. Isu-isu "SARA" yang ada sebelumnya muncul begitu saja sebagai suatu permasalahan yang ramai dibicarakan, yang akhirnya mendorong beberapa kelompok masyarakat bertindak beringas dan main hakim sendiri terhadap kelompok lain yang dicap sebagai antek penjajah.

Dalam situasi seperti itu para pemuda yang tergabung dalam beberapa badan-badan perjuangan tampil sebagai kelompok yang berinisiatif untuk menjaga keamanan. Bagi para pemuda waktu itu, langkah-langkah prioritas yang harus segera dilakukan adalah mengatasi keadaan yang menjurus ke arah yang *chaos*. Adapun masalah pertanggungjawaban atas tindakan mereka dianggap nomor dua. Salah satu kelompok yang cukup berpengaruh adalah kelompok API di bawah pimpinan Ali Amangku. Di bawah pimpinannya para pemuda mengadakan rapat koordinasi se kabupaten Serang, dengan topik pembicaraan adalah pemulihan keamanan di kabupaten Serang dan sekitarnya. Tokoh-tokoh API lainnya yang cukup dikenal masyarakat waktu itu ialah : Sri Sahuli yang duduk sebagai ketua bagian API puteri, Mahidi, Ahmad Mujimi, M. Basri, Nelli, Sutinah, Sufiah, dan Emi.<sup>6</sup>

Rapat koordinasi itu diadakan pada bulan September 1945 dengan mengambil tempat di rumah Zulkarnaen Suryakertalegawa, yang lekatnya tidak jauh dari Rumah Sakit Umum Serang. Dua tokoh alim ulama yang cukup berpengaruh di Keresidenan Banten, yaitu Kyai Haji Ahmad Khatib dan Kyai

Haji Syam'un juga diundang dalam pertemuan itu. Para pemuda mengundang kedua tokoh itu karena mereka mengharapkan dukungan dari kedua tokoh ini dan mengharapkan agar kedua tokoh tersebut mau memimpin mereka. Seperti telah disinggung pada awal tulisan ini, Kyai Haji Ahmad Khatib pernah menjadi Ketua Sarekat Islam Lokal, bahkan pernah terlibat dalam "Pemberontakan PKI" tahun 1926 sehingga dia dijatuhi hukuman dibuang ke Boven Digul.

Topik pembicaraan dalam rapat koordinasi itu. Pertama membicarakan masalah keamanan, Kedua masalah pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang, yang diputuskan akan dipimpin oleh Zulkarnaen Suryakertalegawa. Sedangkan masalah keamanan akan diserahkan kepada Kyai Haji Ahmad Khatib. Dan ketiga, adalah masalah organisasi pemuda yang kemudian diserahkan kepada Ali Amangku.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil rapat tersebut, para pemuda mendesak kepada pemerintah Pusat agar segera mengangkat Kyai Haji Ahmad Khatib sebagai Residen Banten yang pada waktu itu kosong ditinggalkan Raden Tirtasujatna. Adapun Kyai Haji Syam'un diminta mengatur masalah kemiliteran. Sebagai catatan, Kyai Haji Syam'un pernah duduk sebagai Daidanco dari Peta. Sewaktu BKR terbentuk di daerah ini, maka Kyai Haji Syam'un ditunjuk sebagai komandannya.

Dengan memperhatikan usulan yang datang dari Banten, akhirnya pada tanggal 10 September 1945, Presiden Soekarno secara resmi mengangkat Kyai Haji Ahmad Khatib sebagai Residen Banten. Hampir bersamaan dengan itu, diangkat pula para bupati untuk kabupaten Serang, Pandeglang, dan Lebak. Ketiga bupati itu adalah Raden Hilman Djajadiningrat untuk kabupaten Serang, Raden Jumhara untuk kabupaten Pandeglang, dan Raden Hardiwinangun sebagai bupati Lebak. Kemudian untuk ketua KNID adalah : Ce Mamat untuk kabupaten Serang, Moh. Ali untuk kabupaten Pandeglang, dan Jaya Rukmantara untuk kabupaten Lebak.<sup>8</sup>

Pada bulan September 1945, BKR Keresidenan Banten telah terbentuk. Para komandannya, umumnya merupakan mantan

anggota PETA dan API. Meskipun dari segi jumlah anggotanya cukup mengesankan, namun dari segi persenjataan, BKR waktu itu cukup memprihatinkan. Oleh karena itu, Kyai Haji Syam'un selaku komandannya berusaha mengadakan pendekatan kepada pimpinan tentara Jepang agar mau menyerahkan persenjataan mereka kepada pihak Republik. Rencana Kyai Haji Syam'un ini mendapat persetujuan dari Kyai Haji Ahmad Khatib selaku Residen Banten.

Perundingan akhirnya diadakan pada tanggal 4 Oktober 1945. Residen Banten juga hadir dalam perundingan itu. Dalam perundingan itu, pihak Jepang setuju dengan permintaan pihak Republik dan berjanji akan menyerahkan senjatanya. Sebaliknya pihak Jepang pun meminta jaminan keamanan dari pihak Republik. Sejalan dengan kesempatan itu, maka Ahmad Khatib selaku Residen Banten mengumumkan kepada semua warga Jepang untuk segera berkumpul di kota Serang, paling lambat tanggal 9 Oktober 1945. Menurut rencana waktu itu semua warga Jepang akan dipindahkan ke Jakarta dengan pengawalan dari BKR.

Pihak militer Jepang menyambut isi pengumuman itu. Pada tanggal 7 Oktober 1945, pasukan Marinir Jepang yang ditempatkan di Anyer serta pasukan Jepang yang bermarkas di Gorda, tiba dengan selamat di kota Serang. Akan tetapi insiden tidak sepenuhnya dapat dihindari. Sewaktu pasukan BKR datang menjemput pasukan Jepang yang ada di Sajira, Rangkasbitung, rombongannya dihadang oleh masyarakat yang mengaku barasal dari wilayah Warunggunung. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menyerang truk-truk yang mengangkut tentara Jepang dan langsung membunuhnya. Abdul Mukti dan Yudhi, dua pemuda yang mendapat tugas melakukan pengawalan waktu itu tidak mampu berbuat banyak, bahkan jiwa mereka pun ikut terancam sehingga keduanya terpaksa melarikan diri, dan melaporkan kejadian itu kepada pimpinan BKR di Serang.

Keesokan harinya mayat-mayat tentara Jepang yang menjadi korban penghadangan itu diangkut menuju pekuburan Cina di kapung Kaloran, Serang. Selanjutnya sisa tentara Jepang

yang berada di Rangkasbitung diangkut dan dikawal secara ketat oleh pemuda API yang dipimpin langsung oleh Ali Amangku. Rombongan itu akhirnya selamat tiba di kota Serang.<sup>9</sup>

Peristiwa di Warunggunung itu sangat mengecewakan, baik pihak Jepang maupun para pimpinan BKR Banten, khususnya Serang. Pimpinan BKR Serang menilai para pemuda Warunggunung telah bertindak ceroboh dan merugikan posisi pimpinan Republik di Banten. Sebab, pada waktu itu telah dicapai kesepakatan dengan pimpinan militer Jepang di wilayah keresiden Banten, bahwa pihak Jepang akan menyerahkan semua persenjataan mereka kepada pihak Indonesia di Banten. Oleh karena adanya peristiwa di Warunggunung tadi, maka pihak Jepang kemudian mengurungkan niatnya itu. Sebaliknya pihak Jepang justru memperkuat benteng yang mengelilingi markas tentaranya, antara lain dengan memasang barikade-barikade di jalan-jalan yang menuju markasnya.

Sikap dan tindakan pihak Jepang itu dilihat oleh pimpinan pemuda Banten, Ali Amangku sebagai tindakan menutup rapat jalan damai yang sebelumnya sempat terbuka. Pihak Jepang yang mempunyai persenjataan lengkap serta pengalaman perang yang cukup, dinilai memilih jalan konfrontasi daripada rela menyerahkan persenjataannya secara damai. Hal ini kemudian dilaporkan oleh Ali Amangku kepada Wakil Residen Banten, Zulkarnaen Suryakertalegawa. Setelah itu keduanya melaporkan kepada komandan BKR Banten Kyai Haji Syam'un.

Setelah mempelajari semua laporan tersebut, Kyai Haji Syam'un bersama-sama para tokoh pemuda mengambil keputusan untuk menyerang markas militer Jepang tersebut. Dan untuk mematangkan semua rencana itu, kemudian diadakan rapat dengan tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh masyarakat serta alim ulama dari berbagai daerah di lingkungan Keresidenan Banten, terutama yang berdekatan dengan markas Jepang tersebut, seperti dari daerah Ciomas, Ciruas, Pabuaran, Baros, Taktakan, Padarincang, Kramatwatu, dan Cilegon. Berdasarkan hasil perundingan maka diputuskan untuk melakukan serangan dari empat arah (sektor). Sektor utara

dipimpin oleh Iski (mantan *syudanco*). Sektor Timur dipimpin oleh Zaenal Falak (mantan *syudanco*). Sektor barat dipimpin oleh Nunung Bakri (mantan *syudanco*), dan sektor selatan dipimpin oleh Salim Ninong (mantan *syudanco*). Pasukan BKR bersama badan-badan perjuangan ini untuk sementara waktu berkumpul di luar kota Serang, yaitu di daerah kampung Dalung, Benggala, Kanjon, dan Lontar.

Dengan terlibatnya tokoh-tokoh masyarakat, terutama adanya dukungan dari para alim-ulama, maka banyak masyarakat di sekitar Serang yang datang memberikan bantuannya, terutama dalam hal makanan dan minuman. Bantuan itu antara lain juga datang dari warga keturunan Cina yang berada di Serang dan Labuan. Tokoh-tokohnya antara lain: Tan Cun alias Coa, Gwan Ti, dan Gwan Sing. dengan adanya bantuan itu, maka dapur umum pun dengan cepat terbentuk dan berfungsi.

Sebelum serangan itu dilancarkan, melalui para pemuda telah disampaikan agar masyarakat yang tinggal di sekitar markas Jepang untuk segera meninggalkan tempatnya. Anjuran ini dilakukan agar keselamatan mereka terjamin.

Setelah melalui perundingan yang cukup intensif, maka dicapai satu keputusan bahwa penyerangan terhadap markas Jepang itu akan dilakukan pada pukul 04.30 bertepatan dengan terdengarnya azan subuh yang bertepatan dengan dipadamkannya lampu-lampu di kota Serang (yang disepakati sebagai tanda dimulainya serangan).

Sesuai dengan yang telah direncanakan, serangan dimulai oleh pasukan dari sektor utara di bawah pimpinan Iski dan wakilnya Judhi (mantan *budancho*). Mereka mengambil posisi di perempatan jalan Kantin (sekarang Jalan Judhi). Sementara pasukan lainnya berfungsi sebagai pasukan pendukung dan pengepung. Pihak Jepang membalas serangan itu dengan tembakan gencar sehingga cukup membuat para pejuang tertahan untuk beberapa lama. Sekitar pukul 07.00 pagi tersebar berita bahwa komandan sektor barat, Nunung Bakri dan wakil komandan sektor utara Judhi telah gugur tertembak oleh pasukan Jepang.

Sampai hari menjadi gelap kembali, pihak republik tidak mampu merebut markas Jepang tersebut. Namun sekitar pukul 19.00 malam, tembakan-tembakan gencar dari markas Jepang tiba-tiba berhenti. Setelah ditunggu-tunggu tidak terdengar gerakan dari arah markas tersebut, sehingga lama kelamaan menimbulkan kecurigaan dari pihak republik. Oleh karena itu beberapa pemuda yang cukup berani bergerak mendekati markas Jepang tersebut. Ternyata di sana tidak terlihat satu pun serdadu Jepang. Ternyata markas itu telah kosong. Keadaan ini kemudian di laporkan kepada komandan BKR.

Setelah dipelajari pimpinan pasukan republik berkesimpulan bahwa tembakan-tembakan gencar yang dilancarkan pihak Jepang pada terakhir kalinya itu rupanya sekedar kamulfase, agar pasukan mereka mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Diduga pasukan Jepang meloloskan diri melalui sektor timur yang dianggap paling lemah oleh pasukan Jepang. Hal ini dapat dimengerti karena menurut pimpinan sektor timur sendiri, persenjataan di sektor ini sangat menyedihkan, yaitu hanya beberapa orang saja yang mempunyai senjata api. Dari sektor ini mereka dengan mudah meloloskan diri menuju ke Jakarta atau Bogor.

Perkiraan pihak republik ini didasarkan pada keterangan dari para pejuang yang berada di daerah Ciruas yang mengaku telah berjumpa dengan beberapa truk Jepang yang memuat banyak orang. Mereka tidak mencegatnya karena dari atas truk terdengar teriakan "merdeka", yang dibalas secara spontan oleh para pejuang dengan teriakan yang sama. Suasana yang gelap membuat para pejuang tidak mengenali orang-orang yang ada di atas truk tersebut. Mereka menganggap yang ada di atas truk-truk tersebut adalah para pejuang yang baru pulang dari pertempuran di kota Serang.

Setelah pasukan Jepang pergi meninggalkan kota Serang, ternyata kondisi keamanan wilayah Banten tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan. Isyu-isyu politis serta sentimen kedaerahan masih tetap ada, bahkan semakin muncul ke permukaan. Muhammad Mansyur yang lebih dikenal dengan panggilan Ce Mamat mulai mengungkit kembali masalah

kelayakan duduknya orang-orang yang dulu pernah menjadi aparaturnya kolonial Belanda dan Jepang dalam birokrasi pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka. Menurut pendapatnya, semua mantan pegawai pemerintah kolonial harus disingkirkan. Ia meminta kepada Kyai Haji Ahmad Khatib untuk segera mengganti semua anggota KNIP dengan para kyai dan alim-ulama.

Tentu saja tuntutan Ce Mamat sangat sulit untuk dipenuhi. Hal ini bukan karena dia harus tunduk kepada keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Pusat, melainkan juga karena adanya suatu kenyataan bahwa para tokoh alim ulama yang disebut-sebut oleh Ce Mamat itu umumnya tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman apa-apa dalam mengatur pemerintahan. Padahal pengetahuan dan pengalaman dalam bidang tersebut sangat diperlukan untuk mengatur roda pemerintahan di Keresidenan Banten waktu itu. Sebab yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ini adalah para priyayi yang disebut-sebut oleh Ce Mamat sebagai orang-orang yang tidak berhak duduk dalam birokrasi pemerintahan Indonesia yang merdeka. Kelemahan para alim ulama itu sendiri diakui oleh Kyai Citangkil sebagai berikut:

“ ... walaupun para ulama merupakan figur pimpinan rakyat yang sangat disegani, tetapi kebanyakan dari mereka buta aksara latin. mereka tidak bisa membaca dan menulis huruf tersebut. Mereka mempunyai anggapan bahwa dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang berasal dari orang-orang kafir sama dengan menjadi orang kafir. Anggapan inilah yang menjadikan masyarakat Banten selalu berada di garis terbelakang. Akibatnya banyak ulama pandai dan cerdas seperti Kyai Haji Syam'un dan Kyai Haji Ahmad Khatib tidak mampu mengurus masalah administrasi pemerintahan.”<sup>10</sup>

Perlu dikemukakan di sini, tokoh Ce Mamat yang nama aslinya adalah Muhamad Mansyur bukanlah tokoh sembarangan. Ia sempat duduk di HIS (sampai kelas IV) dan sejak muda sudah aktif dalam Sarekat Islam lokal Anyer yang kemudian berubah menjadi PKI cabang Anyer. bahkan sekitar tahun 1920 ia duduk menjadi ketuanya. Kemudian pada waktu

terjadi pemberontakan PKI di daerah ini pada tahun 1926, ia bersama-sama Kyai Haji Ahmad Khatib termasuk tokoh yang ditangkap yang kemudian diputuskan oleh pengadilan untuk dibuang ke Boven Digul. Namun di tengah perjalanan, Ce Mamat berhasil melarikan diri ke Malaysia (Semenanjung Melayu). Setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke Moskow dengan route melalui Cina.

Semula dia berniat untuk menemui Semaun. Akan tetapi di Cina dia bertemu dengan Tan Malaka yang menceritakan tentang perbedaan pandangannya dengan Semaun dalam perjuangan bangsa. Dalam kesempatan itu Tan Malaka menganjurkannya untuk kembali ke Indonesia dan meneruskan perjuangan di sana. Oleh karena itu Ce Mamat kembali menuju Indonesia. Akan tetapi di Singapore dia ditangkap oleh pemerintah Inggris dan dimasukkan ke penjara selama setahun. Setelah itu diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda yang kemudian memenjarakannya di Tanah Abang III, Jakarta (Batavia). Setelah setahun kemudian dia dipindahkan ke penjara Anyer. Setelah mendekam di penjara Anyer setahun lamanya, ia dibebaskan.

Pada tahun 1933 ia ikut bergabung ke dalam Partai Indonesia Raya (Partindo). Agar dirinya tidak dikenali oleh para petugas Belanda, ia mengganti namanya menjadi Ahmad Jafat Rosaf. Akan tetapi samarannya cepat diketahui oleh para petugas pemerintah. Ia ditangkap kembali dan dimasukkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Ia mendekam selama setahun dan kemudian dibebaskan lagi. Pada masa pendudukan Jepang ia ikut gerakan anti fasis Jepang yang bernama "Gerakan Joyoboyo"<sup>11</sup>. Namun gerakan itu cepat dapat terciium oleh pemerintah pendudukan Jepang. Beberapa tokohnya, termasuk Ce Mamat dan dipenjarakan. Ce Mamat kembali mendekam di penjara Tanah Abang III dan baru dibebaskan setelah Jepang kalah oleh Sekutu.

Ce Mamat kembali ke Serang hampir bertepatan dengan aksi penurunan bendera-bendera Jepang di kantor-kantor pemerintahan oleh para pemuda. Ia bertemu dengan Kyai Haji Ahmad Khatib. Setelah Kyai Haji Ahmad Khatib resmi diangkat menjadi Residen Banten, Ce Mamat diangkat menjadi ketua

KNID kabupaten Serang, yang bertugas membantu bupati setempat dalam menjalankan roda pemerintahan setempat. Akan tetapi, seperti telah disinggung di atas, dalam kapasitasnya sebagai ketua KNID ini, Ce mamat justru secara tidak langsung menyerang bupati Serang, yaitu Raden Hilman Djajdiningrat.

Pada tanggal 27 Oktober 1945, sekitar pukul 10.00 pagi Ce mamat beserta pengikutnya datang mengepung kantor keresidenan. Secara paksa dia meminta kepada Residen Kyai Haji Ahmad Khatib dan Kyai Haji Syam'un yang ada di kantor waktu itu untuk mengumpulkan rakyat di halaman kantor keresidenan besok paginya. Dalam kesempatan itu Ahmad Khatib harus mengumumkan secara resmi tentang adanya pengantian kekuasaan di Banten. Demi menjaga keselamatan keluarga yang kebetulan tinggal di sekitar kantor keresidenan, serta demi menghindari terjadinya pertumpahan darah yang tidak perlu, maka permintaan Ce Mamat itu terpaksa dikabulkan.

Keesokan harinya, setelah penduduk di sekitar kota Serang banyak berkumpul di halaman kantor Keresidenan, Ce mamat tampil mengumumkan tentang adanya pengambilalihan kekuasaan dari tangan Kyai Haji Ahmad Khatib oleh sebuah dewan yang dinamakan "Dewan Rakyat" yang diketuai oleh dirinya sendiri. Selanjutnya dia mengumumkan bahwa pusat pemerintahan/kekuasaan dipindahkan dari Serang ke Ciomas (kurang lebih 40 km dari kota Serang). Pemindahan pusat pemerintahan yang dilakukan oleh Ce mamat pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang wajar. Daerah Ciomas yang merupakan daerah para jawara, meskipun tidak seramai atau sestrategis kota Serang, namun di daerah ini pengaruh Ce Mamat relatif cukup kuat dan luas. Sedangkan di daerah Serang, pengaruh Kyai Haji Ahmad Khatib demikian luas dan kuat. Apalagi ada Kyai Haji Syam'un yang juga mempunyai pengaruh yang tidak kalah luasnya, terutama di daerah Cilegon.

Setelah memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Ciomas, Ce Mamat memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan gerakan pembersihan sesuai dengan konsep serta

visinya mengenai pemerintahan demokrasi. Para pejabat lama yang dinilainya bekas kaki tangan penjajah Belanda serta kolaborator Jepang diculik dan dipenjarakan, bahkan ada pula yang dibunuhnya. Misalnya, Raden Hilman Djajadiningrat, bupati kabupaten Serang diculik dan dipenjarakan.

Melihat aksi Dewan Rakyat pimpinan Ce Mamat itu, Kyai Haji Syam'un selaku komandan BKR Keresidenan Banten, mendesak Kyai Haji Ahmad Khatib untuk segera bertindak agar kekacauan tidak berlarut-larut yang nantinya akan semakin sulit diatasi. Pendapat Kyai Haji Syam'un ini mendapat dukungan dari Wakil Residen dan Kepala Polisi Banten Oscar Kusumaningrat. Apalagi setelah mendengar berita diculiknya Bupati Serang Raden Hilman Djajadiningrat. Sebab, baik Wakil Residen maupun Kepala Polisi berasal dari Priangan, dan juga kedua-duanya merupakan "warisan kolonial" alias bekas kaum birokrat baik pada masa Kolonial Belanda maupun pada masa Pendudukan Jepang.

Kyai Haji Ahmad Khatib sendiri terkesan sangat lamban dalam menanggapi gerakan Dewan Rakyatnya Ce Mamat. Kelambatannya itu antara lain karena di mempunyai satu pertimbangan lain, yaitu ingin menempuh jalan damai. Oleh karena itu ia berusaha mengimbangi gerakan Dewan Rakyat itu dengan cara melakukan reorganisasi antara lain dengan cara menempatkan para alim ulama yang cukup berpengaruh pada struktur pemerintahan seperti yang dituntut oleh Ce Mamat. Misalnya Kyai Haji Syam'un yang menjadi komandan BKR diangkat menjadi bupati Serang menggantikan Raden Hilman Djajadiningrat. Haji Hilman (bukan Hilman Djajadiningrat) diangkat sebagai bupati Pandeglang, dan Haji Hasan diangkat menjadi bupati Lebak.<sup>12</sup>

Demikian pula jabatan-jabatan wedana, camat, bahkan sampai tingkat kepala desa mulai diganti oleh para alim ulama. Selain itu juga dibentuk "Majlis Ulama" yang bertugas sebagai dewan penasehat Residen dan pengawas pelaksanaan tugas Residen. Majlis ini beranggotaan 40 orang kyai dari berbagai pesantren yang cukup terpandang di wilayah Keresidenan Banten. Dengan adanya perubahan ini diharapkan Ce Mamat mau insyaf dan membubarkan Dewan Rakyatnya.

Akan tetapi harapan Kyai Haji Ahmad Khatib melenceng jauh. Dewan Rakyat tidak mau membubarkan diri. Sebaliknya justru semakin sering melakukan aksi-aksinya, yang membuat masyarakat di wilayah Banten menjadi bertambah kacau. Lasykar Dewan Rakyat yang menamakan dirinya sebagai Lasykar Gulkut terus berkeliaran ke pelosok-pelosok desa serta menakut-nakuti penduduk. Dengan gampang mereka merampas harta benda milik penduduk, atau membunuh penduduk dengan alasan mereka adalah bekas kaki tangan kolonial.

Melihat perkembangan seperti itu, akhirnya Kyai Haji Ahmad Khatib menerima usulan Kyai Haji Syam'un untuk melakukan tindakan keras terhadap aksi-aksi Dewan Rakyat pimpinan Ce Mamat. Tindakan pertama yang dilakukan pasukan TKR pimpinan Kyai Haji Syam'un adalah membebaskan orang-orang yang diculik lasykar Gulkut, seperti membebaskan Raden Hilman Djajadiningrat dari penjara Serang. Setelah itu pasukan TKR bergerak menuju Ciomas yang menjadi pusat kekuatan Dewan Rakyat.

Di daerah Pandeglang dan Labuan, beberapa kali pasukan TKR terlibat kontak senjata melawan Lasykar Gulkut dan para pendukung Ce Mamat lainnya. Namun pasukan TKR dapat mematahkan semua perlawanan lasykar Gulkut itu. Pasukan TKR di bawah pimpinan Ali Amangku terus bergerak menuju Ciomas. Menjelang sampai ke Ciomas, pasukan TKR kembali dihadang lasykar Gulkut. Dalam kontak senjata ini dua orang TKR menjadi korban. Namun secara umum, pasukan TKR kembali dapat memukul lasykar Gulkut sampai ke dekat kantor kedewanaan Ciomas yang diduga menjadi markas besar lasykar Gulkut. Dan dugaan itu ternyata tidak meleset. Di tengah-tengah gencernya tembakan, Ce Mamat bersama beberapa pengawalnya berhasil meloloskan diri menuju daerah Lebak.

Setelah pasukan TKR berhasil menguasai markas Gulkut tersebut dan memeriksanya secara teliti, secara tidak terduga mereka menemukan orang-orang yang diculik oleh lasykar Gulkut. Di tempat ini mereka menemukan Oscar Kusumaningrat dan Entol Ternaya yang terikat pada sebuah pohon di bagian halaman belakang kantor kedewanaan tersebut.

Sementara itu Ce Mamat yang berhasil meoloskan diri dari Ciomas, kembali menyusun lasykar Gulkutnya. Di memindahkan markas besarnya dari Ciomas ke kantor GEBEO di Rangkasbitung. Di tempat ini ia mendapat bantuan dari tokoh pemuda setempat bernama Takhrib yang telah dikenalnya semasa pendudukan Jepang. Selain dari tokoh pemuda itu, ia juga mendapat bantuan dari Jaro Angkling, kepala desa dari Leuwi Damar, kabupaten Lebak. Ce Mamat mengangkat kepala desa itu menjadi Wedana Lebak. Bersamaan dengan itu Ce Mamat membubarkan KNID setempat dan menggantikannya dengan yang baru. Demikian pula para polisinya diganti dengan para jawara pendukungnya sehingga waktu itu muncul sebutan "polisi jawara".<sup>13</sup>

Aksi daulat yang dilancarkan Ce Mamat di banten ini ternyata menarik perhatian Presiden RI, Soekarno. Pada tanggal 9 Desember 1945, Presiden bersama dengan Wakil Presiden datang berkunjung ke kota Serang. Dalam kunjungannya itu ia sempat berpidato di depan masyarakat setempat yang berkumpul di alun-alun mengeluk-elukannya. Dalam kesempatan itu Presiden Soekarno menyerukan kepada Dewan Rakyat pimpinan Ce Mamat agar segera membubarkan diri. Di samping itu Presiden meminta agar fungsi dan kedudukan lembaga-lembaga setempat seperti KNID, yang telah dibubarkan Ce Mamat, segera dipulihkan kembali.

Sebelum kedatangan Presiden dan Wakil Presiden RI ke Serang, di daerah ini telah tersebar berita yang mengatakan bahwa lasykar Gulkut akan menculik kedua tokoh nasional itu. Oleh karena itu pasukan TKR berusaha mengawal kedua tokoh itu sebaik-baiknya. Sampai akhir masa kunjungannya di daerah Banten, tidak satupun insiden terjadi atas kedua tokoh nasional itu. Sebaliknya insiden penculikan justru terjadi pada tokoh setempat. Raden Hardiwinangun, mantan Bupati Lebak diculik. Dua hari kemudian mayatnya ditemukan di sungai Cisiih. Selain itu tangsi polisi di kota Serang tiba-tiba diserang pasukan tak dikenal, yang kemudian diketahui sebagai orang-orang simpatisan Ce Mamat yang berasal dari Ciomas, Bogor.

Insiden-insiden itu akhirnya dapat diatasi oleh pasukan TKR, antara lain dengan menghancurkan markas pasukan Ce Mamat di Rangkasbitung. Takhril sebagai tokoh pemuda daerah ini berhasil ditangkap. Namun untuk kedua kalinya Ce Mamat berhasil meloloskan diri ke daerah Bogor. Di daerah ini dia bergabung dengan Kyai Narya yang juga sedang melakukan aksi daulat terhadap para pamongpraja setempat.

Setelah Ce Mamat pergi, maka Dewan Rakyat yang ditinggalkannya seperti ayam kehilangan induknya. Boleh dikatakan tidak ada lagi perlawanan yang berarti dari mereka, sehingga dengan mudah Dewan Rakyat dibubarkan. Tak lama kemudian Ce Mamat sendiri tertangkap oleh Lasykar Rakyat Leuwiliang pimpinan Soleh Iskandar. Pasukan ini juga berhasil menghentikan aksi daulat yang dilancarkan kelompok Kyai Narja. Ce Mamat sendiri kemudian diserahkan kepada pasukan TKR Purwakarta dan dipenjarakan di sana. Setelah Dewan Rakyat dibubarkan, di wilayah Keresiden Banten masih ada beberapa kerusuhan, namun dari segi kualitas maupun kuantitas relatif kecil sehingga dengan mudah ditumpasnya.

### **4.3. Ulama dalam Kasus Cumbok, Aceh Besar**

Secara “tidak resmi” berita proklamasi kemerdekaan sampai ke Aceh sekitar tanggal 18 Agustus 1945, melalui seorang pemuda yang bekerja pada surat kabar lokal. *Atjeh Simbun*. Pemuda itu mendapat berita dari redaktur *Atjeh Simbun* berkebangsaan Jepang, yaitu K. Yamada, lalu disampaikan kepada para tokoh nasionalis Aceh. Di samping itu ada pula yang mengatakan bahwa berita kemerdekaan itu secara tidak resmi sampai ke kota Banda Aceh sekitar tanggal 23 Agustus 1945, atau sekitar 6 hari setelah berita itu didengungkan. Pada tanggal itu *Syocokan* S. Lino memanggil beberapa tokoh masyarakat Aceh yang dianggap mempunyai pengaruh besar, antara lain: Teuku Nyak Arief, Teuku Ahmad Danu, Teungku Muhammad Daud Beureueh, dan Said Abubakar. Dalam kesempatan itu S. Lino menjelaskan tentang kondisi dan situasi politik di Asia serta menjelaskan kedudukan Jepang waktu itu. Walaupun saat itu tidak disebutkan secara gamblang bahwa

Jepang telah kalah, namun para tokoh Aceh yang diajak bicara oleh *Syucokan S. Lino* itu telah menangkap isyarat itu, apalagi sebelumnya juga telah mendengar isu atau semacam kabar angin tentang adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Keesokan harinya, tanggal 24 Agustus 1945, Teuku Nyak Arief mengendarai kendaraannya yang dipasangi bendera Merah Putih, keliling kota Kutaraja. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kepada penduduk daerah itu bahwa Indonesia telah merdeka. Tindakannya itu rupanya mendapat sambutan dari para pemuda yang tergabung dalam organisasi Ikatan Pemuda Indonesia (IPI). Pada tanggal 25 Agustus, para pemuda yang tergabung dalam organisasi ini datang merebut kantor *Atjeh Simbun*, dan memasang bendera Merah Putih. Tindakan ini kemudian diikuti oleh pemuda-pemuda lainnya dari berbagai kota seperti di Langsa, Lhoksemawe, Sigli, Bireun, Lhoksukon, Kula Simpang, Kutacane, Meulaboh, dan Tapak Tuan.<sup>14</sup>

Begitu pula upaya untuk mengambil alih kantor-kantor dari pemerintahan pendudukan Jepang terjadi di mana-mana. Di Langsa misalnya, para pemuda di bawah pimpinan Abdullah Husin mantan anggota Barisan P (Malaysia), datang ke kantor kepolisian setempat, dan meminta agar pimpinan di tempat itu mau menyerahkan kekuasaan kepolisian setempat kepada para pemuda (Indonesia). Demikian pula di Kutaraja, para pemuda di bawah pimpinan Hasyim, Teungku Abdullah Sani, Soeni, dan Nyak Umar, telah melakukan tindakan yang relatif sama dengan rekan-rekannya dari Langsa.

Guna menjaga keamanan agar situasi yang eksplosif itu tidak meledak menjadi kerusuhan, beberapa pemuda mantan *Gyugun* (semacam PETA di Jawa) mempunyai gagasan untuk membentuk semacam organisasi keamanan. Untuk merealisasikan gagasan tersebut, pada tanggal 27 Agustus 1945, mereka mengadakan pertemuan rahasia di Hotel Sentral yang terletak di Jalan Muhammad Jam, Kutaraja. Tokoh-tokoh pemuda yang berkumpul di tempat itu antara lain: Sjamaun Gaharu, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid Azwar, Nyak Neh Rika, Bachtiar Idham, dan Said Usman.<sup>15</sup> pertemuan ini menghasilkan satu kesepakatan untuk membentuk satu organisasi militer.

Keputusan ini kemudian dilaporkan kepada Teuku Nyak Arief yang menyambut gembira rencana para pemuda tersebut. Menurut pendapatnya, dalam zaman modern, yang menjadi tentara harus mempunyai pendidikan formal yang baik, baik sekolah yang berbahasa Belanda maupun yang tidak berbahasa Belanda, ditambah dengan ketrampilan militer, sekurang-kurangnya pengalaman di bidang militer.<sup>16</sup> Pembentukan organisasi militer itu sendiri baru terjadi setelah pemerintah sipil Republik Indonesia terbentuk di Aceh, menyusul setelah diterimanya berita kemerdekaan secara resmi dari Jakarta.

Secara resmi berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru sampai ke Kutaraja, Aceh pada awal Oktober 1945, yang dibawa oleh utusan resmi dari Jakarta, antara lain Mr. Teuku Muhammad Hasan. Dalam kesempatan itu Teuku Muhammad Hasan mengumumkan untuk segera membentuk pemerintahan dan membentuk KIND di daerah Keresidenan Aceh. Ia mengatakan pula bahwa Aceh merupakan bagian dari Provinsi Sumatera.<sup>17</sup> Teuku Nya Arief terpilih sebagai Residen yang dilanjutkan dengan *bai'at* (sumpah setia) kepada Republik Indonesia, yang diikuti oleh pemimpin-pemimpin rakyat dan tokoh masyarakat lainnya. Semula Teuku Nyak Arief menjabat sebagai ketua KNID. Kedudukan ini kemudian digantikan oleh Tuanku Mahmud.

Selaku Residen Aceh, Teuku Nyak Arief memutuskan untuk segera membentuk kesatuan polisi, yang umumnya terdiri dari mantan KNIL. Di samping itu dia juga mendukung pembentukan organisasi keamanan yang dibentuk para pemuda. Menurut salah satu sumber, Teungku Muhammad Daud Beureueh menganjurkan kepada para pemuda yang pernah menjadi anggota *Gyugun* untuk menggabungkan dalam Angkatan Pemuda Indonesia (API yang kemudian menjadi cikal bakal TNI di Aceh) yang dibentuk Sjamaun Gaharu pada tanggal 6 Oktober 1945. Sedangkan para pemuda yang di luar *Gyugun* dianjurkan agar menggabungkan diri ke dalam Ikatan Pemuda Indonesia (yang kemudian menjadi Lasykar Rakyat Divisi Rencong) yang telah dibentuk oleh A. Hasjmy dan kawan-kawannya. Menurut satu sumber, IPI ini kemudian menjadi Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia) yang dibawah pimpinan

seorang ulama muda bernama Amir Husin Al Mujahid.<sup>18</sup> Teungku Muhammad Daud Beureueh sendiri kemudian membentuk organisasi Mujahidin (cikal bakal Divisi Teungku Cik Tiro).<sup>19</sup>

Adapun markas API berkedudukan di Kutaraja di bawah pimpinan Sjamaun Gaharu. Untuk Wakil Markas daerah Aceh Besar dan Pidie dipimpin oleh Nyak Neh. Aceh Utara dan Tengah dipimpin oleh Teuku Muhammad Syah. Aceh Timur dipimpin oleh Bachtiar, dan Aceh Barat dan Selatan dipimpin oleh Cut Rahman.

Dukungan masyarakat Aceh terhadap negara kesatuan Republik Indonesia semakin besar setelah terbit suatu fatwa dari empat ulama terkenal daerah itu, yang lengkapnya sebagai berikut:

“perang dunia kedua yang mahadahsyat telah tamat. Sekarang di barat dan timur oleh empat kerajaan yang besar sedang diatur perdamaian dunia yang abadi untuk keselamatan makhluk Allah. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan yang mulia maha pemimpin kita Ir. Soekarno.

Belanda adalah satu kerajaan yang kecil serta miskin, satu negeri yang kecil lebih kecil dari daerah Aceh dan hancur lebur, mereka telah bertindak melakukan kekhianatannya kepada tanah air kita Indonesia yang sudah merdeka itu, untuk dijajah kembali.

Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semua harta benda negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang kita kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hambanya kembali dan menjalankan usaha untuk menghapus Agama Islam kita yang suci serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Di Jawa Barat, Belanda dan kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap Republik Indonesia hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan berada di pihak kita. Sungguhpun begitu, mereka belum juga insyaf.

Segenap lapisan rakyat telah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang maha pemimpin Ir Soekarno untuk menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan.

Menurut keyakinan kami bahwa perjuangan ini adalah perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Maka percayalah wahai bangsa kami, bahwa perjuangan ini adalah sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teungku Cik Di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain.

Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsa kami sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka untuk mengikuti jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita untuk keselamatan Tanah Air, Agama, dan Bangsa.”

Kutaraja, 15 Oktober 1945

Atas nama ulama seluruh Aceh

Teungku Haji Jakfar Siddik Lamjabat  
Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri  
Teungku Haji Hasan Kruengkale  
Teungku Muhammad Daud Beureueh.<sup>20</sup>

Satu hal yang perlu dikemukakan untuk menunjukkan demikian besarnya peranan para alim-ulama Aceh dalam mendukung menegakkan kedaulatan Republik Indonesia. Pada tahun 1946, pimpinan Kesatria Pesindo Divisi Rencong mendirikan sebuah resimen khusus yang anggotanya terdiri dari gadis-gadis remaja. Resimen ini diberi nama Resimen Pocut Baren. Dari kalangan masyarakat Aceh timbul reaksi keras, terutama dari kalangan tuan yang mengganggu tindakan itu

sesuatu yang tercela. Pimpinan Pesindo Divisi Rencong waktu itu, yaitu Teuku Muhammad Amin kemudian datang mengunjungi ulama besar Teungku Haji Hasan Krungkale di dayah Krungkale (kurang lebih 10 Km dari Banda Aceh sekarang). Ia menanyakan bagaimana hukumnya bagi para wanita yang ikut berjuang mengangkat senjata melawan para kolonialis? Jawab Teungku Krungkale, dari zaman Sahabat Rasulullah, perempuan sudah ikut dalam medan perang. Oleh karena itu tidak ada salahnya bagi wanita atau gadis-gadis Aceh ikut berperang. Bahkan "harus hukumnya dan bila agama dan negara dalam bahaya mungkin menjadi wabib".<sup>21</sup> Dengan adanya fatwa ini maka tidak ada lagi penentangan dari kalangan masyarakat sewaktu resimen Pocut Baren dibentuk.

Dengan dibentuknya API pihak Jepang curiga karena API merupakan organisasi kemiliteran, yang diduga akan dipakai untuk melawan Jepang. Oleh karena itu *Syucokan S. Lino* mengundang pimpinan Aceh ke tempat kediamannya untuk membicarakan masalah Aceh. Dalam pembicaraan itu pihak Jepang terang-terang mengemukakan ketidak setujuannya terhadap dibentuknya organisasi-organisasi seperti API, IPI; dan penyebaran selebaran-selebaran. Jepang meminta agar para pemimpin Aceh membubarkan organisasi-organisasi tersebut.

Permintaan Jepang itu ditolak oleh Teuku Nyak Arief dengan mengatakan: "pemerintah Jepang tidak mengetahui keadaan, apakah yang tuan-tuan kerjakan selama berkuasa disini akan tuan-tuan lakukan juga pada waktu Jepang kalah?". Sjamaun Gaharu selaku pemimpin API juga mengatakan: "bahwa Indonesia telah merdeka, karena itu Jepang tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan API".

Setelah peristiwa itu, pada tanggal 9 Oktober 1945, Residen Aceh Teuku Nyak Arief memerintahkan Sjamaun Gaharu untuk menyempurnakan struktur organisasi API yang disusun dengan dikeluarkannya seruan, "Seruan Tanah Air", "Sokonglah API", yang ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyokong serta membantu API.<sup>22</sup> Sewaktu pemerintah pusat mendirikan Badan Keamanan Rakyat (BKR), API kemudian melebur ke dalamnya. BKR sendiri kemudian berubah menjadi

Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sejak tanggal 1 Desember 1945, API resmi menjadi TRI dengan komandannya Kolonel Sjamaun Gaharu. Sedangkan Teuku Nyak Arief selaku Residen Aceh diangkat menjadi pelindung dengan pangkat Mayor Jenderal (tituler). Kemudian pada tanggal 24 Januari 1946, TKR Aceh berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) Divisi V Sumatera.

Dari sekian banyak organisasi yang muncul pada awal kemerdekaan itu, API merupakan organisasi yang paling diminati oleh para pemuda yang berasal dari pemuda biasa, pemuda mantan anggota *Fujiwara kikan*, pemuda keluarga uleebalang, dan pemuda PUSA. Sesuai dengan anjuran Teuku Nyak Arief agar organisasi militer ini disusun berdasarkan pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman dalam bidang kemiliteran, maka umumnya pos-pos penting dalam API yang kemudian dilanjutkan dalam TKR dan TRI, mayoritas diduduki oleh mantan-mantan *gyugun* dari keluarga *uleebalang*. Kecuali Husin Yusuf yang menjabat sebagai kepala sekretariat, maka yang lainnya seperti Hasballah Haji sebagai komandan TKR Sigli, Meureudu serta Nurdi Sufi sebagai pimpinan TKR Idi, merupakan pemuda keturunan *uleebalang*.<sup>23</sup>

Kondisi semacam ini telah menimbulkan perasaan tidak puas di kalangan para pemuda yang berasal dari PUSA dan para pemuda yang tergabung dalam Pesindo. Mereka merasa kecewa karena tidak mendapat posisi yang berarti dalam staf Divisi V, Sumatera dan merasa tersingkirkan dalam pimpinan ketentaraan.<sup>24</sup> Kelompok ini pada dasarnya mempunyai pandangan yang berbeda dengan Teuku Nyak Arief dan Sjamaun Gaharu. Menurut kelompok ini yang penting bukanlah pendidikan atau pengalaman militer, melainkan kepribadian yang utuh, semangat yang menyala-nyala, pandangan revolusioner serta solidaritas yang tinggi.

Perbedaan pandangan ini semakin hari semakin melebar. Perasaan tidak puas terhadap Teuku Nyak Arief serta Sjamaun Gaharu pun semakin meluas. Kali ini perasaan tidak puas itu bukan saja di kalangan pemuda PUSA dan Pesindo saja, melainkan juga mulai merayap ke kalangan ulamanya. Mereka

mulai mencurigai para pemimpin waktu itu, baik sipil maupun militer.

Bibit-bibit kecurigaan itu sendiri, khususnya terhadap keturunan para bangsawan atau *uleebalang*, seperti telah disinggung dalam bab-bab terdahulu, memang sudah ada beberapa tahun sebelumnya, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Kecurigaan itu semakin meningkat sewaktu ada isu bahwa sebagian dari para *uleebalang* yang dahulu bekerjasama dengan Belanda, telah mempersiapkan kedatangan Belanda.

Kecurigaan itu semakin menebal dengan kedatangan Mayor Maarten Knottenbelt ke Aceh. Ia datang ke Aceh dengan pesawat terbang yang mendarat di Lho'k Nga. Kedatangannya ini sebenarnya, sepenuhnya atas sepengetahuan *Gunseikanbu*. Residen Aceh, Teuku Nyak Arief menjadi sangat marah mengetahui kehadiran perwira menengah tersebut. Apalagi dalam tindakannya selama di Aceh tidak hanya sekedar mengurus masalah rekapitulasi Jepang, melainkan juga berusaha menghubungi para mantan KNIL dan orang-orang yang pernah bekerjasama dengan Belanda semasa Hindia Belanda. Kemarahan Residen ini bukan saja ditujukan kepada Knottenbelt saja, melainkan juga kepada pihak Jepang yang menerima perwira itu secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada pemerintahan RI. Oleh karena itu dia meminta agar perwira Belanda itu secepatnya meninggalkan wilayah Keresidenan Aceh.

Akhirnya pihak Jepang menyarankan kepada Mayor Knottenbelt itu untuk segera meninggalkan Aceh karena pihak Jepang sendiri tidak lagi sepenuhnya mampu menjamin keamanannya. Mayor Knottenbelt setuju karena dia sendiri sudah mulai merasakan tidak aman karena terus dibayangi pemuda-pemuda API/TKR. Bahkan tempat di mana ia menginap beberapa kali ditembaki orang. Namun Knottenbelt meminta kepada pihak RI agar memberikan pengawalan selama perjalanannya dari Aceh menuju Medan.<sup>25</sup> Atas desakan ketua KNID Aceh, Tuanku Mahmud, pimpinan API/TKR terpaksa mengawal perwira Belanda itu menuju Medan. Atas anjuran

ketua KNID pula, seorang pimpinan Barisan Pemuda Indonesia (BPI) turut serta dalam pengawalan itu.

Berita tentang pengawalan itu ternyata telah memunculkan isu-isu yang semakin memanaskan suasana politik, terutama sikap antagonis antara kelompok bangsawan/*uleebalang* dan kelompok ulama. Kondisi zaman itu membuat masyarakat kurang mampu berpikir jernih. Isyu-isu atau kabar angin begitu saja diterima sebagai suatu kenyataan tanpa harus mengecek dulu apakah berita itu datang dari sumber yang dapat dipercaya atau tidak. Sebagai contoh, di kalangan masyarakat telah tersebar isu bahwa dalam pengawalan itu, Residen Nyak Arief turut serta, sehingga apriori masyarakat terhadap pimpinan setempat, terutama yang berasal dari kalangan *uleebalang* semakin besar. Dalam kondisi seperti itulah meletus peristiwa Cumbok yang menurut A.H. nasution sebagai revolusi sosial yang agak “agak lengkap” dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia.<sup>26</sup>

Cumbok adalah nama satu kecamatan (*lanschap*) yang termasuk dalam kewedanaan (*onderafdeling*) Lam Meulo, kabupaten (*afdeling*) Aceh Utara.<sup>27</sup> Sebagai catatan, sebelum kemerdekaan RI, Aceh Pidie meliputi 3 kewedanaan yaitu: Sigli, Lam Meulo, dan Meuredu. Pada masa Republik, Aceh Utara dipecah menjadi tiga kabupaten, yaitu:

1. Aceh Pidie terdiri dari kewedanaan Sigli, Lam Meulo, dan Meuredu.
2. Aceh Utara terdiri dari Lho'k Seumawe, Lho'k Sukun, dan Bireun.
3. Aceh Tengah terdiri dari Takengon, Kuta Cane dan Blang Kejeren.

Kepala kecamatan Cumbok terakhir dari masa Hindia Belanda yang disebut *zelfbestuurder van Tjeumbok* adalah *uleebalang* Teuku Muhammad Daud yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Teuku Cumbok.. Pada masa pendudukan Jepang ia menjadi *gunco* Lam Meulo. Kemudian sewaktu Indonesia merdeka, karena pemerintah Indonesia sangat membutuhkan orang-orang yang mempunyai keahlian dalam pemerintahan, maka dia diangkat menjadi Wedana Lam

Meulo. Ia mendapat gelar Seri Muda Pahlawan Bintara Cumbok.<sup>28</sup> Teuku Cumbok ini dikenal pula sebagai orang yang berwatak keras dengan kepribadian yang kuat, bersemangat dan tegar.<sup>29</sup>

Teuku Daud Cumbok merupakan salah satu dari beberapa *uleebalang* yang secara terang-terangan menunjukkan kekerasannya dan kurang mendukungnya terhadap kemerdekaan Indonesia. Sikapnya itu ditunjukkan dalam satu kasus merah putih di kantornya. Sewaktu para pemuda pendukung RI menaikkan bendera merah putih di kantornya, maka langsung menurunkannya kembali. Selain itu dia memerintahkan bawahannya untuk mencabut kembali poster-poster pro-Republik yang dipasang Pemuda Republik Indonesia (PRI). Ia tidak menyembunyikan pandangannya bahwa bangsa Indonesia belum siap untuk merdeka.<sup>30</sup>

Menurut satu sumber, Teuku Daud Cumbok ini juga dikenal sebagai orang yang lebih suka melakukan aksi daripada diplomasi, sehingga terkesan sombong dan suka menganggap enteng pihak lain. Hal ini antara lain terlihat sewaktu mengadakan pesta pasar malam di Lam Meulo pada bulan Nopember yang lengkap dengan arena perjudian. Pada pesta itu dia mebuk-mabukan tanpa menghiraukan nasehat para ulama yang diundangnya. Bahkan ia cenderung melecehkan dengan mengatakan "saya hendak taubat supaya menjadi orang kesayangan Tuhan seperti teungku-teungku, tapi biarlah habis pasar malamku ini dan biarlah puas dahulu dengan kesenangan dunia."<sup>31</sup> Dengan sikapnya yang demikian sudah barang tentu menimbulkan sikap antipati dari pihak ulama terhadapnya yang membawa terjadinya bentrokan-bentrokan antara para pengikut Teuku Daud Cumbok dengan yang lainnya, antara lain para pemuda PRI.

Konflik antara kelompok ulama PUSA dengan para *uleebalang* Lam Meulo semakin meruncing dengan adanya perebutan persenjataan Jepang di daerah itu. Pada bulan Desember 1945 Ketua Markas API/TRI, Sjamaun Gaharu telah mengutus Teungku Abdullah dan Bachtiar Idham ke markas balatentara Jepang (*Sakata-tai*) di kota Sigli. Sesampainya di

sigli, bachtiar Idham yang mempunyai hubungan persaudaraan dengan Teuku Daud Cumbok mampir ke rumahnya dan secara tidak sengaja menceritakan rencananya untuk merebut persenjataan dari Jepang untuk API/TRI.

Pada waktu itu para *uleebalang* di Lam Meulo pada khususnya justru sudah merasa tidak nyaman dan merasa terancam keamanannya, terutama ancaman itu dianggap bakal datang dari pihak ulama. Oleh karena itu pada tanggal 22 Oktober 1945, sejumlah besar *uleebalang* di wilayah Sigli berkumpul di rumah *uleebalang* Beurenun, Teuku Umar Keumangan. Dalam pertemuan itu dibicarakan tentang berbagai ancaman yang muncul dan yang diduga akan muncul terhadap keamanan keluarga mereka. Untuk itu mereka perlu adanya perlindungan dan persenjataan untuk menjaga diri. Kemudian disepakati untuk membentuk organisasi yang bernama "Markas Uleebalang" yang mempunyai kesatuan dengan persenjataan lengkap, yang diberi nama Barisan Penjaga Keamanan (BPK).<sup>32</sup> Pasukan BPK itu terdiri dari Barisan cap Bintang di bawah pimpinan Teuku Mahmud Cumbok, Barisan cap Sauh di bawah pimpinan Teuku Abdullah Titeu, dan Barisan cap Tombak di bawah pimpinan Teuku Sarong.<sup>33</sup>

Tentu saja berita yang dibawa oleh bachtiar Idham itu dijadikan alasan oleh Teuku Daud Cumbok untuk melakukan gerakan yang mendahului para pemuda API/TKR. Sebagai penguasa setempat, alat negara, dia mempunyai hak dan tanggungjawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban rakyat secara keseluruhan, sehingga berhak pula untuk memiliki senjata-senjata Jepang tersebut. Oleh karena itu ia selaku penguasa setempat telah menyebar penjagaan dan melarang orang-orang luar memasuki wilayah Lam Meulo, dan menahan orang-orang yang menentanginya, termasuk para pemuda PUSA. Di samping itu dia mendesak komandan balatentara Jepang untuk menyerahkan persenjataannya kepada pasukan BPK.<sup>34</sup>

Tindakan-tindakan yang dilakukan Teuku Daud Cumbok dengan BPK-nya itu tentu saja menimbulkan kekecewaan, kekhawatiran sekaligus kemarahan para pemuda dan ulama PUSA. Apalagi mengingat sikap Teuku Daud Cumbok yang

dianggap kurang begitu mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu maka pimpinan ulama PUSA dan pimpinan API/TRI mendesak komandan balatentara Jepang agar tidak menyerahkan perseniataannya kepada pihak *uleebalang* atau BPK yang dianggap akan membahayakan keamanan rakyat umum. Untuk menunjukkan kesungguhannya itu, para pemuda PUSA dan API/TKR mengancam akan menyerbu markas balatentara Jepang jika mereka menyerahkan perseniataannya kepada pihak *uleebalang*.<sup>35</sup>

Guna mencegah agar perseniataan itu jatuh ke tangan *uleebalang*, maka rakyat pendukung kaum ulama yang ada di sekitar kota Sigli para dengan dimotori oleh para pemuda PUSA bergerak menuju kota Sigli dan mengepung kota tersebut. Namun pasukan BPK rupanya telah bergerak lebih cepat. Pada tanggal 2 Desember 1945, kurang lebih pukul 12.00 siang, sejumlah pemuda kampung di sekitar Sigli bersama-sama dengan Pasukan Cap Sauh, Cap Tombak dari Lam Meulo yang berseniata lengkap, memasuki kota Sigli dan mengambil tempat di sekitar rumah *uleebalang* Pidie dan *Gunco* Sigli.<sup>36</sup> Mereka adalah para pengikut *uleebalang* yang mengadakan persiapan untuk menguasai kota. Mereka menempatkan pasukannya di tempat-tempat strategis, dan membuat lubang-lubang pertahanan, serta melakukan pengawasan terhadap arus orang-orang yang ke luar atau masuk ke kota tersebut.

Walaupun sudah ada penjagaan dari kelompok BPK dan para pendukungnya, namun rakyat pendukung kaum ulama ini terus memasuki kota dan mengadakan demonstrasi besar-besaran sambil menyerukan nama Allah dan Rasulullah. Mereka bergerak mengelilingi kota sehingga menimbulkan kecemasan bagi pihak *uleebalang*. Akhirnya bentrokan pun tidak dapat dihindari. Pasukan BPK yang sedang cemas dan tegang, berusaha membubarkan gerakan rakyat tersebut dengan tindakan yang keras dan cenderung ganas, antara lain dengan melepaskan tembakan yang langsung diarahkan kepada kelompok rakyat tersebut.<sup>37</sup>

Rupanya bentrokan itu bukanlah akhir dari pertentangan, melainkan awal dari bentrokan yang lebih gawat lagi. Pada

tanggal 4 Desember 1945, sekitar pukul 09.00 pagi, ribuan rakyat yang dipimpin langsung oleh para ulama PUSA, dengan suara takbir yang bergemuruh mulai memasuki kota Sigli melalui jembatan Benteng. Sedangkan di seberang jembatan itu, pasukan Teuku Daud Cumbok telah menanti dengan siap sedia pada lobang-lobang pertahanan yang telah dipersiapkan sebelumnya.<sup>38</sup>

Sjamaun Gaharu selaku komandan API/TKR Keresidenan Aceh yang tiba dari Kutaraja pada pagi itu juga bersama dengan Said Ali, berusaha mencegah terjadinya bentrokan itu. Ia berusaha menghentikan gerakan rakyat agar tidak memasuki kota, lalu mengadakan tukar pikiran dengan pimpinan rakyat tersebut. Setelah itu dia menemui *Bunshu-choi* (Bupati Jepang). Kemudian ia bersama dengan Teuku M.A. Polem, tokoh ulama dan tokoh *uleebalang* berunding di *Sakata-taicho*. Perundingan berlangsung selama 4 jama. Dalam perundingan itu akhirnya *Sakata taicho* setuju untuk menyerahkan persenjataan Jepang hanya kepada TKR. Senjata-senjata tersebut akan diantarkan ke stasiun Sigli dan selanjutnya diangkut dengan kereta api ke Kutaraja.

Selesai perundingan Sjamaun Gaharu pergi ke blok Sawah untuk makan siang. Namun melihat semakin banyak orang yang berdatangan hendak masuk kota, maka dia datang menjumpai mereka. Sekali lagi dia menerangkan agar rakyat tidak memasuki kota Sigli. Kemudian dijelaskan pula bahwa senjata-senjata Jepang yang diperebutkan telah diserahkan kepada API/TKR. Akan tetapi selagi berunding, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah lobang perlindungan di depan rumah Pakeh Sulaeman yang berjarak kurang lebih 100 meter. Tembakan itu mengenai seorang ajudan bernama Frans. Serta merta rakyat pendukung kaum ulama ini serta merta berlindung dan mengatur pertahanan. Ketika itu Sjamaun Gaharu melihat pasukan TKR yang sedang menjaga jembatan Kampung Keramat. Secara reflek Sjamaun Gaharu mengangkat tangannya dengan maksud agar pasukan TKR menahan diri dan tidak melepaskan tembakan. Akan tetapi tindakan itu justru diartikan sebaliknya oleh pasukan TKR . Tanpa menunggu perintah

mereka melepaskan tembakan. Sebaliknya pasukan Cumbok juga mengartikan tembakan pasukan TKR itu sebagai serangan rakyat yang harus segera dibalasnya.<sup>39</sup> Tak lama kemudian rentetan tembakan dan dentuman meriam pun terdengar bersahutan yang berlangsung hampir selama tiga hari.

Sjamaun Gaharu yang didampingi Mayor Teuku A. Hamid Azwar berusaha untuk menghentikan pertempuran itu. Keduanya menemui pimpinan ulama dan *uleebalang* dan mengajak mereka untuk memikirkan serta mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk menghentikan tembak menembak dan sepakat untuk mengosongkan kota Sigli. Pihak *uleebalang* menarik mundur pasukan BPK dan rakyat Sigli yang menjadi pendukungnya harus kembali ke kampungnya masing-masing. Demikian pula kelompok-kelompok pendukung para ulama PUSA yang masih bertahan di pinggir kota, diperintahkan agar segera meninggalkan kubu-kubu pertahanannya dan kembali ke kampungnya masing-masing. Selanjutnya kota Sigli berada di bawah penjagaan TKR dan Polisi.<sup>40</sup>

Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa telah sepakat untuk tidak membuat kekacauan lagi, namun dalam prakteknya tidak demikian. Sikap antagonis yang ada pada dua kelompok yang bersebrangan ini, membuat mereka sering mencari masalah guna melampiaskan rasa benci dan dendamnya terutama kepada kelompok yang dibencinya.

Suasana kembali menegang ketika Markas Uleebalang mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Desember 1945, di rumah Teuku Laksamana Umar, *uleebalang* Nyong di Lueng Putu.<sup>41</sup> Pertemuan ini menghasilkan satu persetujuan bahwa mereka akan bertindak lebih keras dan tegas terhadap penentang gerakan mereka. Badan Penjaga Kemanan (BPK) yang berpusat di Lam Meulo harus menjadi inti dari pasukan *uleebalang*. Diputuskan pula agar setiap *uleebalang* mengirinkan pasukannya ke Lam Meulo untuk mendapatkan latihan seperlunya. Selain membina benteng-benteng yang telah ada di Lam Meulo, pihak *uleebalang* juga merencanakan untuk membangun dan membina benteng yang kuat di Lueng Putu

dan Meureude.<sup>42</sup> Mereka mengharapkan agar pada akhir Desember 1945 rencana tersebut telah terlaksana.<sup>43</sup>

Sesuai dengan keputusan di Lueng Putu, Markas Uleebalang membangun empat buah kubu pertahanan di berbagai tempat di di sekitar Pidie. Selain itu mereka terus mengumpulkan banyak senjata. Setelah merasa cukup kuat, secara sepihak mereka melakukan aksi-aksi pembersihan terhadap orang-orang yang dianggapnya sebagai pihak yang menentangnya. Kampung-kampung yang diperkirakan sebagai pendukung lawan ditembaki dan dibakar.

Rumah-rumah pimpinan PRI dan Lam Meulo termasuk yang menjadi sasaran aksi-aksi Markas Uleebalang dengan BPK-nya. Misalnya rumah Teungku Zainal Abidin bendaharawan PRI), rumah Hasan Mohammad keluarga Teungku Umar Tiro (Ketua I PRI), dan rumah Teungku Sulaiman yang memegang jabatan sebagai Ketua badan Keamanan PRI. Beruntung tokoh-tokoh PRI itu telah melarikan diri sebelum rumah-rumahnya didatangi tentara BPK.

Aksi sepihak ini akhirnya sampai juga ke kalangan ulama PUSA. Pada tanggal 11 Desember 1945, Teuku Muh. Ali melakukan penyerangan terhadap markas besar PUSA di Garot (8 km dari kota Sigli). Penyerangan ini terhenti karena secara tidak terduga muncul pasukan misi perdamaian ke daerah itu, yang dipimpin oleh Teuku Chik M. Said, Asisten Residen Aceh Utara.<sup>44</sup> Dia berhasil membujuk pasukan BPK untuk mundur sambil menunggu penyelesaian semua keluhan dan permasalahan di bawah pengawasan Republik.

Melihat dan mendengar tentang aksi-aksi Markas Uleebalang ini, golongan ulama dan para pendukungnya yang merasa terancam keselamatannya mulai memperkuat dirinya. Pada tanggal 22 Desember 1945, mereka membentuk Badan Perjuangan Rakyat yang dinamakan Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) di Garot.<sup>45</sup>

Tujuan pendirian MBRU adalah untuk mengkonsolidasikan barisan rakyat yang ada di Kabupaten Pidie guna melawan

kekuatan Markas Uleebalang dan pendukungnya. Pimpinan MBRU ini secara keseluruhan diserahkan kepada Hasan Ali yang mendapat dukungan dari ulama antara lain: Teungku Banta.

Sewaktu para pejabat pemerintah, para pemimpin PUSA masih diliputi keraguan, para pemuda justru menunjukkan berbagai alasan untuk segera menyerang *uleebalang*. Serangan pertama dimulai pada tanggal 27 Desember atau lima hari setelah pembentukan MBRU.

Gerakan MBRU dan Korp Rakyatnya ini ternyata tidak menyurutkan tindakan Markas Uleebalang dengan BPK-nya itu. Mereka justru meningkatkan serangannya terhadap kampung-kampung atau daerah-daerah yang menjadi pendukung kaum ulama. Kampung Langga, Gle Gapui dan kampung-kampung sekitar Meutareum, seperti Ie'lot, Pulo Kameng habis terbakar.<sup>46</sup>

Pada waktu yang bersamaan, tokoh PUSA, Teungku Muhammad Daud Beureueh menginstruksikan kepada para tokoh PUSA di Aceh Utara untuk segera memobilisasi para anggota Pesindo dan Mujahidin guna menyerang bagian timur Pidie. Sebagai komandan Korp Rakyat (gabungan) ini ditunjuk Teungku Abdul Wahab Seulimeum, seorang ulama reformis terkemuka dari Aceh Besar. Korp Rakyat bergerak menuju Pidie, yang didahului dengan pembacaan sebuah maklumat yang ditujukan kepada semua kaum muslimin pendukung kaum ulama, yang isinya perintah agar mereka tidak membakar dan mengambil harta orang-orang yang ditangkap, serta harus memperlakukan semua tahanan secara baik.<sup>47</sup> Seruan atau maklumat ini secara psikologis sangat menguntungkan bagi Korp Rakyat ini. Simpati dari para pemuda yang kampungnya dilewati oleh Kopr ini pun terus mengalir.

Korp Rakyat dengan ribuan pendukungnya itu terus mengalir menuju Markas Uleebalang di Lam Meulo. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa para ulama PUSA dan pemimpin pemuda akhirnya memaksa pemimpin Republik Indonesia di Aceh yang semula ragu-ragu dalam mengambil tindakan, untuk bertindak tegas terhadap Markas Uleebalang di Pidie.<sup>48</sup>

Oleh karena itu akhirnya pada tanggal 6 Januari 1946, Markas Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh (Badan yang mengkoordinasi kegiatan militer di daerah Aceh, didirikan pada bulan Desember 1945) mengadakan sidangnya yang pertama dengan topik pembicaraan mengenai situasi politik di Pidie. Dalam sidang pertama ini belum dapat diambil keputusan yang cukup fundamental sehingga sidang dilanjutkan lagi pada tanggal 8 Januari. Tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan ini adalah : Ketua Markas Umum Sjamaun Gaharu dari TKR, Teungku Muhammad Daud Beureueh dari Mujahidin, Ali Hasjmy dari Pesindo, Ismail Uakub tokoh PUSA yang mewakili PNI, Husin Yusun dan Teuku Muhammad Syah, keduanya mewakili TKR.

Berdasarkan hasil sidang ini kemudian dikeluarkan sebuah maklumat sekaligus ultimatum yang ditujukan kepada Markas Uleebalang di Lam Meulo yang isinya antara lain menyatakan: "bahwa setelah diadakan penyelidikan mendalam, mereka yang mengadakan perlawanan di daerah Cumbok, Lam Meulo dan tempat-tempat lain dalam wilayah Pidie adalah 'musuh negara Republik Indonesia' dan diperingatkan bagi mereka yang telah terpengaruh agar menghindari diri, kalau tidak mereka juga akan dikenakan hukuman sesuai dengan kesalahannya."<sup>49</sup> Sebagai kelanjutannya, Panglima Polem atas nama Pemerintah Republik, dan Sjamaun Gaharu mewakili Markas Besar TKR/TRI menyerukan kepada kelompok Cumbok agar segera menyerahkan diri, sejak hari Kamis tanggal 10 Januari 1946, pukul 12 siang. Kalau tidak mentaati maklumat itu, maka mereka akan ditundukkan secara kekerasan.<sup>50</sup>

Pihak Markas Uleebalang ternyata tidak menggubris maklumat atau ultimatum tersebut. Sampai hari yang telah ditentukan, pihak Markas Uleebalang bukannya menghentikan aksi-aksinya lalu menyerah, melainkan meningkatkan aksi-kasi serangannya. Menurut beberapa sumber, ada dua kemungkinan yang membuat pihak *uleebalang* Cumbok ini tidak mau menyerah. Pertama, pimpinan Markas Uleebalang mempunyai keyakinan bahwa mereka pasti akan memenangkan peperangan karena menurut perhitungannya, tentara mereka lebih terlatih,

persenjataannya juga lebih canggih dan lebih lengkap daripada Korp Rakyat/MBRU, maupun dengan TKR. Kedua, karena "hukuman" yang dijatuhkan pihak pemerintah, yang *nota bene* masih dianggap sebagai pemerintahannya sendiri oleh para *uleebalang* di Cumbok, yaitu sebagai pengkhianat bangsa dan negara, yang kemudian juga dipertegas oleh tuduhan dari kelompok kaum ulama dan pemuda yang menyebutnya sebagai kaki tangan NICA, yang konsekuensinya sangat berat. Dengan adanya "hukuman" itu, maka menurut perhitungan para tokoh Markas Uleebalang, bagi mereka tidak ada pilihan lagi, sebab menyerahpun sama saja nasibnya, mereka pasti akan dihadapkan ke depan "pengadilan revolusi" sesuai dengan kondisi politik waktu itu.<sup>51</sup>

Sikap Markas Uleebalang yang dianggap demikian keras itu akhirnya mendorong pihak pemerintah RI untuk melaksanakan ultimatumnya. Pada tanggal 12 Januari 1946, perintah untuk menyerang dijatuhkan. Pasukan TKR dengan didukung oleh pasukan-pasukan dari Mujahidin, PRI, dan barisan senjata berat dari Seulimeum bergerak menyerbu pusat-pusat pertahanan pasukan Markas Uleebalang/BPK dan para pendukungnya.

Pertempuran sengit berlangsung hampir sepanjang hari. Akhirnya pada tanggal 13 Januari 1946, benteng pusat kekuatan Markas Uleebalang di Lam Meulo berhasil direbut oleh pasukan pemerintah RI. Bersmaan dengan jatuhnya benteng Lam Meulo, MBRU mengeluarkan maklumat yang berisi pemberitahuan tentang dilumpuhkannya pusat kekuatan Markas Uleebalang di Lam Meulo. Di samping itu ditegaskan pula agar pasukan pemerintah (TKR, Mujahidin, PRI atau pasukan rakyat lainnya yang tergabung dalam Korp Rakyat) tidak melakukan perampasan atau penyelewengan terhadap semua harta benda milik para *uleebalang* dan pengikutnya.<sup>52</sup>

Meskipun Lam Meulo dapat dikuasai pihak pemerintah, tidak berarti perlawanan Markas Uleebalang berhasil dilumpuhkan. Sebab, pemimpin utama Markas Uleebalang, yaitu Teuku Daud Cumbok beserta sekitar 99 orang pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Gunung Seulawah Jantan. Mereka

kemudian bergerak menuju bukit-bukit pegunungan antara Pidie dan Aceh Besar.

Agar keamanan segera tercapai, maka pemimpin Markas Umum Perjuangan memerintahkan agar pasukan pemerintah dan pendukungnya melakukan pengejaran. Akhirnya pada tanggal 16 Januari 1946, Teuku Daud Cumbok dan para pengikutnya berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke Sigli untuk diadili. Sebelumnya para tawanan ini dibawa ke MBRU Garot. Di sini mereka para tawanan itu disuruh berdiri di atas meja sambil meneriakkan “merdeka” di depan orang-orang yang berkumpul. Dari Garot mereka dipindahkan lagi ke Sanggeue. Di tempat ini mereka dijatuhi hukuman mati.<sup>53</sup>

Setelah itu semua kepala adat ditangkap. Pemerintah Keresidenan di Kutaraja meminta gara para *uleebalang* yang terlibat atau pendukung Markas Uleebalang itu dibawa ke Kutaraja untuk diadili. Namun dalam prakteknya para *uleebalang* itu tidak pernah sampai ke pengadilan Kutaraja, karena rakyat telah menyelenggarakan pengadilannya sendiri, dengan hakim-hakimnya sendiri. Pasukan Pesindo dan Mujahidin yang menjadi pasukan penjaga keamanan di wilayah Pidie setelah Cumbok, Pidie dikuasai, telah menghukum mati hampir semua *uleebalang*, kepala adat yang ada di wilayah Pidie. Penduduk di pedesaan juga melakukan penjarahan, sekaligus menghabisi para anggota keluarga *uleebalang* yang masih hidup, tidak peduli apakah para *uleebalang* itu benar-benar kaki tangan penjajah Belanda, Jepang, atau NICA. Bahkan beberapa *uleebalang* ayang telah diangkat menduduki jabatan sipil atau militer dalam pemerintahan Republik di Pidie pun ikut dihabisi, termasuk anak-anak laki-lakinya, kecuali anak laki-laki yang paling kecil.<sup>54</sup>

“Aksi Daulat” yang dilakukan Ce Mamat dengan Dewan Rakyatnya dianggap selesai dengan tertangkapnya Ce Mamat. Setelah itu masyarakat Banten kembali ke dalam kehidupan rutinnnya, yang kemudian disibukan pula dengan perjuangan melawan Kolonialis Belanda yang berusaha menjajah kembali wilayah Indonesia. Tidak demikian halnya dengan peristiwa Cumbok. Permasalahan dianggap belum selesai dengan

dihancurkannya Markas Uleebalang dan dibunuhnya Teuku Daud Cumbok. Hampir selama dua bulan setelah itu, daerah Lam Meulo, Beureunun, dan Leung Putu dilanda kekacauan yang kemudian meluas hampir ke seluruh wilayah Pidie, mulai dari Meureudu di perbatasan Aceh Utara sampai ke daerah *uleebalang XII Mukim* Pidie di perbatasan Aceh Besar.

Seusai perang Cumbok, kelompok PUSA mengalihkan harta keluarga *uleebalang* yang tersisa kepada rakyat Pidie. Para penyewa mengambil tanah yang tadinya mereka garap untuk kepentingan kepala adat, dengan alasan karena *uleebalang* telah merampas tanah milik leluhur keluarga mereka. Seruan yang dulu dikumandangkan oleh para tokoh PUSA agar tidak merampas harta milik kelompok *uleebalang*, sirna begitu saja. Bahkan beberapa tokoh Pusa dan para pendukungnya justru melakukan tindakan yang kurang simpatik dengan cara menggunakan kesempatan untuk memperkaya diri sendiri dengan menggunakan dalih revolusi dan agama. Gani misalnya, dengan gagahnya memperlihatkan cicin berlian yang dirampasnya dari Teuku Ahmad Danu yang ditawannya. Contoh lainnya, ketua harian Majelis Penimbang, telah menyediakan kuitansi kosong yang harus ditandatangani para ahli waris *uleebalang* sebagai perjanjian. Pengaduan mereka terhadap ganti rugi seringkali kandas, bahkan banyaka yang berpendapat bahwa penyitaan terhadap harta keluarga *uleebalang* sebagai tindakan yang sesuai dengan kerugian yang telah diderita PUSA akibat tindakan kelompok Cumbok.

Pantun-pantun yang ditulis oleh Abu Bakar di bawah ini sedikit banyak mencoba mengungkapkan kembali peristiwa Cumbok, yang dapat pula dikatakan sebagai suatu tragedi di daerah Pidie. Kedua pantun itu melukiskan kepedikan seorang kakak yang ditinggalkan adiknya yang tewas dalam perang Cumbok, dan melukiskan tingkah laku para pemenang perang, khususnya para ulamanya. Kedua pantun itu berbunyi sebagai berikut:

*Din din pula pisang bambang pula pade  
Teuku Cumbok geupe ek' prang  
Uleebalang abeh mate*

Artinya;

Capung menanam pisang, kupu-kupu menanam padi  
Teuku Cumbok melakukan perang  
Dan semua uleebalangpun mati

*Bukon sayang lon kalon labu  
Teungoh lon sibu kamate' pucok  
Bukan sayang lon kalon Teungku  
On kalhueh karu koet 'antra Cumbok"*

Artinya :

Amat sayang saya lihat labu  
Sedang saya siram sudah mati pucuk  
Amat sayang saya melihat Teungku  
Sesudah perang, diraupnya harta Cumbok.<sup>55</sup>

Setelah perang Cumbok selesai, sudah barang tentu banyak pula para anggota *uleebalang* yang selamat atau diselamatkan. Mereka ini terutama kaum wanitanya. Tidak sedikit para anggota PUSA yang memperistri janda-janda *uleebalang*. Misalnya janda *uleebalang* Pidie, Teuku L. Oemar Ndjong disunting oleh Teungku Banta meskipun sebelumnya Teungku Banta pernah dibuang oleh *uleebalang* Pidie tersebut. Pada masa itu dapat dikatakan merupakan suatu kebanggaan jika berhasil mempersunting janda atau anak gadis para *uleebalang*, meskipun suami-suami atau ayah mereka merupakan lawan kelompok PUSA. Kejadian ini antara lain digambarkan dalam pantun-pantun di bawah ini:

*Cicem nuri dicong bak panyoee  
Tok tok beuragoe di doek lam guha  
Bak pihak galak teuku keabinoee  
Koh takoee lakoee tiek lam mon tuha*

Artinya :

Burung nuri bertengger di pohon kapas  
Burung ketok-ketok duduk di dalam gua  
Saking sukanya ke istri teuku  
Leher suaminya dipotong dan dilempar ke dalam sumuur  
tua

*'Peu keutak ketok bak babah neurok  
Burong keutoktok sinan ditapa  
Geusa jageupoh biek Teuku Cumbok  
Mangat jeut geucok inong ngon antra*

Artinya;

Apa itu yang ketak-ketok di pintu masuk  
Burung ketak-ketok bertapa disitu  
Sengaja dibunugnya keturunan Teuku Cumbok  
Supaya bisa mengambil istri dan harta

Setelah perang Caumbok berakhir, kedudukan *uleebalang* di Aceh semakin merosot. Kedudukannya sebagai kepala adat, kepala pemerintahan yang dipegangnya selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad, kini beralih ke kaum ulama yang menang perang. Bahkan gerakan pembersihan terhadap unsur-unsur *uleebalang* itu tidak berhenti sampai di wilayah Pidie saja, melainkan terus meluas ke seluruh wilayah Aceh. Kelompok penentang *uleebalang* ini melakukan semacam kudeta terhadap pemerintahan sipil dan militer Keresidenan Aceh. Teungku Amir Husin Al Mujahid telah menggerakkan para pengikutnya untuk menangkap semua *uleebalang*, termasuk yang duduk dalam pemerintahan maupun ketentaraan. Mereka tidak mengacuhkan lagi pemerintahan yang ada yang dianggap didominasi oleh para *uleebalang*. Teuku Raja Pidie yang menjadi Asisten Residen Aceh Timur dan Teuku Alibasyah, wedana Langsa ditangkap kelompok Al Mujahid yang kemudian dibunuh kelompok PUSA dengan tuduhan mendukung kaum Cumbok.

Puncaknya pada tanggal 1 Maret 1946 Al Mujahid dengan pasukannya yang diangkut dengan 50 truk memasuki Kutaraja tanpa ada perlawanan dari pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI). Mereka mendatangi komandan Divisi V/TRI Sjamaun

Gaharu dan mengajukan tuntutan agar Teuku Nyak Arif, Sjamaun Gaharu, dan Teuku Hamid Azwar melepaskan jabatannya selaku pimpinan TRI. Sjamaun Gaharu yang tidak dapat memutuskan menerima atau tidaknya tuntutan itu kemudian menyampaikan hal itu kepada Residen Teuku Nyak Arif yang juga menjabat sebagai anggota Staf Umum Komandemen Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor.

Ternyata Residen Teuku Nyak Arif tidak berkeberatan terhadap tuntutan mereka. Menurutnya daripada rakyat banyak jatuh korban oleh sesuatu tindakan yang tidak mereka mengerti benar-benar, lebih baik jabatan dan pangkat yang dituntut kelompok Al Mujahid diberikan. Keputusan ini tentu saja agak mengecewakan Sjamaun Gaharu selaku komandan TRI. Kemudian serah terima jabatan itu secara resmi diadakan di lapangan asrama TRI Kuta Alam, Kutaraja. Kolonel Sjamaun Gaharu selaku Komandan Divisi dan Mayor Teuku A. Hamid Azwar selaku Kepala Staf Divisi menyerahkan jabatannya kepada Teungku Amir Husin Al Mujahid. Dua hari kemudian Teuku Nyak Arif juga dibebaskan dari jabatannya lalu diasingkan ke Takengon, sedangkan dua pejabat lainnya yaitu Teuku Panglima Polem dan Mohammad Ali dikenakan tahan rumah di Kutaraja.

## Catatan

- 1 Sri Handajani Purwaningsih. "Pergolakan Sosial Politik di Serang Pada Tahun 1946: Kasus Gerakan Aksu Daulat Ce Mamat"(Skripsi Program S1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1984) h. 47.
- 2 *I b i d.* h.485.
- 3 *I b i d.* h.485.
- 4 Adam Malik, *Riwayat Sekitar Proklamasi 1945*. Djakarta: Widjaja, 1970, h.63.
- 5 *Op.cit* h.49.
- 6 *I b i d.* h.50.
- 7 *I b i d.* h.51.
- 8 *I b i d.* h.53.
- 9 *I b i d.* h. 58.
- 10 *I b i d.* h.92.
- 11 *I b i d.* h. 72.
- 12 Panitia Penyusunan Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan dan Dokumen Bernilai Sejarah – Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat*. 1991. h. 417.

- 13 *I b i d.* h.88.
- 14 Nazaruddin Syamsuddin. *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam Aceh.* Jakarta: Grafitipers, 1990.h. 31.
- 15 Sjamaun Gaharu. "Revolusi Sosial di Awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada.* Medan, Senin 14 Januari 1985.
- 16 *I b i d.*
- 17 Mr. S.M. Amin, *Kenang-kenangan dari Masa Lampau.* Jakarta : Pradya Paramitha, 1978. h. 34-35.
- 18 Nazaruddin Syamsuddin, *Op.cit.* 1990. h. 21.
- 19 A. Hasjmy, *Ulama Aceh: Mujahid Perang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa.* Jakarta: Bulan Bintang, 1997, h, 109.
- 20 *I b i d.* h. 57-58.
- 21 *I b i d.* h. 189.
- 22 Cut Zulia Djohan, "Konflik Uleebalang dan Ulama Dalam Revolusi Sosial di Aceh Besar, Desember 1945 - Maret 1946" (Skripsi Sarjana S1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, 1995. h. 34.
- 23 *I b i d.* h. 35.
- 24 M. Nur El Ibrahimy, "Perebutan kekuasaan dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada.* Medan, Selasa, 28 Agustus 1984.
- 25 Sjamaun Gaharu, "Revolusi sosial di awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia", *Waspada.* Selasa, 22 Januari 1985.
- 26 A.H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia.* Jilid. II. Bandung: Angkasa, 1977, h. 290.
- 27 Sekarang kota Cumbok diganti namanya menjadi kota Bakti yang termasuk wilayah Aceh Pidie. Lihat M. Nur El Ibrahimy.

*Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh.* Jakarta: Gunung Agung, 1982, h.87.

28 *I b i d.* .

29 *I b i d.* h.94.

30 Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 191987. h.35.

31 *I b i d.*

32 M. Nur El Ibrahimy, *Op.cit.* h. 86.

33 *I b i d.* h.88.

34 R. Ratna, "Perang Cumbok di Aceh Tahun 1945", *Revolusi Nasional di Tingkat Lokal.* Jakarta: Proyek IDSN-Depdikbud, 1989. h. 14.

35 *I b i d.* h.15.

36 M. Nur El Ibrahimy, *Op.cit.* h.90.

37 Ratna, *Op.cit.*

38 Sjamaun Gaharu, "Revolusi sosial di Awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia", *Waspada.* Jumat, 18 Januari 1985.

39 *I b i d.*

40 Cut Zulia Djohan, *Op.cit.* h. 58.

41 El Ibrahimy, *Op.cit.* h.94.; Lihat pula Anthony Reid *Op.cit.*, h.332.

42 El. Ibrahimy, *I b i d.*; Lihat juga Anthony Reid, *Op.cit.* h. 332.

43 Dalam buku A.H. Nasution Markas Uleebalang menentukan bahwa tindakan mereka akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1945. Lihat Nasution, *Op.cit.* h. 570. Lihat juga Ratna, *Op.cit.* h.94.

- 44 El Ibrahimy, *Op.cit.*
- 45 El Ibrahimy, *I b i d.* h.96.
- 46 M. Amin. *Kenang-kenangan Dari Masa Lampau.* Jakarta: Pradnja Paramitha, 1978. h.27.
- 47 Ratna, *Op.cit.* h.17.
- 48 Cut Zulia Djohan, *Op.cit.* h.62.
- 49 M. Nur El Ibrahimy, *Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh.* Jakarta: Gunung Agung, 1982, h. 98.
- 50 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh.* Jakarta: Proyek IDSN – Depdikbud, 1983, h.97.
- 51 Anthony Reid, *Op.cit.* h. 336.
- 52 Ratna, *Op.cit.* h.19.
- 53 Cut Zulia Djohan, *Op.cit.* 65.; Anthony Reid, *Op.cit.* h.337.
- 54 Eric Morris, "Aceh: Revolusi Sosial dan Pandangana Islam", *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan.* Audrey Kahin (ed.) Jakarta: Grafiripers, 1990. h. 102.
- 55 Cut Zulia Djohan, *Op.cit.* h.69.

## **PENUTUP**

Seperti telah disebutkan pada bagian “pendahuluan”, kyai atau alim ulama mempunyai kedudukan yang khusus di kalangan komunitas Islam, terutama di daerah pedesaan. Mereka dianggap bukan saja sebagai guru atau juru penerang, melainkan juga sebagai pemimpin oleh masyarakat di sekitarnya. Menurut Zaini Muchtarom, pada masa sebelum Indonesia merdeka, fatwa mereka bahkan lebih didengar dan dituruti daripada fatwa yang dikeluarkan oleh para birokrat pemerintah, termasuk pemerintah pada masa Indonesia merdeka. Karena itu tidaklah terlalu aneh jika pemerintah VOC atau Kompeni dan juga pemerintahan penggantinya sampai dengan masa pemerintahan Hindia Belanda, demikian curiga terhadap tokoh-tokoh agama atau alim ulama tersebut. Apalagi dalam beberapa peristiwa kerusuhan atau pemberontakan petani, baik secara langsung maupun tidak langsung ikut terlibat di dalamnya. Dalam beberapa laporan lama semasa VOC, kadangkala disebut sebagai haji. Oleh karena itu pula VOC seringkali melakukan tindakan pengawasan yang cukup ketat kepada para jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci Mekkah.

Kedekatan para petani pemberontak kepada para alim-ulama, baik yang disebut kyai, ajengan, atau teungku, sebenarnya bukan karena mereka menganggap para ulama itu ahli strategi perang. Mereka dekat atau datang kepada para ulama karena pada umumnya tokoh-tokoh ini mengerti permasalahan yang dihadapi para petani. Di samping itu para

ulama waktu itu mampu memberikan harapan adanya suatu kehidupan yang baik, baik melalui ayat-ayat Quran atau Hadis yang dikuasainya secara sempurna, maupun melalui hikayat-hikayat atau mitos-mitos terdahulu yang sebagian di antaranya telah dikenal masyarakat pedesaan. Dalam uraian terdahulu misalnya disebutkan bagaimana para ulama Aceh, para Teungku di dayah-dayah menghidupkan kembali hikayat-hikayat lama untuk memotivasi rakyat Aceh, sehingga dapat melihat Perang Aceh sebagai perang *fisabillāh*.

Oleh karena demikian banyak keterkaitan para alim ulama ini dalam memotivasi perjuangan rakyat melalui penghidupan kembali, atau mengaktualisasi kembali hikayat-hikayat atau mitos-mitos lama, bahkan juga melalui tarekat, maka munculah suatu anggapan bahwa pada dasarnya para alim ulama itu tidak mengerti politik. Bahkan ada pula yang berpendapat bahwa alim ulama tradisional sama sekali tidak tahu politik. Mereka menjadi besar hanyalah karena peranannya sebagai "broker budaya". Artinya mereka menjadi besar dan kharismatis, karena mereka menjadi agen ilmu pengetahuan Islam/Arab yang dibawanya dari negeri Arab atau Timur Tengah ke wilayah pedesaan di Indonesia.

Pendapat seperti itu memang tidak terlalu salah, namun juga tidak terlalu benar. Pendapat tersebut terlalu mengabaikan suatu kenyataan bahwa keberhasilan dari beberapa organisasi politik di Indonesia dalam meraih dukungan dari rakyat pedesaan, terutama daerah yang terkenal fanatik keislamannya, adalah berkat dukungan para kyai, teungku atau alim ulama yang menjadi panutan masyarakat setempat. Keberhasilan Sarekat Islam (SI) di Priangan atau Banten dalam meraih dukungan, bukan semata-mata karena rakyat daerah itu mengetahui persis program-program perjuangan yang dikemukakan Cokroaminoto, Abikusno atau Abdul Muis. Mereka ikut menjadi anggota SI karena panutannya ikut mendukung organisasi tersebut. Dan para kyai itu ikut mendukung SI karena mereka mengerti program-program perjuangan yang dikemukakan para pimpinan SI, antara lain melalui anggaran dasar (statuten) SI disebarkan waktu itu.

Kemudian pada masa awal proklamasi kemerdekaan, kembali peranan para alim ulama atau elit agama Islam ini teruji. Di Banten misalnya, muncul gerakan aksi daulat dari kelompok Ce Mamat, yang berupaya membasmi orang-orang yang ditafsirkan mereka sebagai bekas kaki tangan penjajah. Gerakan Ce Mamat dengan Dewan Rakyatnya mengalami kegagalan antara lain karena mereka gagal meraih dukungan para elit agama yang ada di wilayah itu. Di saat pemerintah Pusat belum mempunyai kekuatan untuk menumpas gerakan Ce Mamat ini, Kyai Haji Akhmad Khatib bersama-sama Kyai Haji Syam'un berhasil menyusun kekuatan yang mendapat dukungan rakyat guna menumpas gerakan Ce Mamat dengan Dewan Rakyatnya itu.

Demikian pula di Cumbok, Pidie, gerakan Markas Uleebalang gagal menguasai wilayah Pidie walaupun mempunyai persenjataan yang lebih baik daripada pasukan TKR maupun badan-badan perjuangan lainnya. Salah satu sebabnya karena rakyat wilayah Pidie lebih memilih mendukung para ulama yang telah memberikan harapan hidup yang lebih baik daripada para *uleebalang* yang menjadi kepala wilayah dan pemangku adat waktu itu. Para ulama yang tergabung dalam PUSA pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh mampu memberikan kepastian kepada pemerintah yang masih ragu-ragu waktu itu. Meskipun harus diakui pula dalam beberapa hal tindakan para ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat gerakan Markas Uleebalang itu, dinilai terlalu berlebihan. Oleh karena itu tidak aneh jika ada yang mengartikan bahwa PUSA itu merupakan akronim dari "Pembunuh Uleebalang Seluruh Aceh".<sup>1</sup>

Terlepas dari adanya aspek-aspek negatif itu, bagaimanapun di sini terlihat bahwa peranan kaum ulama atau elit agama tidak dapat ditepisakan begitu saja. Dari kedua kasus di atas, baik di daerah Banten maupun di Pidie kedudukan dan pengaruh elit agama lebih mengakar di kalangan rakyata (pedesaan) dibandingkan dengan para bangsawan maupun kaum birokrasi pemerintahan.

***Catatan***

- 1 **Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987. h.22.**

## **KEPUSTAKAAN**

### **Sumber Kearsipan**

*Algeene Rijksarschief, Den Haag*  
Mailrapporten (mailr.)  
Mailr. Geheim (Mailr. Geheim)  
Verbalen

*Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta.*

Algemeen Secretaris

Arschief Residentie

### **Koran dan Majalah**

*Al-Hidajatoel Islamijah* 1931

*Almizan.* 1932.

*Attabliatoel Islami.* 1938-1942

*Bandera Islam*

*Berita Antropologi* 1975.

*Neratja*

*Pahlawan.* 1947

*Panji Masyarakat*

*Tempo*

*Waspada*, 1985

### **Artikel dan Buku**

Achmad Djajadiningrat, Pangeran Aria, *Kenang-kenangan*.  
Kolff-Buning – Balai Poestaka, 1936

Adam Malik, *Riwayat Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Wijaya, 1970.

Alfian, T. Ibrahim, dkk. *Dari babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1987.

Amelz, H.O.S. *Tjokroaminoto, Hidup dan Perjuangannja I*.  
Djakarta: Bulan Bintang, 1952.

Amin, M. Massyur. dkk. *Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan*. Jakarta: P.T. Pustaka Grafika Kita, 1988.

Benda, Harry J. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Terjemahan oleh: Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Bukhari, S. Ibrahim. *Sedjarah Masuknja Islam & Proses Islamisasi di Indonesia*. Djakarta, 1971.

Cribb, Robert (ed). *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of The Netherlands Indies 1880-1942*. Leiden: KITLV Press, 1994.

Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Deni Kurniadi, "Keresidenan Priangan pada Masa Revolusi: Tinjauan di Bidang Politik dan Militer" (Skripsi S1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1989).

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Depdikbud, 1984.
- Djodi Gondokusumo dan Amelz, *Parlemen Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1951.
- Djohan, Cut Zulia. "Konflik Ileebalang dan Ulama Dalam Revolusi Sosial di Aceh Besar, Desember 1945 – Maret 1946" (Skripsi Sarjana S1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1995.
- El Ibrahimy, M. Nur. "Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada*. 23-26 Maret 1984.
- , "Perebutan Kekuasaan Dalam Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada*. 21 Agustus – 1 September 1984.
- , *Teungku Muhammad Daud Beureueh Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.
- Gaharu, Sjamaun, "Perbedaan Pandangan Tentang Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada*. 12-25 Juni 1984..
- , "Revolusi sosial di Awal Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Aceh", *Waspada*. 5 – 23 Januari 1985.
- Geertz, Clifford. "The Javanese Kijaji: The Changing Roles of A Cultural Broker", *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 2., 1960.
- , *The Religion of Java*. New York. The Free Press Glencoe, 1980.
- , *Islam Yang Saya Amati: Perkembangan di Maroko dan Indonesia*. Terjemahan oleh: Hasan Basari, Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1982.
- Haluang Michrob, Drs, M.Sc. dan Drs. A. Mudjahid Chadari. *Catatan Masalah Banten*. Serang: Saudara, 1993.

- Hasjmy, A. *Ulama Aceh: Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamadun Bangsa*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Hatta, Mohamad. *Sekitar Proklamasi*. Jakarta: Tintamas, 1970.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta : P3M, 1987.
- Korver, A.P.E. *Sarekat Islam Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers, 1985.
- Muhammad Gade Ismail, dkk. *Tantangan dan Rongrongan Terhadap Keutuhan dan Kesatuan: Kasus Darul Islam di Aceh*. Jakarta: Depdikbud, Ditjenbud - Jarahnitra, 1994.
- Muhammad Hudan. "Kelas Menengah dan Pergerakan Nasional di Indonesia", *Seminar Sejarah Nasional IV : Dinamika Perkembangan Politik Bangsa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud, Ditjenbud-Jarahnitra, 1985.
- Mohammad Iskandar. "Para Pembawa Amanah : Pergulatan Pemikiran Kyai dan Ulama di Daerah Priangan 1900 - 1942" (Tesis S2 pada Program Studi Sejarah - Pascasarjana Universitas Indonesia, 1991.)
- "Ciomas 1886: Suatu Pemberontakan Petani di Tanah Partikelir" (Skripsi Sarjana S1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1982)
- "Pemberontakan Kaum Priyayi Tahun 1893 di Kabupaten Bandung" (Makalah pada Seminar Sejarah Nasional IV, Yogyakarta, Desember 1985).
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid II. Bandung: Angkasa, 1977.
- Nazaruddin Syamsuddin. *Pemberontakan Kaum Republik.- Kasus Darul Islam Aceh*. Jakarta: Grafitipers, 1990.

- Onghokham. "Pulung Affair: Pemberontakan Pajak di Desa Patik, Beberapa Aspek Politik Desa di Madiun Pada Abad Ke-19", *Majalah Ilmu-ilmu Sastra Indonesia (MISI)*. Januari 1977. Jilid VII, No.1.
- Panitia Penyusunan Sejarah Perkembangan Pemerintahan dan Dokumen Bernilai Sejarah - Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*. 1991.
- Pijper, G.F. *Beberapa Studi Tentang Sejarah Islam di Indonesia 1900-1950*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- R.A.F. *Dongeng Enteng ti Pasantren*. Bandung: Tarate, 1982.
- Ratna, R. "Perang Cumbok di Aceh Tahun 1945", *Revolusi Nasional di Tingkat Lokal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Sejarah dan Nilai Tradisional, 1989.
- Reid, Anthony. *Perjuangan Rakyat: Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Rinkes, D. *Bescheiden Betreffende De Vereeniging "Sarekat Islam"*. Batavia: Landsdrukkerij, 1913.
- Sartono Kartodirdjo. *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1984.
- *Peasants' Revolt of Banten in 1888. Its Condition, Course, and Sequel: A Case Study of Social Movement in Indonesia*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1956.
- *Sejarah Perlawanan-perlawanan Terhadap Kolonialisme*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sejarah ABRI, 1973.
- Sri Handajani Purwaningsih. "Pergolakan Sosial Politik Di Serang Pada Tahun 1946: Kasus Gerakan Aksi Daulat Ce mamat" (Skripsi Sarjana S1 pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1984).

- Stoddard, L. *Dunia Baru Islam*. Djakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Stokhof, W.A.L. dan N.I.G. kaptein (redaktur). *Beberapa Kajian Indonesia dan Islam*. Jakarta: INIS, 1990.
- Suryanegara, A. Mansur. "Perlawanan Pesantren Terhadap Ekonomi Politik Imperialisme Belanda", *Panji Masyarakat*. No.126.
- Susanto Tirtoprodjo. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: Pembangunan, 1983.
- Van'T Veer, Paul. *Perang Aceh: Kegagalan Snouck Hurgronje*. Jakarta: Grafitipers, 1985.
- Zaini Muchtarom, *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS, 1988.
- Zamakhsary Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES, 1982.

